



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri dari: Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stake holder*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, perubahan ekuitas, dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- 1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
- 3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta hasil- hasil yang dicapai;
- 4) Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- 5) Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, pinjaman, hibah dan pendapatan lain - lain yang sah; dan
- 6) Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang- undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- 2) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5) Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



- 6) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
- 7) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Dearah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 15) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2016, entitas dalam Pemerintah KabupatenTanah Bumbu yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- | | |
|---|--|
| 1. Dinas Pendidikan | 25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2. Dinas Kesehatan | |
| 3. Rumah Sakit Umum Daerah | 26. Kecamatan Karang Bintang |
| 4. Dinas Pekerjaan Umum | 27. Kecamatan Kusan Hilir |
| 5. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan | 28. Kecamatan Sungai Loban |
| 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 29. Kecamatan Satui |
| 7. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 30. Kecamatan Simpang Empat |
| 8. | 31. Kecamatan Batulicin |
| 9. Badan Lingkungan Hidup Daerah | 32. Kecamatan Kusan Hulu |
| 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 33. Kecamatan Angsana |
| 11. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 34. Kecamatan Mantewe |
| 12. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 35. Kecamatan Kuranji |
| 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 36. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI |
| 14. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal | 37. Kelurahan Batulicin |
| 15. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | 38. Kelurahan Kampung Baru |
| 16. Kantor Satuan Polisi Pamong | 39. Kelurahan Tungkaran Pangeran |
| | 40. Kelurahan Gunung Tinggi |
| | 41. Kelurahan Kota Pagatan |
| | 42. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan |
| | 43. Kantor Ketahanan Pangan Daerah |
| | 44. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 45. Kantor Perpustakaan Arsip dan |



Praja dan Perlindungan Masyarakat	Dokumentasi
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	46. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
19. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48. Dinas Pertambangan dan Energi
20. Sekretariat Daerah	49. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Sekretariat DPRD	50. Dinas Pasar
22. Dinas Pendapatan	51. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
23. Badan Kepegawaian Daerah	
24. Inspektorat	

LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan SKPKD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

LKPD ini tidak mencakup entitas:

- 1) Pemerintah Pusat;
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BPD; dan
- 3) Laporan Keuangan Desa.

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Entitas
- 1.4. Sistematika Penyajian atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto
 - 2.1.2. Struktur Ekonomi
 - 2.1.3. PDRB Perkapita
- 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- 3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



-
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Pengakuan dan Pengukuran atas Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.5. Pengakuan dan Pengukuran atas Laporan Operasional
 - 4.6. Penyajian Laporan Arus Kas
 - 4.7. Pengakuan dan Pengukuran atas Pos- pos Neraca

BAB V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 menunjukkan bahwa kategori primer khususnya pertanian mempunyai peranan sebesar 17,1 persen dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 41,1 persen. Ini berarti 58 persen lebih perekonomian Tanah Bumbu disumbang oleh 15 kategori lainnya. Dominasi yang tidak seimbang ini menyebabkan ketergantungan ekonomi regional terhadap kategori tersebut sangat besar. Dalam kaitan ini, akan mudah melihat ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu hanya dengan melihat kedua kategori tersebut. Apalagi kalau dihubungkan dengan keterkaitan kegiatan dari Tabel 2.1.1, maka dinamika kedua kategori tersebut akan mencerminkan dinamika ekonomi regional Tanah Bumbu secara umum.

Tabel 2.1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011–2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,52	3,22	8,24	5,90	5,88
2	Pertambangan dan Penggalian	12,22	7,16	(0,25)	1,59	(0,43)
3	Industri Pengolahan	2,40	8,14	10,53	5,33	4,65
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,99	7,72	5,51	13,30	20,87
5	Pengadaan Air	14,33	3,42	9,29	2,17	4,54
6	Konstruksi	5,11	6,73	5,80	0,87	3,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,59	5,17	8,37	7,64	7,76
8	Transportasi dan Pergudangan	5,12	6,68	6,92	6,36	6,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,88	8,26	7,86	4,41	5,44
10	Informasi dan Komunikasi	6,69	5,34	8,41	7,82	7,49
11	Jasa Keuangan	5,11	5,08	12,24	6,50	4,17
12	Real Estate	6,29	7,43	7,60	(0,51)	4,09
13	Jasa Perusahaan	7,81	8,29	8,75	8,70	8,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,65	5,94	5,84	5,29	8,84
15	Jasa Pendidikan	4,08	5,03	7,23	8,59	8,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	7,85	9,09	6,43	8,62
17	Jasa Lainnya	3,26	3,14	2,58	8,48	7,92
PDRB		7,91	6,29	3,8	3,62	3,01

Sumber : BPS Tanah Bumbu

2.1.2 Struktur Ekonomi

Apabila diperhatikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2015 ini tampaknya struktur perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu belum melihat adanya pergeseran yang mengarah pada perubahan struktur ekonomi. Kategori primer yaitu kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian masih dominan menyumbang nilai PDRB di Kabupaten Tanah Bumbu. Separuh lebih nilai perekonomian diciptakan dari dua kategori tersebut.



Tabel 2.1.2
Distribusi PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011- 2015
Atas Dasar Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,0	14,9	15,6	16,2	17,1
2	Pertambangan dan Penggalian	52,0	50,9	48,3	46,0	41,1
3	Industri Pengolahan	5,8	6,0	6,4	6,7	7,4
4	Pengadaan Listrik, Gas	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Air	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Konstruksi	5,0	5,1	5,4	5,5	6,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,9	5,3	5,5	5,8	6,5
8	Transportasi dan Pergudangan	4,6	4,7	5,0	5,3	5,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9
10	Informasi dan Komunikasi	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
11	Jasa Keuangan	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
12	Real Estate	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8
13	Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,5	2,6	29,0	3,0	3,4
15	Jasa Pendidikan	2,7	2,7	2,9	3,1	3,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
17	Jasa Lainnya	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Tanah Bumbu

2.1.3 PDRB PERKAPITA

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 2.1.3. Selama kurun waktu tahun 2011-2016 perkapita Tanah Bumbu semakin meningkat setiap tahunnya dari 44,59 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 49,79 juta rupiah pada tahun 2015.

Tabel 2.1.3
PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011–2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Per Kapita ADHB (ribu Rp)	44.592.41	45.943.99	46.579.89	48.905,22	49.787,22
2	PDRB Per Kapita ADHK (ribu Rp)	40.509,75	41.212.23	41.220.76	41.411.10	41.439,31
3	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	-	2.02	2.39	4.99	1.80
4	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK	-	1.73	0.02	0.46	0.07

Sumber : BPS Tanah Bumbu

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 yang diinginkan adalah:

1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.



5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Agar pencapaian pendapatan dapat terpenuhi dan senantiasa meningkat maka kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2016 adalah menetapkan target pendapatan secara realistis dengan mempedomani perolehan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya dengan senantiasa mengoptimalkan pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum dan mengupayakan penyelesaian pendapatan yang belum mempunyai dasar hukum agar pendapatan tersebut dapat dengan sah dipungut secara rasional dan dapat diukur.

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan di bidang pendapatan, strategi dalam bidang pendapatan lebih ditekankan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak serta pendapatan lain - lain yang sah pada subjek pajak perusahaan- perusahaan yang mempunyai skala ekonomi tinggi di daerah. Optimalisasi meliputi peningkatan penerimaan pada objek:
 - a. Pajak daerah terdiri dari (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Pajak Penerangan Jalan Umum; (3) Pajak Hotel; (4) Pajak Hiburan; (5) Pajak Air Tanah; (6) Pajak Restoran; (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (8) Pajak Reklame; (9) Pajak Sarang Burung Walet.
 - b. Retribusi daerah terdiri dari: (1) Jasa Umum; (2) Jasa Usaha dan (3) Perizinan Tertentu.
2. Melakukan peremajaan data (*updating data*) atas sumber- sumber pendapatan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta bagi hasil dari produksi.
3. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dana-dana bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Melakukan penjajagan dana-dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan atas pembangunan dan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar SKPD- SKPD penghasil pendapatan.
6. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Khususnya Pendapatan dari Retribusi dan Sumbangan Pihak Ketiga atau Dana Hibah dengan SKPD-SKPD Penghasil Pendapatan.
7. Peningkatan Penyesuaian produk hukum di bidang pendapatan.
8. Peningkatan sistem pengawasan pengelolaan pendapatan khususnya dalam pengelolaan surat surat berharga yang digunakan dalam pemungutan pendapatan daerah.
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
10. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan di bidang pendapatan khususnya persiapan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah.
11. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari



kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/ atau memungkinkan akan digali dari sumber- sumber pendapatan yang baru.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a. Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah.

C. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Kebijakan daerah dalam bidang pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu melakukan stabilisasi dan/ atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dilakukan melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang- undangan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang



diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokokpinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

A. Kebijakan Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan lain-lain. Secara spesifik kebijakan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penggeseran belanja dengan tetap menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan bidang urusan pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
- b. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui belanja modal maupun belanja bantuan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga.
- d. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja yang harus terukur capaiannya (*performance based budgeting*).
- e. Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui penyediaan dana pendampingan.

B. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan pada pemerintahan desa dan belanja tak terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Belanja Pegawai Kebijakannya diarahkan untuk:

- a. Pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pembayaran gaji ketiga belas dan keempat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Antisipasi untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2016;
- d. Peningkatan kesejahteraan dan produktifitas PNSD diberikan tambahan kepada seluruh PNSD



baik pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya, maupun PNSD Non Jabatan;

Kebijakan Belanja Hibah diarahkan khusus kepada Pemerintah Desa. Belanja Hibah kepada pemerintahan desa dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa. Disamping itu belanja hibah juga diberikan kepada organisasi, instansi atau lembaga yang membantu atau mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga organisasi atau lembaga yang diberi hibah perlu dilakukan secara selektif, akuntabel, transparansi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan secara selektif/tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan penambahan saham (investasi pemerintah daerah) serta pembayaran pokok utang yang dialokasikan melalui Pengeluaran Pembiayaan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Indikator pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Pendapatan Daerah.

Target Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp1.592.322.359.787,00 dan terealisasi sebesar Rp1.464.602.376.843,95 sehingga Pendapatan telah mencapai sebesar 91,98% dari target.

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp144.735.686.857,00 dan terealisasi sebesar Rp116.237.662.906,95 atau 80,31%,. PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp1.303.908.985.727.00 dan terealisasi sebesar Rp1.310.001.452.948,00 atau 100,47%, sehingga Pendapatan Transfer lebih dari target sebesar Rp6.092.467.221,00 atau 0,47%

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp143.677.687.203,0 dan terealisasi sebesar Rp38.363.260.989,00 atau 26,70%, sehingga kurang dari target sebesar Rp105.314.426.214,00 atau 73,30%.

2.3.2 Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp1.609.652.141.104,20 dan terealisasi sebesar Rp1.383.574.856.580,30 atau sebesar 85,95%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp226.077.284.523,90 atau sebesar 14,05%. Kekurangan Belanja Daerah terjadi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

A. Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsinya dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.



Hasil rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsinya dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016 tampak pada Tabel 2.1.4 berikut ini:

Tabel 2.1.4
Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsinya dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016

Kode	Uraian		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
					Jumlah (Rp)	%
1	2		3	4	5=4-3	6
01		PELAYANAN UMUM	544,477,097,507.20	470,290,674,393.00	(74,186,423,114.20)	86.37
01 1 06		Perencanaan Pembangunan	7,714,223,934.00	7,280,138,156.00	(434,085,778.00)	94.37
01 1 20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	517,864,403,375.20	445,434,310,786.00	(72,430,092,589.20)	86.01
01 1 21		Ketahanan Pangan	13,973,865,698.00	12,780,667,826.00	(1,193,197,872.00)	91.46
01 1 23		Statistik	144,662,500.00	141,765,625.00	(2,896,875.00)	98.00
01 1 24		Kearsipan	62,692,000.00	60,492,000.00	(2,200,000.00)	96.49
01 1 25		Komunikasi dan Informatika	4,717,250,000.00	4,593,300,000.00	(123,950,000.00)	97.37
03		KETERTIBAN DAN KEAMANAN	12,151,753,137.00	10,972,194,800.00	(1,179,558,337.00)	90.29
03 1 19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12,151,753,137.00	10,972,194,800.00	(1,179,558,337.00)	90.29
04		EKONOMI	87,432,330,273.00	72,836,895,346.00	(14,595,434,927.00)	83.31
04 1 07		Perhubungan	13,524,656,508.00	11,986,138,854.00	(1,538,517,654.00)	88.62
04 1 14		Tenaga Kerja	161,975,000.00	139,965,000.00	(22,010,000.00)	86.41
04 1 15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	587,053,000.00	343,235,000.00	(243,818,000.00)	58.47
04 1 16		Penanaman Modal	4,631,820,435.00	3,900,077,697.00	(731,742,738.00)	84.20
04 1 22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,779,458,301.00	13,892,530,590.00	(1,886,927,711.00)	88.04
04 2 01		Pertanian	11,579,799,461.00	9,487,510,369.00	(2,092,289,092.00)	81.93
04 2 02		Kehutanan	8,963,013,938.00	8,215,938,472.00	(747,075,466.00)	91.66
04 2 03		Energi dan Sumberdaya Mineral	5,077,787,797.00	4,680,504,443.00	(397,283,354.00)	92.18
04 2 05		Kelautan dan Perikanan	10,856,372,804.00	6,601,779,472.00	(4,254,593,332.00)	60.81
04 2 06		Perdagangan	10,237,140,235.00	8,282,500,518.00	(1,954,639,717.00)	80.91
04 2 07		Perindustrian	5,729,029,794.00	5,002,491,931.00	(726,537,863.00)	87.32
04 2 08		Transmigrasi	304,223,000.00	304,223,000.00	0.00	100.00
05		LINGKUNGAN HIDUP	38,938,071,115.00	31,542,864,064.00	(7,395,207,051.00)	81.01
05 1 05		Penataan Ruang	2,956,085,000.00	1,473,835,000.00	(1,482,250,000.00)	49.86
05 1 08		Lingkungan Hidup	35,550,586,115.00	29,977,079,464.00	(5,573,506,651.00)	84.32
05 1 09		Pertanahan	431,400,000.00	91,949,600.00	(339,450,400.00)	21.31
06		PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	249,560,949,566.00	214,560,439,861.00	(35,000,509,705.00)	85.98
06 1 03		Pekerjaan Umum	247,389,573,966.00	213,274,119,261.00	(34,115,454,705.00)	80.25
06 1 04		Perumahan	2,171,375,600.00	1,286,320,600.00	(885,055,000.00)	59.24
07		KESEHATAN	254,521,873,529.00	197,253,300,459.30	(57,268,573,069.70)	77.50
07 1 02		Kesehatan	254,175,468,779.00	196,924,845,459.30	(57,250,623,319.70)	77.48
07 1 12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	346,404,750.00	328,455,000.00	(17,949,750.00)	94.82
08		PARIWISATA DAN BUDAYA	7,386,000,932.00	7,008,861,599.00	(377,139,333.00)	94.89
08 1 17		Kebudayaan	5,077,790,932.00	4,843,692,099.00	(234,098,833.00)	95.39
08 2 04		Pariwisata	2,308,210,000.00	2,165,169,500.00	(143,040,500.00)	93.80
10		PENDIDIKAN	384,478,598,374.00	350,507,629,910.00	(33,970,968,464.00)	91.16
10 1 01		Pendidikan	378,978,310,839.00	345,494,877,060.00	(33,483,433,779.00)	91.16
10 1 18		Pemuda dan Olah Raga	3,199,420,000.00	2,988,633,000.00	(210,787,000.00)	93.41
10 1 26		Perpustakaan	2,300,867,535.00	2,024,119,850.00	(276,747,685.00)	87.97
11		PERLINDUNGAN SOSIAL	30,705,466,671.00	28,601,996,148.00	(2,103,470,523.00)	93.15
11 1 10		Kependudukan dan Catatan Sipil	6,396,067,392.00	5,984,662,065.00	(411,405,327.00)	93.57
11 1 11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,193,892,637.00	6,905,864,059.00	(288,028,578.00)	96.00
11 1 13		Sosial	17,115,506,642.00	15,711,470,024.00	(1,404,036,618.00)	91.80
JUMLAH			1,609,652,141,104.20	1,383,574,856,580.30	(226,077,284,523.90)	85.95

Berdasarkan Tabel 2.1.4 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Bidang Pelayanan Umum

Anggaran belanja yang ditetapkan untuk Bidang Pelayanan Umum pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp544.477.097.507,20 realisasi belanja Bidang Pelayanan Umum yang terjadi sebesar Rp470.290.674.393,00 atau 86.37% sehingga kurang dari anggaran belanja Bidang Pelayanan Umum sebesar Rp74.186.423.114,20 atau 13,63%.

2. Bidang Ketertiban dan Keamanan

Anggaran belanja yang ditetapkan untuk Bidang Ketertiban dan Keamanan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp12.151.753.137,00 realisasi belanja Bidang Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp10.972.194.800,00 atau 90,29% sehingga kurang dari anggaran belanja Bidang Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1.179.558.337,00 atau 9,71%.



3. Bidang Ekonomi

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Ekonomi dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp87.432.330.273,00 terealisasi sebesar Rp72.836.895.346,00 atau 83,31%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Ekonomi sebesar Rp14.595.434.927,00 atau 16,69%.

4. Bidang Lingkungan Hidup

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Lingkungan Hidup dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp38.938.071.115,00 terealisasi sebesar Rp31.542.864.064,00 atau 81,01%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp7.395.207.051,00 atau 18,99%.

5. Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp249.560.949.566,00 terealisasi sebesar Rp214.560.439.861,00 atau 85,98%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp35.000.509.705,00 atau 14,02%.

6. Bidang Kesehatan

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Kesehatan dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp254.521.873.529,00 terealisasi sebesar Rp197.253.300.459,30 atau 77,50%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Kesehatan sebesar Rp57.268.573.069,70 atau 22,50%.

7. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.386.000.932,00 terealisasi sebesar Rp7.008.861.599,00 atau 94,89%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp377.139.333,00 atau 5,11%.

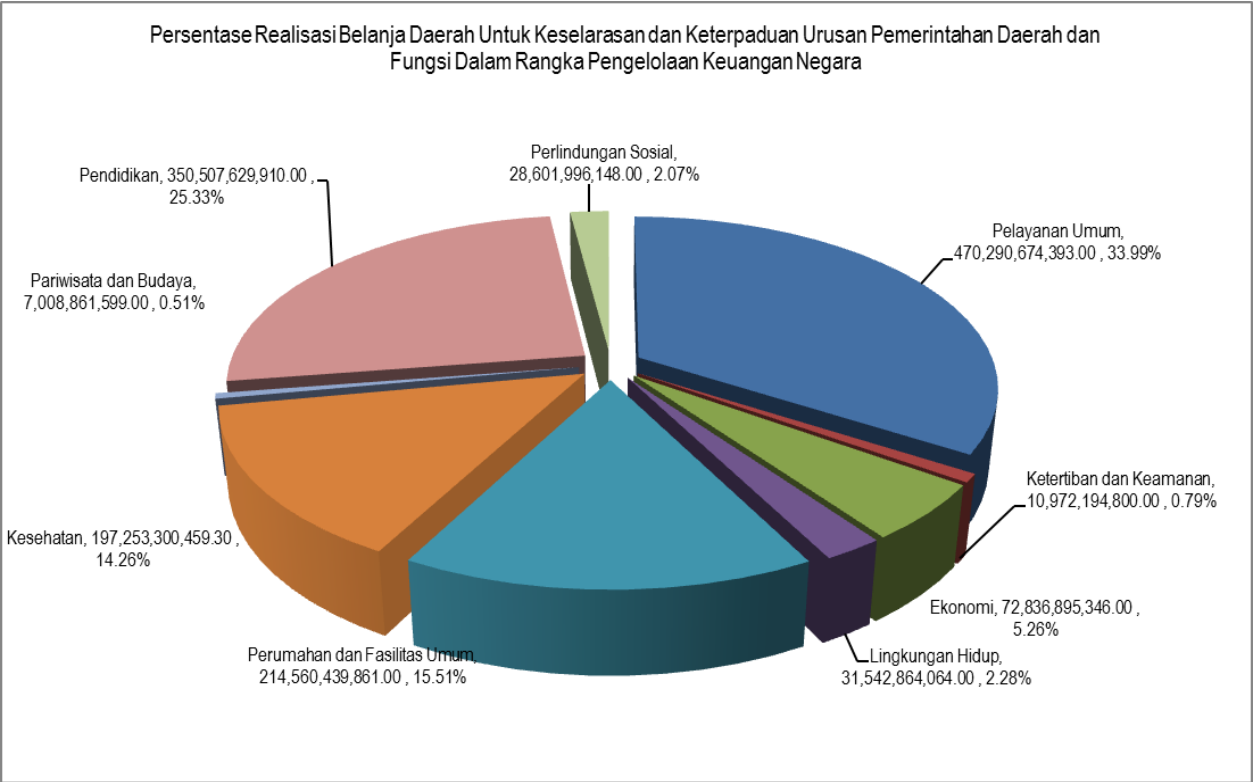
8. Bidang Pendidikan

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Pendidikan dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp384.478.598.374,00 terealisasi sebesar Rp350.507.629.910,00 atau 91,16%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Pendidikan sebesar Rp33.970.968.464,00 atau 8,84%.

9. Bidang Perlindungan Sosial

Anggaran yang ditetapkan pada Bidang Perlindungan Sosial dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp30.705.466.671,00 terealisasi sebesar Rp28.601.996.148,00 atau sebesar 93,15%, sehingga kurang dari anggaran Belanja di Bidang Perlindungan Sosial sebesar Rp2.103.470.523,00 atau sebesar 6,85%.

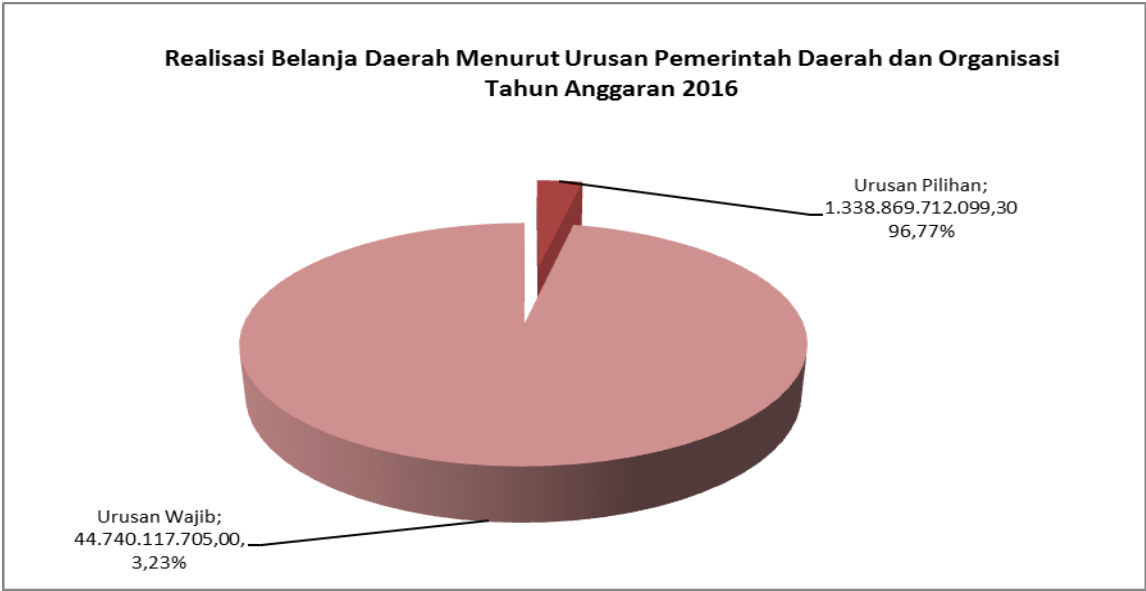
Gambar 2.1.1 di bawah memperlihatkan persentase realisasi Belanja Daerah dalam APBD untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah serta Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan.



Gambar 2.1.1
 Persentase Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016

B. Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.

Alokasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun Anggaran 2016 pada Urusan Wajib sebesar Rp1.554.596.564.075,20 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.338.834.738.875,30 atau sebesar 96,77% dari total realisasi belanja dan Urusan Pilihan sebesar Rp55.055.577.029,00 dengan realisasi belanja untuk Urusan Pilihan sebesar Rp44.740.117.705,00 atau sebesar 3,23% dari total Realisasi Belanja Urusan Pemerintah Daerah. Gambar 2.1.2 dan Tabel 2.1.5 di bawah memperlihatkan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2016.



Gambar 2.1.2
 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016



Pada Tabel 2.1.5 dijelaskan bahwa jumlah anggaran belanja yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Urusan Wajib sebesar Rp1.554.596.564.075,20 dan terealisasi sebesar Rp1.338.834.738.875,30 atau sebesar 86,12%, sehingga kurang dari anggaran Belanja untuk Urusan Wajib sebesar Rp215.761.825.199,90 atau sebesar 13,88%. Belanja urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu digunakan untuk mengurus 25 bidang yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum, (4) Perumahan, (5) Penataan Ruang, (6) Perencanaan Pembangunan, (7) Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Kependudukan dan Catatan Sipil, (10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (12) Sosial, (13) Tenaga Kerja, (14) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (15) Penanaman Modal, (16) Kebudayaan, (17) Pemuda dan Olah Raga, (18) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, (19) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, (20) Ketahanan Pangan, (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (22) Statistik, (23) Kearsipan, (24) Komunikasi dan Informatika, dan (25) Perpustakaan. Belanja terbesar dikeluarkan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian sebesar Rp445.435.030.786,00 atau sebesar 33,27% dari total realisasi Belanja Urusan Wajib dan terkecil dikeluarkan oleh urusan Kearsipan sebesar Rp60.492.000,00 atau sebesar 0,005% dari total realisasi Belanja Urusan Wajib.

Pada Tabel 2.1.5 juga dijelaskan bahwa anggaran belanja Urusan Pilihan Pemerintah Daerah sebesar Rp55.055.577.029,00 dan terealisasi sebesar Rp44.740.117.705,00 atau sebesar 81,26%, sehingga kurang dari anggaran Belanja Urusan Pilihan sebesar Rp10.315.459.324,00 atau sebesar 18,24%. Belanja Urusan Pilihan Pemerintah Daerah digunakan untuk mengurus 8 bidang yaitu: (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Energi dan Sumber Daya Mineral, (4) Pariwisata, (5) Kelautan dan Perikanan, (6) Perdagangan, (7) Industri, dan (8) Ketransmigrasian. Belanja terbesar dikeluarkan oleh urusan Pertanian sebesar Rp9.487.510.369,00 atau sebesar 21,21% dari total realisasi Belanja Urusan Pilihan dan terkecil dikeluarkan oleh Ketransmigrasian sebesar Rp304.223.000,00 atau sebesar 0,68% dari total realisasi Belanja Urusan Pilihan.



Tabel 2.1.5
Alokasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2016

No. Urut	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Kurang/Lebih
1	2	3	4	5	6=4-3
1	Urusan Wajib	1,554,596,564,075.20	1,338,834,738,875.30	86.12	(215,761,825,199.90)
1.01	Pendidikan	378,978,310,839.00	345,494,877,060.00	91.16	(33,483,433,779.00)
1.02	Kesehatan	254,175,468,779.00	196,924,845,459.30	77.48	(57,250,623,319.70)
1.03	Pekerjaan Umum	247,389,573,966.00	213,274,119,261.00	86.21	(34,115,454,705.00)
1.04	Perumahan	2,171,375,600.00	1,286,320,600.00	59.24	(885,055,000.00)
1.05	Penataan Ruang	2,956,085,000.00	1,473,835,000.00	49.86	(1,482,250,000.00)
1.06	Perencanaan Pembangunan	7,714,223,934.00	7,280,138,156.00	94.37	(434,085,778.00)
1.07	Perhubungan	13,524,656,508.00	11,986,138,854.00	88.62	(1,538,517,654.00)
1.08	Lingkungan Hidup	35,550,586,115.00	29,977,079,464.00	84.32	(5,573,506,651.00)
1.09	Pertanahan	431,400,000.00	91,949,600.00	21.31	(339,450,400.00)
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	6,396,067,392.00	5,984,662,065.00	93.57	(411,405,327.00)
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,193,892,637.00	6,905,864,059.00	96.00	(288,028,578.00)
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	346,404,750.00	328,455,000.00	94.82	(17,949,750.00)
1.13	Sosial	17,115,506,642.00	15,711,470,024.00	91.80	(1,404,036,618.00)
1.14	Tenaga Kerja	161,975,000.00	139,965,000.00	86.41	(22,010,000.00)
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	587,053,000.00	343,235,000.00	58.47	(243,818,000.00)
1.16	Penanaman Modal	4,631,820,435.00	3,900,077,697.00	84.20	(731,742,738.00)
1.17	Kebudayaan	5,077,790,932.00	4,843,692,099.00	95.39	(234,098,833.00)
1.18	Pemuda dan Olah Raga	3,199,420,000.00	2,987,913,000.00	93.39	(211,507,000.00)
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12,151,753,137.00	10,972,194,800.00	90.29	(1,179,558,337.00)
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	517,864,403,375.20	445,435,030,786.00	86.01	(72,429,372,589.20)
1.21	Ketahanan Pangan	13,973,865,698.00	12,780,667,826.00	91.46	(1,193,197,872.00)
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,779,458,301.00	13,892,530,590.00	88.04	(1,886,927,711.00)
1.23	Statistik	144,662,500.00	141,765,625.00	98.00	(2,896,875.00)
1.24	Kearsipan	62,692,000.00	60,492,000.00	96.49	(2,200,000.00)
1.25	Komunikasi dan Informatika	4,717,250,000.00	4,593,300,000.00	97.37	(123,950,000.00)
1.26	Perpustakaan	2,300,867,535.00	2,024,119,850.00	87.97	(276,747,685.00)
2	Urusan Pilihan	55,055,577,029.00	44,740,117,705.00	81.26	(10,315,459,324.00)
2.01	Pertanian	11,579,799,461.00	9,487,510,369.00	81.93	(2,092,289,092.00)
2.02	Kehutanan	8,963,013,938.00	8,215,938,472.00	91.66	(747,075,466.00)
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	5,077,787,797.00	4,680,504,443.00	92.18	(397,283,354.00)
2.04	Pariwisata	2,308,210,000.00	2,165,169,500.00	93.80	(143,040,500.00)
2.05	Kelautan dan Perikanan	10,856,372,804.00	6,601,779,472.00	60.81	(4,254,593,332.00)
2.06	Perdagangan	10,237,140,235.00	8,282,500,518.00	80.91	(1,954,639,717.00)
2.07	Perindustrian	5,729,029,794.00	5,002,491,931.00	87.32	(726,537,863.00)
2.08	Transmigrasi	304,223,000.00	304,223,000.00	100.00	0.00
Jumlah Belanja		1,609,652,141,104.20	1,383,574,856,580.30	85.95	(226,077,284,523.90)



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Gambaran realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp 1,464,602,376,843.95	
Jumlah Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp 1,383,574,856,580.30	
Surplus / Defisit Tahun Anggaran 2015 sebesar		Rp 81,027,520,263.65
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp 42,513,194,185.20	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp 22,365,791,525.33	
Jumlah Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2016 sebesar		Rp 20,147,402,659.87
Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar		Rp 101,174,922,923.52

3.1.1 Pendapatan

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada tahun 2016 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 berikut.

Tabel 3.1.1
Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	144,735,686,857.00	116,237,662,906.95	80.31	122,363,159,574.86
2	Pendapatan Transfer	1,303,908,985,727.00	1,310,001,452,948.00	100.47	1,145,612,221,548.00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	143,677,687,203.00	38,363,260,989.00	26.70	48,513,007,849.00
Jumlah		1,592,322,359,787.00	1,464,602,376,843.95	91.98	1,316,488,388,971.86

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp1.592.322.359.787,00 dan terealisasi sebesar Rp1.464.602.376.843,95 atau sebesar 91,98%, sehingga Pendapatan kurang dari anggaran sebesar Rp148.113.987.872,09 atau sebesar 8,02%.

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1.2 berikut:

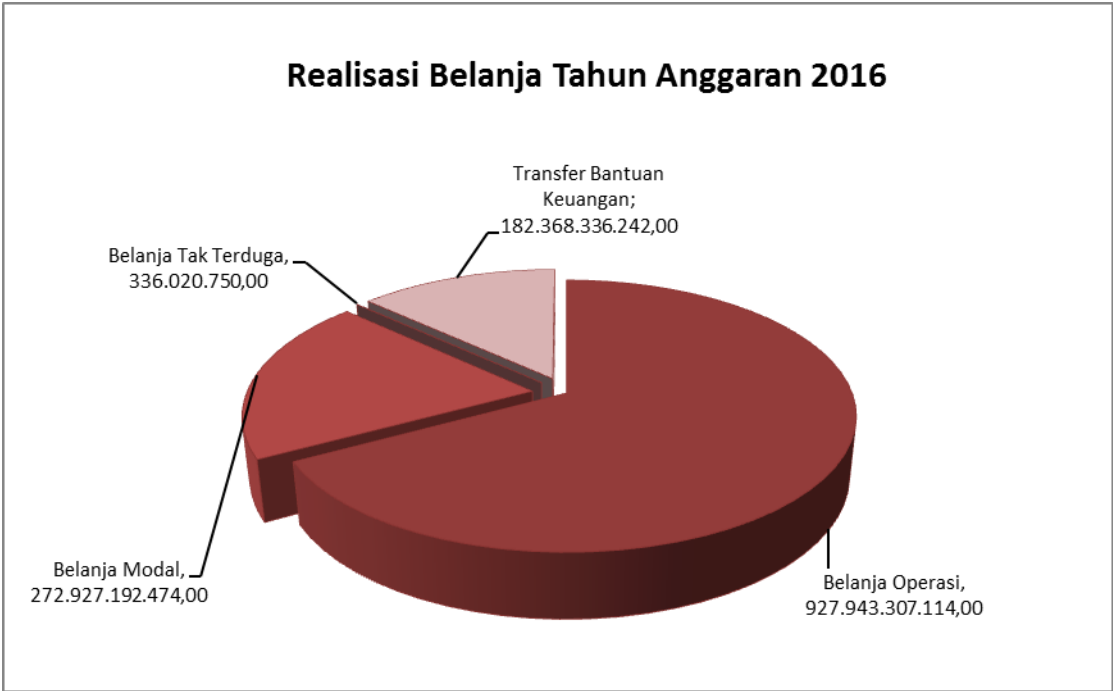
Tabel 3.1.2
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Operasi	1,068,590,547,366.20	927,943,307,114.00	86.84	866,853,295,568.34
2	Belanja Modal	344,333,382,943.00	272,927,192,474.30	79.26	303,453,096,460.27
3	Belanja Tak Terduga	2,000,000,000.00	336,020,750.00	16.80	0.00
4	Transfer Bantuan Keuangan	194,728,210,795.00	182,368,336,242.00	93.65	184,952,218,653.95
Jumlah		1,609,652,141,104.20	1,383,574,856,580.30	85.95	1,355,258,610,682.56

Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp1.609.652.141.104,20 dan terealisasi sebesar Rp1.383.574.856.580,30 atau sebesar



85,95%. Gambar 3.1.1 memperlihatkan Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Per Kelompok Belanja.



Gambar 3.1.1
Perbandingan Belanja Daerah Per Kelompok Belanja
Tahun Anggaran 2016

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp1.068.590.547.366,20 dan terealisasi sebesar Rp927.943.307.114,00 atau sebesar 86,84%, sehingga kurang dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp140.647.240.252,20 atau sebesar 13,16%. Tabel 3.1.3 di bawah menjelaskan komponen dari Belanja Operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 3.1.3
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	495,005,178,005.20	454,650,746,610.00	91.85	405,900,890,457.34
2	Belanja Barang	540,973,489,361.00	444,549,037,368.00	82.18	386,265,426,492.00
3	Belanja Hibah	30,446,880,000.00	28,198,723,136.00	92.62	73,317,478,619.00
4	Belanja Bantuan Sosial	2,165,000,000.00	544,800,000.00	25.16	1,369,500,000.00
Jumlah		1,068,590,547,366.20	927,943,307,114.00	86.84	866,853,295,568.34

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp344.333.382.943,00 dan terealisasi sebesar Rp272.927.192.474,30 atau sebesar 79,26%, sehingga kurang dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp71.406.190.468.70 atau sebesar 20,74%. Tabel 3.1.4 di bawah menjelaskan komponen dari Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu



Tabel 3.1.4
Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Tanah	34,517,700,000.00	22,140,593,600.00	64.14	8,430,079,187.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,781,656,816.00	35,973,808,456.30	72.26	42,811,670,997.55
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,559,435,996.00	26,064,823,147.00	71.29	51,268,572,991.00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	210,476,290,881.00	181,344,969,521.00	86.16	186,749,598,359.72
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,998,299,250.00	7,402,997,750.00	56.95	14,193,174,925.00
Jumlah		344,333,382,943.00	272,927,192,474.30	79.26	303,453,096,460.27

c. **Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp336.020.750,00 atau sebesar 16,80%, sehingga kurang dari anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.663.979.250,00 atau sebesar 83,20%.

d. **Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp194.728.210.795,00,00 dan terealisasi sebesar Rp182.368.336.242,00 atau sebesar 93,65%, sehingga kurang dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp12.359.874.5530,00 atau sebesar 6,35%. Tabel 3.1.5 di bawah menunjukkan komponen dari Transfer Bantuan Keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 3.1.5
Transfer Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	194,028,210,795.00	181,668,402,842.00	93.63	184,379,787,793.95
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	700,000,000.00	699,933,400.00	99.99	572,430,860.00
Jumlah		194,728,210,795.00	182,368,336,242.00	93.65	184,952,218,653.95

3.1.3 **Pembiayaan**

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutupi defisit anggaran, dari target penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.513.194.185,20 dapat direalisasikan sebesar Rp42.513.194.185,20. Realisasi penerimaan ini berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp42.513.194.185,20.

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp22.365.791.525,33 (88,81%) dari alokasi anggaran sebesar Rp25.183.412.868,00, sehingga realisasi pembiayaan netto sebesar Rp20.147.402.659,82 atau sebesar (116,26%) dari anggaran sebesar Rp17.329.781.317,20. Adapun jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.101.052.563.781,52.

3.2 **Hambatan dan Pendukung Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target atau sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pemerintah diantaranya:

1. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia.



2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan daerah.
3. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD telah berjalan. Hal ini karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, diantaranya:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas.
3. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
4. Adanya peningkatan pelayanan dari aparat pemerintah daerah dalam membangun fasilitas umum untuk masyarakat sehingga masyarakat mau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
5. Tersedianya media bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi melalui pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.





BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Berkenaan dengan berlakunya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2014, dimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2015.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah SKPD yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan BUD.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk pengakuan akun - akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas menggunakan basis kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan metode pendekatan Laporan Realisasi Anggaran ke Laporan Operasional, sehingga perlu membandingkan antara kedua laporan tersebut.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Pengakuan dan Pengukuran atas Laporan Realisasi Anggaran.

1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di bendahara penerimaan SKPD maupun yang diterima langsung di rekening kas umum daerah. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang



asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Belanja diakui pada saat dilakukan pembayaran. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pengeluaran sebelum potongan- potongan.

Realisasi belanja yang pembayarannya dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran SKPD dikonversikan ke Beban pada Laporan Operasional sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Daftar Konversi Belanja Pada Beban

Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Pendekatan Pada Beban
5.1.2. 01	Belanja Bahan Pakai Habis	Beban Persediaan
5.1.2. 02	Belanja Bahan/Material	Beban Persediaan
5.1.2. 03	Belanja Jasa Kantor	Beban Jasa
5.1.2. 04	Belanja Premi Asuransi	Beban Jasa
5.1.2. 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Beban Pemeliharaan
5.1.2. 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	Beban Jasa
5.1.2. 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Beban Jasa
5.1.2. 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Beban Jasa
5.1.2. 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Beban Jasa
5.1.2. 11	Belanja Makanan dan Minuman	Beban Jasa
5.1.2. 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Beban Persediaan
5.1.2. 13	Belanja Pakaian Kerja	Beban Persediaan
5.1.2. 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	Beban Persediaan
5.1.2. 15	Belanja Perjalanan Dinas	Beban Perjalanan Dinas
5.1.2. 18	Belanja Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan
5.1.2. 19	Belanja Jasa Konsultansi	Beban Jasa
5.1.2. 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Beban Hibah
5.1.2. 22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Beban Jasa
5.1.2. 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Beban Jasa
5.1.2. 24	Belanja Honorarium Non Pegawai	Beban Jasa
5.1.2. 25	Belanja Honorarium PNS	Beban Jasa
5.1.2. 26	Belanja Honorarium Non PNS	Beban Jasa
5.1.2. 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Beban Hibah
5.1.2. 32	Belanja Barang*)	Beban Persediaan
5.1.2. 33	Belanja Jasa*)	Beban Jasa

3. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.



4.5 Pengakuan dan Pengukuran atas Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan-LO.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pengakuan dan Pengukuran Beban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah.
- Beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

3. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam Bentuk Barang/Jasa.

Transaksi Pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dan Beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Dikarenakan banyak ketidakpastian yang ada di sekitar jasa, termasuk kemampuan untuk menjalankan pengendalian atas jasa tersebut dan mengukur nilai wajar atas jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak mengharuskan pengakuan dalam bentuk jasa. Namun demikian, informasi mengenai pendapatan dalam bentuk jasa disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6 Penyajian Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dengan metode langsung, dimana mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran bruto.

4.7 Pengakuan dan Pengukuran atas Pos-pos Neraca.

1. Kas



Kas berupa mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal pelaporan.

2. Piutang

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang belum dilunasi.

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada aset lancar. Untuk piutang yang tertunggak dilakukan penyisihan sesuai umur piutang. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada aset lain-lain.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- Di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 20%
- Di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 40%
- Di atas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 60%
- Di atas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 80%
- Di atas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tetap tercatat secara *extra comptable*.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dapat meliputi:

- Barang pakai habis seperti alat tulis kantor;
- Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa;

Persediaan diakui pada saat:

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dengan kondisi rusak berat, usang, kadaluwarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, kecuali obat-obatan, bahan farmasi dan sejenisnya atau persediaan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dicatat secara perpetual. Persediaan yang dicatat secara periodik atau inventarisasi fisik pada akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Persediaan yang dicatat secara perpetual menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- Harga perolehan apabila diperoleh dengan pengadaan.
- Harga produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



4. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi digolongkan sebagai berikut:

- a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang.
- b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu:
 - Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 - Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan 3 metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait. Investasi yang kepemilikannya kurang dari 20% atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi atau tidak dapat mengendalikan jalannya perusahaan, dicatat dengan menggunakan metode biaya atau harga perolehan.

b. Metode Ekuitas

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah sebesar laba atau dikurangi sebesar rugi setelah tanggal perolehan. Investasi yang kepemilikannya lebih dari 20% sampai 50%, mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, menggunakan metode ekuitas.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengakuan hasil investasi:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividen), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan



dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
- b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Batas kapitalisasi dalam aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan untuk tanah dikapitalisasikan dengan nilai di atas Rp1 (satu) rupiah;
- b. Perolehan untuk Peralatan dan mesin dikapitalisasikan dengan nilai di atas Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- c. Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai di atas Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- d. Perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai di atasRp1 (satu) rupiah;
- e. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa Buku dengan nilai di atas Rp100.000 (SeratusRibu Rupiah);
- f. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan dan kesenian dengan nilai di atas Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa Tanaman dengan nilai di atas Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- h. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa hewan ternak dengan nilai di atas Rp1 (satu Rupiah).

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

Penyusutan per Periode =

Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat

Masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.2
Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
2				GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	



Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
2	2			ALAT- ALAT BESAR	
2	2	1		Alat - Alat Besar Darat	10
2	2	2		Alat- Alat Besar Apung	8
2	2	3		Alat- Alat Bantu	7
2	3			ALAT- ALAT ANGKUTAN	
2	3	1		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2	3	2		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
2	3	3		Alat Angkut Apung Bermotor	10
2	3	4		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
2	3	5		Alat Angkut Bermotor Udara	20
2	4			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	4	1		Alat Bengkel Bermesin	10
2	4	2		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
2	4	3		Alat Ukur	5
2	5			ALAT PERTANIAN	
2	5	1		Alat Pengolahan	4
2	5	2		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4
2	6			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	6	1		Alat Kantor	5
2	6	2		Alat Rumah Tangga	5
2	6	3		Komputer	5
2	6	4		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
2	7			ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
2	7	1		Alat Studio	5
2	7	2		Alat Komunikasi	5
2	7	3		Peralatan Pemancar	5
2	8			ALAT- ALAT KEDOKTERAN	
2	8	1		Alat Kedokteran	5
2	8	2		Alat Kesehatan	5
2	9			ALAT LABORATORIUM	
2	9	1		Unit Unit Laboratorium	8
2	9	2		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
2	9	3		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
2	9	4		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
2	9	5		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
2	9	6		Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	10
2	9	7		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
2	9	8		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
2	10			ALAT- ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	
2	10	1		Senjata Api	10
2	10	2		Persenjataan Non Senjata Api	3
2	10	3		Amunisi	5
2	10	4		Senjata Sinar	4
2	10	5		Alat Keamanan Batas	5
3				GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	11			BANGUNAN GEDUNG	
3	11	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
3	11	1	1	Bangunan Gedung Kantor	20
3	11	1	2	Bangunan Gudang	20
3	11	1	3	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	20
3	11	1	4	Bangunan Gedung Instalasi	20
3	11	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium	20
3	11	1	6	Bangunan Kesehatan	20
3	11	1	7	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	20
3	11	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	30
3	11	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20
3	11	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20
3	11	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	20
3	11	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	20
3	11	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	20
3	11	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	20



Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
3	11	1	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	20
3	11	1	16	Bangunan Gedung Pabrik	20
3	11	1	17	Bangunan Stasiun Bus	20
3	11	1	18	Bangunan Kandang Hewan/Temak	20
3	11	1	19	Bangunan Gedung Perpustakaan	20
3	11	1	20	Bangunan Gedung Museum	20
3	11	1	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	20
3	11	1	22	Bangunan Pengujian Kelaikan	20
3	11	1	23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	20
3	11	1	24	Bangunan Rumah Tahanan	20
3	11	1	25	Bangunan Gedung Kramatorium	20
3	11	1	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	20
3	11	1	27	Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya	20
3	11	1	28	Bangunan Pagar	20
3	11	1	29	Bangunan Lainnya	20
3	11	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
3	11	2	1	Rumah Negara Golongan I	20
3	11	2	2	Rumah Negara Golongan Ii	15
3	11	2	3	Rumah Negara Golongan Iii	15
3	11	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	30
3	11	2	5	Asrama	30
3	11	2	6	Hotel	30
3	11	2	7	Motel	30
3	11	2	8	Flat/Rumah Susun	30
3	11	3		Bangunan Menara	
3	11	3	1	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	30
3	11	3	2	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	30
3	11	3	3	Bangunan Menara Telekomunikasi	20
3	12			MONUMEN	
3	12	1		Bangunan Bersejarah	
3	12	1	1	Istana Peringatan	20
3	12	1	2	Rumah Adat	30
3	12	1	3	Rumah Peninggalan Sejarah	30
3	12	1	4	Makam Bersejarah	40
3	12	1	5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	30
3	12	2		Tugu Peringatan	
3	12	2	1	Tugu Kemerdekaan	30
3	12	2	2	Tugu Pembangunan	30
3	12	2	3	Tugu Peringatan Lainnya	30
3	12	3		Candi	
3	12	3	1	Candi Hindu	50
3	12	3	2	Candi Bhuda	50
3	12	3	3	Candi Lainnya	50
3	12	4		Monumen/Banunan Bersejarah	
3	12	4	1	Bangunan Bersejarah Lainnya	30
3	12	5		Tugu Peringatan	
3	12	5	1	Tugu Peringatan	30
3	12	6		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
3	12	6	1	Tugu/Tanda Batas	20
3	12	7		Rambu- Rambu	
3	12	7	1	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	7
3	12	7	2	Rambu Tidak Bersuar	7
3	12	8		Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara	
3	12	8	1	Rumwey/Threshold Light	5
3	12	8	2	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5
3	12	8	3	Approachlight	5
3	12	8	4	Rumwey Identification Light (Rells)	5
3	12	8	5	Signal	5
3	12	8	6	Flood Light	5
4				GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
4	13			JALAN DAN JEMBATAN	



Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
4	13	1		Jalan	
4	13	1	1	Jalan Negara/Nasional	10
4	13	1	2	Jalan Provinsi	10
4	13	1	3	Jalan Kabupaten/Kota	10
4	13	1	4	Jalan Desa	10
4	13	1	5	Jalan Khusus	10
4	13	1	6	Jalan Tol	10
4	13	1	7	Jalan Kereta	10
4	13	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
4	13	2		Jembatan	
4	13	2	1	Jembatan Negara/Nasional	30
4	13	2	2	Jembatan Provinsi	30
4	13	2	3	Jembatan Kabupaten/Kota	30
4	13	2	4	Jembatan Desa	20
4	13	2	5	Jembatan Khusus	15
4	13	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol	50
4	13	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
4	13	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
4	13	2	9	Jembatan Penyebrangan	30
4	14			BANGUNAN AIR/IRIGASI	
4	14	1		Bangunan Air Irigasi	
4	14	1	1	Bangunan Waduk	30
4	14	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi	30
4	14	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi	30
4	14	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi	30
4	14	1	5	Bangunan Pengamanan Irigasi	30
4	14	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi	30
4	14	2		Bangunan Air Pasang Surut	
4	14	2	1	Bangunan Waduk	30
4	14	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	30
4	14	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	30
4	14	2	4	Bangunan Pembuang Pasang Surut	30
4	14	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	30
4	14	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	30
4	14	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut	30
4	14	3		Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Poder	
4	14	3	1	Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Poder	25
4	14	3	2	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	25
4	14	3	3	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	25
4	14	3	4	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	25
4	14	3	5	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	25
4	14	3	6	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	25
4	14	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	20
4	14	4		Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	
4	14	4	1	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
4	14	4	2	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
4	14	4	3	Bangunan Pembuang Pengaman	10
4	14	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
4	14	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
4	14	4	6	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
4	14	5		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tnh	
4	14	5	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
4	14	5	2	Bangunan Pengambiln Pengembangan Sumber Air	30
4	14	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
4	14	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
4	14	5	5	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	30
4	14	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
4	14	6		Bangunan Air Bersih/Baku	
4	14	6	1	Waduk Airbersih/Airbaku	30
4	14	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	30
4	14	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih	30



Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
4	14	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	30
4	14	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	30
4	14	7		Bangunan Air Kotor	
4	14	7	1	Bangunan Air Kotor	30
4	14	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor	30
4	14	7	3	Bangunan Pembuangan Air Kotor	30
4	14	7	4	Bangunan Pengaman Air Kotor	30
4	14	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	30
4	14	8		Bangunan Air	
4	14	8	1	Bangunan Air Laut	30
4	14	8	2	Bangunan Air Tawar	30
4	15			INSTALASI	
4	15	1		Instalasi Air Minum/Bersih	
4	15	1	1	Air Muka Tanah	20
4	15	1	2	Air Sumber/Mata Air	20
4	15	1	3	Air Tanah Dalam	20
4	15	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal	20
4	15	1	5	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20
4	15	2		Instalasi Air Kotor	
4	15	2	1	Instalasi Air Kotor	20
4	15	2	2	Instalasi Air Buangan Industri	20
4	15	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian	20
4	15	3		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
4	15	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
4	15	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
4	15	4		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
4	15	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4	15	5		Instalasi Pembangkit Listrik	
4	15	5	1	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	30
4	15	5	2	Pembangkit Listrik Tanaga Diesel (PLTD)	30
4	15	5	3	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	30
4	15	5	4	Pembangkit Listrik Tanaga Angin (PLT An)	30
4	15	5	5	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	30
4	15	5	6	Pembangkit Litrik Tenaga Nuklir (PLTN)	30
4	15	5	7	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	30
4	15	5	8	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	30
4	15	5	9	Instalansi Pembangkit Litrik Tenaga Surya (PLTS)	30
4	15	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	30
4	15	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSM)	30
4	15	6		Instalasi Gardu Listrik	
4	15	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk	25
4	15	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	25
4	15	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	30
4	15	6	4	Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	30
4	15	7		Instalasi Pertahanan	
4	15	7	1	Instalasi Pertahanan Didarat	30
4	15	8		Instalasi Gas	
4	15	8	1	Instalasi Gardu Gas	30
4	15	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
4	15	8	3	Instalasi Oksigen	30
4	15	9		Instalasi Pengaman	
4	15	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
4	16			JARINGAN	
4	16	1		Jaringan Air Minum	
4	16	1	1	Jaringan Air Minum	30
4	16	1	2	Jaringan Induk Distribusi	30
4	16	1	3	Jaringan Cabang Distribusi	30
4	16	1	4	Jaringan Sambungan Kerumah	30
4	16	2		Jaringan Listrik	
4	16	2	1	Jaringan Tranmisi	20
4	16	2	2	Jaringan Distribusi	20



Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
4	16	3		Jaringan Telepon	
4	16	3	1	Jaringan Telapon Di atas Tanah	15
4	16	3	2	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	15
4	16	3	3	Jaringan Telepon Didalam Air	15
4	16	4		Jaringan Gas	
4	16	4	1	Jaringan Pipa Gas Tranmisi	30
4	16	4	2	Jaringan Pipa Distribusi	30
4	16	4	3	Jaringan Pipa Dinas	30
4	16	4	4	Jaringan Bbm	30
5				GOLONGAN ASET TETAP LAINYA	
5	20			ASET RENOVASI	
5	20	4		Aset Renovasi	
5	20	4	1	Aset Renovasi Gedung Dan Bangunan	20
5	20	4	2	Aset Renovasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan	10

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan perolehan. Dengan pendekatan bulan perolehan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Akan tetapi untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun 2013 dan sebelumnya, perolehan aset tetap dicatat pada tanggal 31 Desember. Hal tersebut terjadi karena pada tahun tersebut, aset tetap telah terlanjur dicatat tahun perolehannya.

Misalnya, jika suatu aset diperoleh tanggal bulan Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 3 bulan yaitu dari tanggal bulan Oktober ke bulan Desember 20x1. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang diperoleh tetap tiga bulan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa mendatang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai:

- a. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- b. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban lainnya selain yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (non- exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government- related events); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (government- acknowledged events).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, dimana:

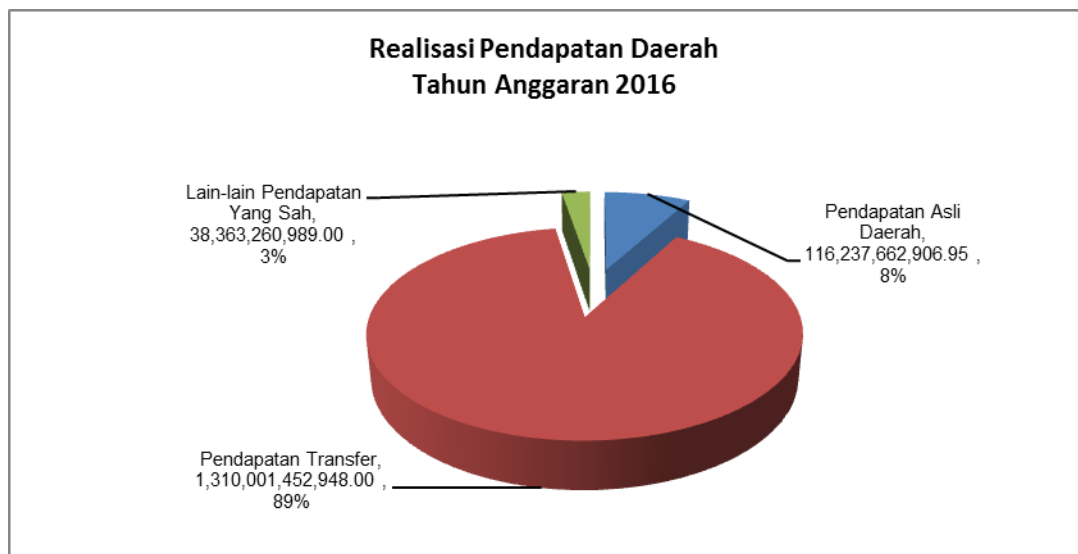
1. Pos pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran;
2. Pos akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun sebelumnya terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Pos aset, kewajiban, dan ekuitas terdapat dalam Neraca;
4. Pos pendapatan dan beban dari kegiatan operasional dan non operasional terdapat dalam Laporan Operasional;
5. Pos aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas terdapat dalam Laporan Arus Kas;
6. Pos perubahan ekuitas terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1. KOMPONEN - KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1. Pendapatan	1.592.322.359.787,00	1.464.602.376.843,95	1.316.488.388.971,86

Realisasi Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.464.602.376.843,95. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp148.113.987.872,09 atau sebesar 11,25%. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 3 (tiga) kelompok seperti terlihat pada gambar 5.1.1.



Gambar 5.1.1
Diagram Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016

Pada Gambar 5.1.1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat dalam hal Pendanaan. Dapat terlihat pada Pendapatan Transfer yang mencapai 89% dari total Pendapatan Daerah.

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain- lain Pendapatan yang Sah dijelaskan sebagai berikut:



	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	144.735.686.857,00	116.237.662.906,95	122.363.159.574,86

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu dalam Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp116.237.662.906,95. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.125.496.667,91 atau sebesar 5,01%. Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1.1 berikut:

Tabel 5.1.1
Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	Realisasi 2015 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	38,295,774,821.00	29,308,277,135.00	25.21%	28,486,440,209.60
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9,390,207,387.00	7,772,789,470.00	6.69%	7,925,165,220.00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3,991,705,933.00	3,991,705,932.38	3.43%	2,793,388,918.00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	93,057,998,716.00	75,164,890,369.57	64.66%	83,158,165,227.26
Jumlah		144,735,686,857.00	116,237,662,906.95	100.00%	122,363,159,574.86

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	38.295.774.821,00	29.308.277.135,00	28.486.440.209,60

Pendapatan Pajak Daerah adalah pajak daerah yang telah dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp29.308.277.135,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015, Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp821.836.925,40 atau sebesar 2,89%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah terlihat pada Tabel 5.1.2 berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016

Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
Pajak Hotel	1,092,459,660.00	1,102,527,608.00	3.76%	100.92%	1,282,174,793.00
Hotel-LRA	1,028,595,660.00	1,043,773,108.00	3.56%	101.48%	1,215,975,193.00
Losmen-LRA	63,864,000.00	58,754,500.00	0.20%	92.00%	66,199,600.00
Pajak Restoran	3,130,854,600.00	3,067,017,999.00	10.46%	97.96%	3,859,657,902.00
Restoran – LRA	744,150,000.00	797,076,005.00	2.72%	107.11%	995,575,479.00
Rumah Makan – LRA	233,475,000.00	279,817,368.00	0.95%	119.85%	284,041,215.00
Kafetaria – LRA	23,100,000.00	16,364,300.00	0.06%	70.84%	13,559,800.00
Warung – LRA	49,830,000.00	69,037,300.00	0.24%	138.55%	23,226,200.00
Jasa Boga/ Katering – LRA	2,080,299,600.00	1,904,723,026.00	6.50%	91.56%	2,543,255,208.00
Pajak Hiburan	590,235,000.00	619,049,091.00	2.11%	104.88%	644,399,430.60
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	3,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA	542,272,500.00	563,315,991.00	1.92%	103.88%	592,057,480.60
Permainan Biliar, Golf, Bowling - LRA	5,500,000.00	8,583,800.00	0.03%	156.07%	2,140,000.00
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan – LRA	19,250,000.00	29,407,800.00	0.10%	152.77%	41,696,950.00
Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) – LRA	20,212,500.00	17,741,500.00	0.06%	87.77%	8,505,000.00
Pajak Reklame	532,476,000.00	540,690,611.00	1.84%	101.54%	465,130,765.00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	507,476,000.00	514,984,995.00	1.76%	101.48%	458,999,640.00
Reklame Kain	25,000,000.00	25,705,616.00	0.09%	102.82%	6,131,125.00



Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	11,100,000,000.00	11,552,764,359.00	39.42%	104.08%	11,145,489,084.00
Pajak Penerangan Jalan Umum - LRA	11,100,000,000.00	11,552,764,359.00	39.42%	104.08%	11,145,489,084.00
Pajak Air Tanah	13,003,200.00	10,883,480.00	0.04%	83.70%	9,921,505.00
Pajak Air Tanah – LRA	13,003,200.00	10,883,480.00	0.04%	83.70%	9,921,505.00
Pajak Sarang Burung Walet	75,000,000.00	77,606,000.00	0.26%	103.47%	109,240,000.00
Pajak Sarang Burung Walet – LRA	75,000,000.00	77,606,000.00	0.26%	103.47%	109,240,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	880,000,000.00	1,076,610,963.00	3.67%	122.34%	1,524,016,425.00
Pasir dan kerikil – LRA	240,000,000.00	197,058,470.00	0.67%	82.11%	118,890,411.00
Tanah Liat – LRA	240,000,000.00	219,575,563.00	0.75%	91.49%	423,261,738.00
Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	400,000,000.00	659,976,930.00	2.25%	164.99%	981,864,276.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5,500,000,000.00	4,615,335,024.00	15.75%	83.92%	3,867,932,242.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5,500,000,000.00	4,615,335,024.00	15.75%	83.92%	3,867,932,242.00
Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15,381,746,361.00	6,645,792,000.00	22.68%	43.21%	5,578,478,063.00
BPHTB - Pemindahan Hak – LRA	3,500,000,000.00	5,100,347,880.00	17.40%	145.72%	2,818,989,650.00
BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	11,881,746,361.00	1,545,444,120.00	5.27%	13.01%	2,759,488,413.00
JUMLAH	38,295,774,821.00	29,308,277,135.00	100.00%	76.53%	28,486,440,209.60

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	9.390.207.387,00	7.772.789.470,00	7.925.165.220,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos yang menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan dipungut melalui SKPD, sebagaimana tampak pada Tabel 5.1.3 berikut:

Tabel 5.1.3
Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

SKPD / Retribusi	Anggaran 2016	Realisasi 2016	% dari Anggaran	% dari Jumlah	Realisasi 2015
Dinas Kesehatan	1.163.505.000,00	982.606.500,00	84,45%	12,64%	808.345.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.163.505.000,00	982.606.500,00	84,45%	12,64%	808.345.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00%	334.050.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	334.050.000,00
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	1.598.513.500,00	1.425.707.570,00	89,19%	18,34%	1.583.152.872,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	495.160.000,00	527.680.000,00	106,57%	6,79%	449.020.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.103.353.500,00	898.027.570,00	81,39%	11,55%	1.134.132.872,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.221.418.500,00	565.611.503,00	46,31%	7,28%	646.532.411,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LRA	75.000.000,00	73.050.000,00	97,40%	0,94%	56.800.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -LRA	305.932.500,00	233.562.850,00	76,34%	3,00%	309.446.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi -LRA	700.375.000,00	108.535.303,00	15,50%	1,40%	116.804.861,00
Retribusi Terminal – LRA	36.000.000,00	24.136.000,00	67,04%	0,31%	29.975.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	79.061.000,00	116.423.750,00	147,26%	1,50%	119.806.750,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	25.050.000,00	9.903.600,00	39,54%	0,13%	13.699.800,00
Badan Lingkungan Hidup Daerah	3.750.787.887,00	3.235.594.892,00	86,26%	41,63%	3.257.743.706,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.500.783.000,00	1.523.548.700,00	101,52%	19,60%	1.339.797.700,00
Retribusi Izin Gangguan – LRA	2.250.004.887,00	1.712.046.192,00	76,09%	22,03%	1.917.946.006,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	300.000.000,00	291.966.000,00	97,32%	3,76%	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	300.000.000,00	291.966.000,00	97,32%	3,76%	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	367.550.000,00	354.010.000,00	96,32%	4,55%	38.100.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	367.550.000,00	354.010.000,00	96,32%	4,55%	38.100.000,00
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	3.575.000,00	2.030.000,00	56,78%	0,03%	0,00



SKPD / Retribusi	Anggaran 2016	Realisasi 2016	% dari Anggaran	% dari Jumlah	Realisasi 2015
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	3.575.000,00	2.030.000,00	56,78%	0,03%	0,00
Dinas Pertambangan dan Energi	242.000.000,00	145.200.000,00	60,00%	1,87%	600.205.429,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	242.000.000,00	145.200.000,00	60,00%	1,87%	600.205.429,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00%	0,02%	4.285.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan - LRA	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00%	0,02%	4.285.000,00
Dinas Pasar	740.857.500,00	768.763.005,00	103,77%	9,89%	652.750.802,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	104.760.000,00	84.250.000,00	80,42%	1,08%	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum - LRA	52.200.000,00	74.650.000,00	143,01%	0,96%	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar -LRA	583.897.500,00	609.863.005,00	104,45%	7,85%	652.750.802,00
Jumlah	9.390.207.387,00	7.772.789.470,00	82,78%	100,00%	7.925.165.220,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.772.789.470,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp152.375.750,00 atau sebesar 1,92%. Pendapatan Retribusi Daerah terbesar diperoleh dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.839.397.658,00 dan terendah diperoleh dari Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.312.114.450,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.4 berikut:

Tabel 5.1.4
Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
Retribusi Jasa Umum – LRA	3,722,830,000.00	2,839,397,658.00	36.53%	76.27%	2,993,372,092.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	1,163,505,000.00	982,606,500.00	12.64%	84.45%	808,345,000.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	599,920,000.00	611,930,000.00	7.87%	102.00%	449,020,000.00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LRA	127,200,000.00	147,700,000.00	1.90%	116.12%	103,000,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	583,897,500.00	609,863,005.00	7.85%	104.45%	606,550,802.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	305,932,500.00	233,562,850.00	3.00%	76.34%	309,446,000.00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	242,000,000.00	145,200,000.00	1.87%	60.00%	600,205,429.00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	700,375,000.00	108,535,303.00	1.40%	15.50%	116,804,861.00
Retribusi Jasa Usaha – LRA	2,286,969,000.00	2,312,114,450.00	29.75%	101.10%	1,861,729,450.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1,868,333,000.00	1,877,558,700.00	24.16%	100.49%	1,711,947,700.00
Retribusi Terminal – LRA	36,000,000.00	24,136,000.00	0.31%	67.04%	29,975,000.00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	3,575,000.00	2,030,000.00	0.03%	56.78%	0.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA	79,061,000.00	116,423,750.00	1.50%	147.26%	119,806,750.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	300,000,000.00	291,966,000.00	3.76%	97.32%	0.00
Retribusi Perizinan Tertentu – LRA	3,380,408,387.00	2,621,277,362.00	33.72%	77.54%	3,070,063,678.00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	1,103,353,500.00	898,027,570.00	11.55%	81.39%	1,134,132,872.00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian - LRA	2,250,004,887.00	1,712,046,192.00	22.03%	76.09%	1,917,946,006.00
Retribusi Izin Trayek – LRA	25,050,000.00	9,903,600.00	0.13%	39.54%	13,699,800.00
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	2,000,000.00	1,300,000.00	0.02%	65.00%	4,285,000.00
JUMLAH	9,390,207,387.00	7,772,789,470.00	100.00%	82.78%	7,925,165,220.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.991.705.933,00	3.991.705.932,38	2.793.388.918,00

Untuk Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp3.991.705.933,00 dan terealisasi sebesar Rp3.991.705.932,38, yang merupakan bagian laba dari Bank Kalsel dan bagian laba dari Perusda Batulicin Jaya Utama.



Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp1.198.317.014,38 atau sebesar 42,90%. Untuk Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 5.1.5.

Tabel 5.1.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA						
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA	1,507,431,852.00	1,507,431,851.38	37.76%	100.00%	0.00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD– LRA	2,484,274,081.00	2,484,274,081.00	62.24%	100.00%	2,793,388,918.00
Jumlah		3,991,705,933.00	3,991,705,932.38	100.00%	100.00%	2,793,388,918.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.1.4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.057.998.716,00	75.164.890.369,57	83.158.165.227,26

Pos Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, maupun Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pencapaian target Lain- lain PAD yang Sah dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp75.164.890.369,57. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 maka Lain- lain PAD yang Sah Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp7.993.274.857,69 atau sebesar 9,61%. Untuk Tahun Anggaran 2016 Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 5.1.6.

Tabel 5.1.6
Realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	161,125,000.00	4,743,000.00	0.01%	2.94%	33,726,550.00
Jasa Giro Kas Daerah - LRA	4,500,000,000.00	6,151,145,618.66	8.18%	136.69%	5,939,784,343.99
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	800,000,000.00	2,153,512,679.00	2.87%	269.19%	820,626,333.65
Pendapatan Denda Pajak - LRA	232,100,000.00	304,316,919.74	0.40%	131.11%	231,831,877.16
Pendapatan BLUD - LRA	64,364,773,716.00	51,339,038,843.80	68.30%	79.76%	47,431,915,352.50
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	14,000,000,000.00	7,105,103,866.37	9.45%	50.75%	24,105,800,308.96
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	9,000,000,000.00	8,050,179,000.00	10.71%	89.45%	4,594,480,461.00
Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOP/BOMM	0.00	56,850,442.00	0.08%	0.00%	0.00
Jumlah	93,057,998,716.00	75,164,890,369.57	100.00%	80.77%	83,158,165,227.26

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	1.303.908.985.727,00	1.310.001.452.948,00	1.145.612.221.548,00

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, serta transfer dari Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp164.389.231.400,000 atau sebesar 14,35% dari realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2015. Gambar 5.1.2 berikut menjelaskan perbandingan dari komponen realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2016.



Gambar 5.1.2
Diagram Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2016

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.063.647.651.424,00	1.085.582.320.834,00	954.528.068.731,00

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.085.582.320.834,00. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp131.054.252.103,00 atau sebesar 13,73% dari realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2015. Kenaikan pendapatan transfer Dana Perimbangan tersebut dikarenakan adanya beberapa penerimaan yang kurang bayar dari tahun sebelumnya, yaitu:

1. Kurang bayar Bagi Hasil Pajak PBB tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp8.710.084.305,00;
2. Kurang bayar Bagi Hasil dari provisi Sumber Daya Hutan tahun 2014 sebesar Rp170.208.000,00;
3. Kurang bayar Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) tahun 2014 sebesar Rp52.466.673.199,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 tampak pada Tabel 5.1.7.

Tabel 5.1.7
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	46,043,837,100.00	84,973,743,533.00	7.83%	184.55%	22,480,595,100.00
	PBB – LRA	31,264,355,700.00	72,189,618,235.00	6.65%	230.90%	15,356,601,500.00
	Bagi Hasil PPh Ps.21 dan Ps.25 – LRA	14,779,481,400.00	12,784,125,298.00	1.18%	86.50%	7,123,993,600.00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	415,898,163,324.00	416,573,464,336.00	38.37%	100.16%	437,385,426,631.00
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	423,700,489.00	561,129,900.00	0.05%	132.44%	839,446,650.00
	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi – LRA	292,461,300.00	95,869,500.00	0.01%	32.78%	1,418,698,506.00
	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LRA	6,336,569,248.00	5,440,686,648.00	0.50%	85.86%	10,055,907,298.00
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA	407,606,148,650.00	409,688,635,699.00	37.74%	100.51%	423,665,279,314.00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	942,162,839.00	452,025,539.00	0.04%	47.98%	703,264,033.00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	297,120,798.00	335,117,050.00	0.03%	112.79%	503,954,500.00
	Bagi Hasil Lumpsum Payment*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	198,876,330.00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	465,897,113,000.00	465,897,113,000.00	42.92%	100.00%	445,258,297,000.00



No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	135,808,538,000.00	118,137,999,965.00	10.88%	86.99%	49,403,750,000.00
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	79,814,359,000.00	79,814,358,965.00	7.35%	100.00%	16,298,020,000.00
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LRA	18,174,697,000.00	9,993,200,327.00	0.92%	54.98%	5,410,870,000.00
	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LRA	142,360,000.00	78,298,275.00	0.01%	55.00%	0.00
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	116,470,000.00	64,058,725.00	0.01%	55.00%	2,909,320,000.00
	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	14,896,000.00	69,468,000.00	0.01%	466.35%	0.00
	DAK Bidang Kehutanan – LRA	275,510,000.00	151,530,500.00	0.01%	55.00%	0.00
	DAK Bidang Kesehatan – LRA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	9,987,500,000.00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	365,210,000.00	200,866,000.00	0.02%	55.00%	4,714,480,000.00
	DAK Bidang Perdagangan – LRA	0.00	134,580,000.00	0.01%	0.00%	1,950,700,000.00
	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LRA	239,110,000.00	131,510,500.00	0.01%	55.00%	1,922,950,000.00
	DAK Bidang Pertanian – LRA	807,246,000.00	446,867,673.00	0.04%	55.36%	0.00
	DAK Bidang Pendidikan – LRA	1,101,740,000.00	605,957,000.00	0.06%	55.00%	6,209,910,000.00
	DAK Bidang Perhubungan	67,850,000.00	67,850,000.00	0.01%	100.00%	0.00
	DAK Bidang IPD	29,446,920,000.00	23,557,536,000.00	2.17%	80.00%	0.00
	DAK Bidang Pelayanan Dasar	2,437,262,000.00	1,298,915,550.00	0.12%	53.29%	0.00
	DAK Bidang Rujukan	1,781,470,000.00	850,616,700.00	0.08%	47.75%	0.00
	DAK Bidang Kefarmasian	1,023,438,000.00	672,385,750.00	0.06%	65.70%	0.00
Jumlah		1,063,647,651,424.00	1,085,582,320,834.00	100.00%	471.70%	954,528,068,731.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	173.599.517.000,00	149.792.752.518,00	105.767.786.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp173.599.517.000,00 dan Rp105.767.786.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 maka pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp44.024.966.518,00 atau sebesar 41,62%. Pendapatan Transfer Pusat Lainnya dijelaskan secara rinci pada Tabel 5.1.8 berikut:

Tabel 5.1.8
Pendapatan Transfer Dana dari Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
Dana Penyesuaian - LRA						
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	67,145,283,000.00	45,617,097,918.00	30.45%	67.94%	62,397,740,000.00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	3,901,600,000.00	3,121,280,000.00	2.08%	80.00%	1,683,700,000.00
3	Dana Insentif Daerah - LRA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	3.34%	100.00%	2,000,000,000.00
4	Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat	89,024,254,000.00	88,780,852,100.00	59.27%	99.73%	39,686,346,000.00
5	Bantuan Operasional Kesehatan	3,654,000,000.00	2,740,500,000.00	1.83%	75.00%	0.00
6	Jaminan Persalinan	1,231,330,000.00	923,497,500.00	0.62%	75.00%	0.00
7	Pendapatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3,576,000,000.00	3,576,000,000.00	2.39%	100.00%	0.00
8	Pendapatan Bantuan Operasional KB	67,050,000.00	33,525,000.00	0.02%	50.00%	0.00
Jumlah		173,599,517,000.00	149,792,752,518.00	100.00%	86.29%	105,767,786,000.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	66.661.817.303,00	74.626.379.596,00	85.316.366.817,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang



berasal dari bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp74.626.379.596,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 maka pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp10.689.987.221,00 atau sebesar 12,53%. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dijelaskan secara rinci pada Tabel 5.1.9 berikut:

Tabel 5.1.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor / PKB	10,343,700,000.00	12,181,187,229.00	16.32%	117.76%	10,806,633,786.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8,191,700,003.00	8,457,879,913.00	11.33%	103.25%	9,909,909,925.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor / PBBKB	37,816,200,000.00	40,487,475,343.00	54.25%	107.06%	54,990,618,752.00
4	Bagi Hasil Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	82,617,300.00	107,625,797.00	0.14%	130.27%	71,940,519.00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10,227,600,000.00	13,392,211,314.00	17.95%	130.94%	9,537,263,835.00
Jumlah		66,661,817,303.00	74,626,379,596.00	100.00%	111.95%	85,316,366,817.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	143.677.687.203,00	38.363.260.989,00	48.513.007.849,00

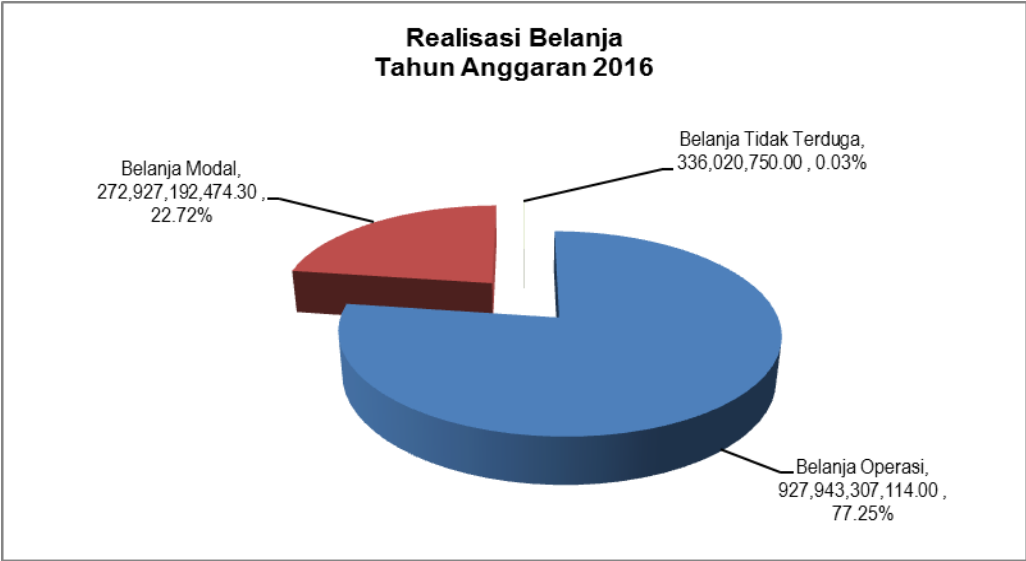
Pendapatan Daerah dari Lain- lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan berasal dari Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp38.363.260.989,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2015, maka terjadi penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp10.149.746.860,00 atau sebesar 20,92%. Rincian Pendapatan Hibah dapat dilihat pada tabel 5.1.10 berikut:

Tabel 5.1.10
Rincian Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	SP III Bid. Pertambangan	140,000,000,000.00	36,297,765,147.00	0.95	0.26	43,850,583,773.00
2	SP III Bid. Kehutanan	81,540,000.00	33,862,730.00	0.00	0.42	84,805,900.00
3	SP III Bid. Perkebunan	322,100,000.00	361,815,065.00	0.01	1.12	219,859,743.00
4	SP III Bid. Perikanan	31,000,000.00	37,131,500.00	0.00	1.20	24,840,000.00
5	SP III Bid. PPI	95,000,000.00	147,598,500.00	0.00	1.55	90,633,000.00
6	SP III Bid. Penggunaan Jalan	3,000,000,000.00	1,337,040,844.00	0.03	0.45	4,242,285,433.00
7	SP III Bid. PT Arutmin Indonesia	148,047,203.00	148,047,203.00	0.00	1.00	0.00
Jumlah		143,677,687,203.00	38,363,260,989.00	1.00	0.27	48,513,007,849.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2. Belanja	1.414.923.930.309,20	1.201.206.520.338,30	1.170.306.392.028,61

Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam APBD Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp1.201.206.520.338,30. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja di Tahun 2015, maka belanja di Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp30.900.128.309,69 atau sebesar 2,64%. Komposisi Belanja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada gambar 5.1.3 berikut:



Gambar 5.1.3
Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2016

Adapun komposisi realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel 5.1.11 berikut:

Tabel 5.1.11
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Realisasi 2016		Realisasi 2015		Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	927.943.307.114,00	77,25%	866.853.295.568,34	74,07%	61.090.011.545,66	7,05%
1.1	Belanja Pegawai	454.650.746.610,00	37,85%	405.900.890.457,34	34,68%	48.749.856.152,66	12,01%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	428.836.264.464,00	35,70%	386.265.426.492,00	33,01%	42.570.837.972,00	11,02%
1.3	Belanja Hibah	43.911.496.040,00	3,66%	73.317.478.619,00	6,26%	(29.405.982.579,00)	-40,11%
1.4	Belanja Bantuan Sosial	544.800.000,00	0,05%	1.369.500.000,00	0,12%	(824.700.000,00)	-60,22%
2	BELANJA MODAL	272.927.192.474,30	22,72%	303.453.096.460,27	25,93%	(30.525.903.985,97)	-10,06%
2.1	Belanja Tanah	22.140.593.600,00	1,84%	8.430.079.187,00	0,72%	13.710.514.413,00	162,64%
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	35.973.808.456,30	2,99%	42.811.670.997,55	3,66%	(6.837.862.541,25)	-15,97%
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	26.064.823.147,00	2,17%	51.268.572.991,00	4,38%	(25.203.749.844,00)	-49,16%
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	181.344.969.521,00	15,10%	186.749.598.359,72	15,96%	(5.404.628.838,72)	-2,89%
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.402.997.750,00	0,62%	14.193.174.925,00	1,21%	(6.790.177.175,00)	-47,84%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	336.020.750,00	0,03%	0,00	0,00%	336.020.750,00	0,00%
3.1	Belanja Tidak Terduga	336.020.750,00	0,03%	0,00	0,00%	336.020.750,00	0,00%
Jumlah		1.201.206.520.338,30	100,00%	1.170.306.392.028,61	100,00%	30.900.128.309,69	2,64%

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.1. Belanja Operasi	1.068.590.547.366,20	927.943.307.114,00	866.853.295.568,34

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran Belanja Operasi Tahun 2016 sebesar Rp1.068.590.547.366,20 dan terealisasi sebesar Rp927.943.307.114,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2015, terjadi peningkatan Belanja Operasi Tahun 2016 sebesar Rp61.090.011.545,66 atau sebesar 7,05%.



	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	495,005,178,005.20	454,650.746.610,00	405.900.890.457,34

Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2016 sebesar Rp495,005,178,005.20 dan terealisasi sebesar Rp454.650.746.610,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015, terjadi peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp48.749.856.152,66 atau sebesar 12,01%. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel 5.1.12.

Tabel 5.1.12
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	291,925,025,895.20	275,268,591,619.00	60.54%	94.29%	254,130,319,291.34
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	215,939,790,693.00	208,698,773,578.00	45.90%	96.65%	186,797,958,233.00
2	Tunjangan Keluarga	20,952,050,215.00	19,039,203,882.00	4.19%	90.87%	18,443,831,173.00
3	Tunjangan Jabatan	8,196,093,914.00	7,373,692,899.00	1.62%	89.97%	7,456,436,000.00
4	Tunjangan Fungsional	14,248,978,205.00	13,229,939,600.00	2.91%	92.85%	12,560,976,000.00
5	Tunjangan Fungsional Umum	4,119,989,000.00	3,306,151,000.00	0.73%	80.25%	3,446,372,000.00
6	Tunjangan Beras	14,562,653,008.00	12,304,875,753.00	2.71%	84.50%	12,376,148,800.00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,332,986,566.00	800,725,493.00	0.18%	60.07%	2,718,740,165.00
8	Pembulatan Gaji	14,286,000.00	3,230,546.00	0.00%	22.61%	4,359,651.00
9	Iuran Jaminan Kesehatan	6,609,403,776.00	5,967,872,981.00	1.31%	90.29%	5,726,032,626.00
10	Uang Paket	72,618,000.00	67,032,000.00	0.01%	92.31%	67,032,000.00
11	Tunjangan Badan Musyawarah	23,948,925.00	18,818,100.00	0.00%	78.58%	18,818,100.00
12	Tunjangan Komisi	50,470,875.00	46,497,150.00	0.01%	92.13%	43,299,900.00
13	Tunjangan Badan Anggaran	23,948,925.00	20,873,475.00	0.00%	87.16%	19,914,300.00
14	Tunjangan Badan Kehormatan	10,094,175.00	10,094,175.00	0.00%	100.00%	7,856,100.00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	79,565,850.00	19,092,150.00	0.00%	24.00%	15,894,900.00
16	Tunjangan Perumahan	3,408,000,000.00	3,408,000,000.00	0.75%	100.00%	3,408,000,000.00
17	Uang Jasa Pengabdian	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
18	Iuran BPJS Ketenagakerjaan*)	2,280,147,768.20	953,718,837.00	0.21%	41.83%	1,018,649,343.34
2	Tambahan Penghasilan PNS	196,952,853,000.00	174,085,112,267.00	38.29%	88.39%	147,354,606,667.00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	117,094,170,000.00	108,589,493,782.00	23.88%	92.74%	85,876,382,216.00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	7,426,200,000.00	7,189,072,610.00	1.58%	96.81%	6,014,200,000.00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	28,800,000.00	14,400,000.00	0.00%	50.00%	51,451,284,451.00
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	5,258,400,000.00	5,068,984,540.00	1.11%	96.40%	4,012,740,000.00
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	67,145,283,000.00	53,223,161,335.00	11.71%	79.27%	0.00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,418,000,000.00	3,343,100,000.00	0.74%	97.81%	3,358,000,000.00
1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2,646,000,000.00	2,646,000,000.00	0.58%	100.00%	2,646,000,000.00
2	Penunjang Operasional KDH/WKDH	460,000,000.00	385,100,000.00	0.08%	83.72%	400,000,000.00
3	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD*)	312,000,000.00	312,000,000.00	0.07%	100.00%	312,000,000.00
4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
1	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2,134,788,741.00	1,546,223,205.00	0.34%	72.43%	858,360,069.00
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	54,622,983.00	54,327,943.00	0.01%	99.46%	47,742,343.00
2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	156,542,730.00	116,666,157.00	0.03%	74.53%	98,641,969.00
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	29,511,750.00	29,378,949.00	0.01%	99.55%	21,155,588.00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	26,623,800.00	26,503,993.00	0.01%	99.55%	10,649,520.00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	555,000,000.00	552,590,568.00	0.12%	99.57%	373,933,189.00
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	650,160.00	487,620.00	0.00%	75.00%	200,000.00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00%	100.00%	0.00
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	44,000,000.00	32,999,998.00	0.01%	75.00%	17,599,960.00
9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	275,000,000.00	204,753,750.00	0.05%	74.46%	132,437,500.00
10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	769,087,318.00	305,879,927.00	0.07%	39.77%	156,000,000.00
11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Kurang Bayar	220,000,000.00	218,884,300.00	0.05%	99.49%	0.00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	574,510,369.00	407,719,519.00	0.09%	70.97%	199,604,430.00
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	574,510,369.00	407,719,519.00	0.09%	70.97%	199,604,430.00
J U M L A H		495,005,178,005.20	454,650,746,610.00	100.00%	91.85%	405,900,890,457.34



Pada Tabel 5.1.12 dapat dijelaskan bahwa Realisasi belanja pegawai pengeluaran terbesar digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp275.268.591.619,00 atau sebesar 60,54% dari realisasi belanja pegawai.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	522.039.439.381,00	428.836.264.464,00	386.265.426.492,00

Belanja barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 sebesar Rp522.039.439.381,00 dan terealisasi sebesar Rp428.836.264.464,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015, terjadi kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp42.570.837.972,00 atau sebesar 11,02%.

Pada Belanja Barang dan Jasa, pengeluaran terbesar digunakan untuk Belanja Jasa Kantor sebesar Rp114.211.129.941,00 atau sebesar 25,69% dari Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa, sedangkan pengeluaran terendah untuk Belanja Ongkos Naik Haji sebesar Rp75.167.016,00 atau sebesar 0,02% dari Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada Tabel 5.1.13.

Tabel 5.1.13
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23,787,076,761.00	20,895,816,849.00	4.87%	87.85%	21,844,173,907.00
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4,553,044,609.00	3,949,564,209.00	0.92%	86.75%	4,236,199,372.00
2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0.00	0.00	0.00%	0.00%	143,251,500.00
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	316,513,850.00	257,829,750.00	0.06%	81.46%	924,563,950.00
4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	371,931,000.00	265,081,000.00	0.06%	71.27%	266,268,000.00
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,269,127,550.00	996,943,983.00	0.23%	78.55%	850,644,138.00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,264,741,000.00	1,817,929,215.00	0.42%	80.27%	2,077,340,398.00
7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	55,200,000.00	18,420,000.00	0.00%	33.37%	0.00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	165,430,000.00	108,350,000.00	0.03%	65.50%	96,655,000.00
9	Belanja Pupuk*)	6,480,000.00	3,850,000.00	0.00%	59.41%	207,975,000.00
10	Belanja Praktek/Percontohan*)	61,943,200.00	43,668,200.00	0.01%	70.50%	173,424,800.00
11	Belanja Air*)	509,017,000.00	460,081,760.00	0.11%	90.39%	338,340,650.00
12	Belanja Alat Kesehatan*)	454,684,552.00	77,753,992.00	0.02%	17.10%	56,423,217.00
13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Alsesoris*)	13,177,890,000.00	12,351,189,240.00	2.88%	93.73%	12,281,877,882.00
14	Belanja Hadiah*)	544,950,000.00	512,459,500.00	0.12%	94.04%	128,360,000.00
15	Belanja Perlengkapan Pertandingan*)	36,124,000.00	32,696,000.00	0.01%	90.51%	62,850,000.00
2	Belanja Bahan/Material	14,232,146,927.00	11,400,502,633.00	2.66%	80.10%	10,245,053,512.00
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,622,103,000.00	3,237,184,000.00	0.75%	89.37%	3,499,905,000.00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1,340,000,000.00	1,307,540,000.00	0.30%	97.58%	1,240,010,500.00
3	Belanja Bibit Ternak	40,080,000.00	27,540,000.00	0.01%	68.71%	50,000,000.00
4	Belanja Bahan obat-obatan	5,205,366,627.00	3,365,240,533.00	0.78%	64.65%	2,279,084,550.00
5	Belanja Bahan Kimia	1,332,530,000.00	1,165,327,100.00	0.27%	87.45%	913,709,712.00
6	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1,147,750,000.00	1,067,335,000.00	0.25%	92.99%	1,003,268,000.00
7	Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*)	272,775,000.00	202,127,500.00	0.05%	74.10%	379,795,000.00
8	Belanja Komponen Perlengkapan Kantor*)	904,425,000.00	796,134,200.00	0.19%	88.03%	630,474,700.00
9	Belanja Bahan Komponen Peralatan dan Perlengkapan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan*)	20,392,300.00	15,362,300.00	0.00%	75.33%	19,767,300.00
10	Belanja Alat Pembungkus*)	5,450,000.00	5,300,000.00	0.00%	97.25%	1,800,000.00
11	Belanja Peralatan Kesehatan Hewan*)	8,510,000.00	8,420,000.00	0.00%	98.94%	6,702,500.00
12	Belanja Bahan Buffer Stock*)	24,100,000.00	22,190,000.00	0.01%	92.07%	79,100,000.00
13	Belanja Bahan Baku daur Ulang Sampah Non Organik*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,400,000.00
14	Belanja Bahan Makanan*)	308,665,000.00	180,802,000.00	0.04%	58.58%	139,036,250.00
3	Belanja Jasa Kantor	123,488,485,060.00	114,211,129,941.00	26.63%	92.49%	50,086,024,160.00
1	Belanja Telepon	390,470,000.00	260,145,215.00	0.06%	66.62%	163,786,831.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
	2 Belanja Air	182,500,000.00	126,431,480.00	0.03%	69.28%	118,895,520.00
	3 Belanja Listrik	12,950,095,000.00	11,011,441,715.00	2.57%	85.03%	10,878,316,714.00
	4 Belanja Surat Kabar/Majalah	781,590,000.00	627,589,500.00	0.15%	80.30%	637,073,105.00
	5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2,630,438,800.00	2,007,924,391.00	0.47%	76.33%	1,856,864,910.00
	6 Belanja Paket/Pengiriman	96,853,960.00	79,157,376.00	0.02%	81.73%	21,036,100.00
	7 Belanja Sertifikasi	152,170,000.00	75,176,049.00	0.02%	49.40%	39,276,399.00
	8 Belanja Jasa Transaksi Keuangan	435,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	432,499.00
	9 Belanja Jasa Service*)	64,900,000.00	40,284,000.00	0.01%	62.07%	37,290,000.00
	10 Belanja Jasa Informatika Elektronik*)	1,000,150,000.00	759,865,262.00	0.18%	75.98%	1,427,251,500.00
	11 Belanja Jasa Kebersihan*)	41,100,000.00	25,800,000.00	0.01%	62.77%	1,008,859,000.00
	12 Belanja Operasional Sekolah*)	20,498,187,300.00	20,161,173,962.00	4.70%	98.36%	26,014,446,133.00
	13 Belanja Jasa Transportasi*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,983,663,563.00
	14 Belanja Jasa Akomodasi*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,815,681,390.00
	15 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan*)	21,230,000.00	5,205,596.00	0.00%	24.52%	5,205,596.00
	16 Belanja Iuran Sampah*)	6,900,000.00	2,800,000.00	0.00%	40.58%	3,800,000.00
	17 Belanja Jasa Penyelesaian Sengketa Hukum*)	154,150,000.00	64,500,000.00	0.02%	41.84%	48,944,900.00
	18 Belanja Jasa Survey Lapangan*)	37,000,000.00	4,500,000.00	0.00%	12.16%	0.00
	19 Belanja Honor/Upah*)	84,033,700,000.00	78,953,735,395.00	18.41%	93.95%	25,200,000.00
	20 Belanja Operasional	12,050,000.00	5,400,000.00	0.00%	44.81%	0.00
4	Belanja Premi Asuransi	280,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	31,713,772,863.00
	1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	280,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	31,713,772,863.00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,666,393,754.00	10,716,632,056.00	2.50%	84.61%	11,712,106,246.00
	1 Belanja Jasa Service	34,000,000.00	10,400,000.00	0.00%	30.59%	2,958,000.00
	2 Belanja Penggantian Suku Cadang	7,860,000.00	6,120,000.00	0.00%	77.86%	11,673,500.00
	3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6,318,686,804.00	5,206,365,139.00	1.21%	82.40%	6,486,024,998.00
	4 Belanja Jasa KIR	25,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,090,000.00
	5 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	408,870,000.00	384,675,500.00	0.09%	94.08%	396,492,440.00
	6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	120,850,000.00	119,558,100.00	0.03%	98.93%	183,388,550.00
	7 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor*)	5,751,126,950.00	4,989,513,317.00	1.16%	86.76%	4,628,478,758.00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,593,493,450.00	4,191,033,978.00	0.98%	74.93%	5,389,251,170.00
	1 Belanja Cetak	3,578,959,500.00	2,659,372,185.00	0.62%	74.31%	3,496,873,016.00
	2 Belanja Penggandaan	2,014,533,950.00	1,531,661,793.00	0.36%	76.03%	1,892,378,154.00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,482,000,000.00	3,378,911,502.00	0.79%	75.39%	1,821,269,066.00
	1 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0.00	0.00	0.00%	0.00%	120,000,000.00
	2 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3,928,000,000.00	3,172,371,502.00	0.74%	80.76%	1,335,019,066.00
	3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	199,500,000.00	31,300,000.00	0.01%	15.69%	81,750,000.00
	4 Belanja Sewa Panggung*)	354,500,000.00	175,240,000.00	0.04%	49.43%	284,500,000.00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,193,220,000.00	875,120,000.00	0.20%	73.34%	878,350,000.00
	1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,171,970,000.00	855,020,000.00	0.20%	72.96%	870,100,000.00
	2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21,250,000.00	20,100,000.00	0.00%	94.59%	8,250,000.00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,507,900,000.00	1,160,846,380.00	0.27%	76.98%	1,586,440,152.00
	1 Belanja Sewa Meja Kursi	357,300,000.00	339,010,000.00	0.08%	94.88%	370,080,000.00
	2 Belanja Sewa Generator	27,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	7.41%	46,000,000.00
	3 Belanja Sewa Tenda	525,900,000.00	307,586,380.00	0.07%	58.49%	591,160,152.00
	4 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	100.00%	4,400,000.00
	5 Belanja Sewa Perlengkapan Sound System*)	586,700,000.00	501,250,000.00	0.12%	85.44%	571,800,000.00
	6 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Olah Raga*)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	100.00%	3,000,000.00
	7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Pelatihan*)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	100.00%	0.00
10	Belanja Makanan dan Minuman	16,754,807,700.00	13,141,999,400.00	3.06%	78.44%	14,004,218,500.00
	1 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	17,100,000.00	8,430,000.00	0.00%	49.30%	747,344,300.00
	2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,073,383,700.00	3,494,057,700.00	0.81%	68.87%	3,722,934,000.00
	3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,022,520,000.00	1,208,656,000.00	0.28%	59.76%	1,021,313,200.00
	4 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	968,484,000.00	811,763,000.00	0.19%	83.82%	910,737,000.00
	5 Belanja Makan dan Minum Acara*)	8,673,320,000.00	7,619,092,700.00	1.78%	87.85%	7,601,890,000.00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	836,850,000.00	774,453,000.00	0.18%	92.54%	683,720,000.00
	1 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	250,000,000.00	226,138,000.00	0.05%	90.46%	133,670,000.00
	2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	194,950,000.00	192,850,000.00	0.04%	98.92%	192,850,000.00
	3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	67,200,000.00	66,150,000.00	0.02%	98.44%	136,539,000.00
	5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	293,200,000.00	289,315,000.00	0.07%	98.67%	103,544,000.00
	6 Belanja Atribut Pakaian dan Kelengkapannya*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	117,117,000.00
12	Belanja Pakaian Kerja	878,497,500.00	735,038,000.00	0.17%	83.67%	815,003,000.00
	1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	878,497,500.00	735,038,000.00	0.17%	83.67%	815,003,000.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,404,385,000.00	2,875,719,496.00	0.67%	84.47%	2,351,382,500.00
	1 Belanja Pakaian adat daerah	196,225,000.00	181,725,000.00	0.04%	92.61%	90,375,000.00
	2 Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,351,870,000.00	1,926,931,450.00	0.45%	81.93%	446,100,000.00
	3 Belanja Pakaian Olahraga	459,090,000.00	393,866,546.00	0.09%	85.79%	1,322,761,000.00
	4 Belanja Pakaian Hari Tertentu*)	397,200,000.00	373,196,500.00	0.09%	93.96%	492,146,500.00
14	Belanja Perjalanan Dinas	75,429,059,600.00	54,967,145,896.00	12.82%	72.87%	38,271,509,671.00
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,089,540,000.00	13,095,891,600.00	3.05%	76.63%	12,387,134,399.00
	2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,339,519,600.00	41,871,254,296.00	9.76%	71.77%	25,884,375,272.00
15	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	10,404,434,600.00	6,568,056,273.00	1.53%	63.13%	6,554,089,099.00
	1 Belanja Pemeliharaan Tanah	0.00	0.00	0.00%	0.00%	29,966,000.00
	2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,499,275,000.00	1,045,587,373.00	0.24%	69.74%	1,213,754,000.00
	3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,922,465,000.00	2,150,336,400.00	0.50%	54.82%	2,864,174,949.00
	4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3,546,310,000.00	2,792,740,000.00	0.65%	78.75%	1,876,591,000.00
	5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	859,600,000.00	577,992,500.00	0.13%	67.24%	569,603,150.00
	6 Belanja Pemeliharaan Aplikasi	50,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	7 Belanja Pemeliharaan/Normalisasi Sungai	526,784,600.00	1,400,000.00	0.00%	0.27%	0.00
16	Belanja jasa Konsultansi	8,009,971,950.00	4,155,581,990.00	0.97%	51.88%	4,740,054,850.00
	1 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	447,668,950.00	427,017,990.00	0.10%	95.39%	427,681,550.00
	2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6,713,130,000.00	3,486,802,000.00	0.81%	51.94%	4,312,373,300.00
	3 Belanja Jasa Konsultasi ISO*)	696,173,000.00	191,880,000.00	0.04%	27.56%	0.00
	4 Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	153,000,000.00	49,882,000.00	0.01%	32.60%	0.00
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,432,500,000.00	1,923,964,151.00	0.45%	79.09%	1,759,300,000.00
	1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	1,295,000,000.00	1,134,500,000.00	0.26%	87.61%	1,040,000,000.00
	2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	552,500,000.00	441,185,151.00	0.10%	79.85%	378,000,000.00
	3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	585,000,000.00	348,279,000.00	0.08%	59.53%	341,300,000.00
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8,069,935,000.00	7,119,268,900.00	1.66%	88.22%	5,924,957,900.00
	1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	8,063,500,000.00	7,119,268,900.00	1.66%	88.29%	5,229,957,900.00
	2 Belanja Bimbingan Teknis	6,435,000.00	0.00	0.00%	0.00%	695,000,000.00
19	Belanja Honorarium PNS	25,888,756,500.00	23,495,354,000.00	5.48%	90.76%	27,278,425,125.00
	1 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,336,596,500.00	9,125,004,000.00	2.13%	88.28%	7,785,180,000.00
	2 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	179,900,000.00	40,750,000.00	0.01%	22.65%	15,500,000.00
	3 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00	0.00	0.00%	0.00%	52,650,000.00
	4 Belanja Honorarium PNS Lainnya	682,160,000.00	622,450,000.00	0.15%	91.25%	1,500,220,125.00
	5 Belanja Honorarium Tim*)	14,607,600,000.00	13,624,650,000.00	3.18%	93.27%	17,871,700,000.00
	6 Belanja Honor Upah*)	82,500,000.00	82,500,000.00	0.02%	100.00%	53,175,000.00
20	Belanja Honorarium Non Pegawai	0.00	0.00	0.00%	0.00%	86,450,000.00
	1 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00%	0.00%	86,450,000.00
21	Belanja Honorarium Non PNS	61,612,353,250.00	54,555,952,425.00	12.72%	88.55%	97,865,426,660.00
	1 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00	0.00	0.00%	0.00%	172,400,000.00
	2 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0.00	0.00	0.00%	0.00%	64,794,301,583.00
	3 Belanja Honorarium Tim/Panitia*)	4,331,630,000.00	3,883,402,500.00	0.91%	89.65%	3,107,935,000.00
	4 Belanja Honorarium Perangkat Desa*)	778,500,000.00	778,500,000.00	0.18%	100.00%	776,500,000.00
	5 Belanja Honorarium Perangkat Medis*)	2,985,483,750.00	1,831,963,225.00	0.43%	61.36%	915,330,000.00
	6 Belanja Honor Upah*)	53,075,739,500.00	47,669,586,700.00	11.12%	89.81%	28,098,960,077.00
	7 Belanja Honorarium Guru Mengaji *)	441,000,000.00	392,500,000.00	0.09%	89.00%	0.00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	48,741,832,205.00	34,736,357,011.00	8.10%	71.27%	38,304,254,091.00
	1 Belanja Honorarium BLUD*)	1,039,520,000.00	745,820,000.00	0.17%	71.75%	18,221,884,359.00
	2 Belanja Barang dan Jasa BLUD*)	47,702,312,205.00	33,990,537,011.00	7.93%	71.26%	20,082,369,732.00
23	Belanja barang *)	2,878,827,000.00	2,547,052,600.00	0.59%	88.48%	204,080,000.00
	1 Belanja Barang Alat Rumah Tangga Lainnya*)	13,360,000.00	11,110,000.00	0.00%	83.16%	191,180,000.00
	2 Belanja Barang Peralatan Kantor Lainnya	80,330,000.00	76,633,000.00	0.02%	95.40%	12,900,000.00
	3 Belanja Barang Perlengkapan Kantor Lainnya*)	300,150,000.00	235,713,000.00	0.05%	78.53%	0.00
	4 Belanja Barang Komputer Lainnya	44,328,000.00	30,632,000.00	0.01%	69.10%	0.00
	5 Belanja Barang Mebeleur Lainnya	2,001,439,000.00	1,781,097,600.00	0.42%	88.99%	0.00
	6 Belanja Buku	65,450,000.00	54,797,000.00	0.01%	83.72%	0.00
	7 Belanja Barang Peralatan Laboratorium Lainnya	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00%	100.00%	0.00
	8 Belanja Barang Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	363,020,000.00	346,320,000.00	0.08%	95.40%	0.00
24	Belanja Jasa *)	11,906,237,846.00	9,853,163,493.00	2.30%	0.00%	9,166,389,020.00
	1 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber*)	5,533,185,000.00	4,327,995,000.00	1.01%	78.22%	5,350,945,000.00
	2 Belanja Jasa Kemitraan*)	4,951,682,846.00	4,834,403,903.00	1.13%	97.63%	3,815,444,020.00
	3 Belanja Jasa Pemeriksaan	36,000,000.00	8,709,800.00	0.00%	24.19%	0.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
	4 Belanja Jasa Rujukan Paien	1,185,370,000.00	667,940,000.00	0.16%	56.35%	0.00
	5 Belanja Iuran Kesehatan Non PNS	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	6 Belanja Iuran JKK dan JKM Non PNS	200,000,000.00	14,114,790.00	0.00%	7.06%	0.00
25	Belanja Jamkesda	57,470,275,278.00	44,481,997,474.00	10.37%	77.40%	2,979.725.000.00
	1 Belanja Jamkesda	57,470,275,278.00	44,481,997,474.00	10.37%	77.40%	2,979.725.000.00
26	Belanja Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	1 Belanja Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
27	Belanja Ongkos Naik Haji	90,000,000.00	75,167,016.00	0.02%	83.52%	0.00
	1 Belanja Ongkos Naik Haji	90,000,000.00	75,167,016.00	0.02%	83.52%	0.00
J U M L A H		522,039,439,381.00	428,836,264,464.00	100.00%	82.15%	386.265.426.492.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.1.3. Belanja Hibah	49.380.929.980,00	43.911.496.040,00	73.317.478.619,00

Belanja Hibah merupakan pos pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam APBD Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp49.380.929.980,00 dan terealisasi sebesar Rp43.911.496.040,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2015, terjadi penurunan Belanja Hibah sebesar Rp29.405.982.579,00 atau sebesar 40,11%.

Belanja Hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 ada 12 kelompok. Rincian dari 12 kelompok tersebut dilihat pada Tabel 5.1.14.

Tabel 5.1.14
Realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	0.00%	0.00%	12,409,873,960.00
	1 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	0.00%	0.00%	12,409,873,960.00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	950,000,000.00	175,657,221.00	0.40%	18.49%	2,930,562,167.00
	1 Belanja Hibah Kepada Lembaga Adat OGI*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,700,000,000.00
	2 Belanja Hibah Kepada MUI*)	250,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	300,000,000.00
	3 Belanja Hibah Kepada Nahdatul Ulama (NU*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	300,000,000.00
	4 Belanja Hibah Kepada Muhammadiyah*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,000,000.00
	5 Belanja Hibah Kepada Komisi Penanggulangan Aids Kab. Tanah Bumbu*)	200,000,000.00	175,657,221.00	0.40%	87.83%	420,562,167.00
	6 Belanja Hibah Kepada Indonesia Drummers Batulicin*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,000,000.00
	7 Hibah kepada Ade Massorong *)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,000,000.00
	8 Belanja Hibah kepada Parisada Hindu Tanah Bumbu (PHDI)	300,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	9 Belanja Hibah Kepada Pederasi Serikat Transport Indonesia	200,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
3	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	506,846,000.00
	1 Belanja Hibah Kepada APDESI	0.00	0.00	0.00%	0.00%	456,846,000.00
	2 Hibah Kepada Lembaga Kesenian Putra 7 Februari	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50,000,000.00
4	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal*)	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	13.89%	100.00%	27,004,728,900.00
	1 Hibah Kepada PANWASLU*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000,000,000.00
	2 Hibah Kepada TNI*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000,000,000.00
	3 Hibah Kepada KPU*)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	11.39%	100.00%	15,000,000,000.00
	4 Belanja Hibah kepada Polres*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,004,728,900.00
	5 Hibah Kepada Danlanal	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2.28%	100.00%	0.00
	6 Hibah Kepada Pemasarakatan Kotabaru	100,000,000.00	100,000,000.00	0.23%	100.00%	0.00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Profesi *)	300,000,000.00	299,878,980.00	0.68%	99.96%	599,972,275.00
	1 Hibah Untuk PMI	200,000,000.00	199,878,980.00	0.46%	99.94%	599,972,275.00
	2 Belanja Hibah kepada PGRI	100,000,000.00	100,000,000.00	0.23%	100.00%	0.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
6	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan*)	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	2.85%	100.00%	4,000,000,000.00
	1 Belanja Hibah Kepada KNPI*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	250,000,000.00
	2 Belanja Hibah Kepada FOKMA*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000,000,000.00
	3 Belanja Hibah Kepada Pramuka*)	750,000,000.00	750,000,000.00	1.71%	100.00%	600,000,000.00
	4 Belanja Hibah Kepada Pemuda Pemudi Kusan Hilir*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	150,000,000.00
	5 Belanja Hibah Kepada Politeknik Ka. Tanah Bumbu *)	500,000,000.00	500,000,000.00	1.14%	100.00%	0.00
7	Belanja Hibah Kepada Organisasi Olahraga*)	5,500,000,000.00	5,462,002,535.00	12.44%	99.31%	4,855,250,000.00
	1 Belanja Hibah Kepada KONI*)	5,500,000,000.00	5,462,002,535.00	12.44%	99.31%	4,750,000,000.00
	2 Belanja Hibah Kepada Persegab FC*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	105,250,000.00
8	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan *)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,329,000,000.00
	1 Belanja Hibah Kepada BKPMRI*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,329,000,000.00
9	Belanja Hibah untuk Keagamaan *)	1,320,000,000.00	845,000,000.00	1.92%	64.02%	3,983,950,000.00
	1 Belanja Hibah Kepada LPTQ*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	250,000,000.00
	2 Belanja Hibah Kepada Dewan Pengurus Tempat Ibadah*)	1,250,000,000.00	775,000,000.00	1.76%	62.00%	3,404,000,000.00
	3 Belanja Hibah Kepada Majelis Ta'lim*)	70,000,000.00	70,000,000.00	0.16%	100.00%	229,950,000.00
	4 Belanja Hibah Kepada Melasti Tanah Bumbu*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,000,000.00
10	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14,472,359,980.00	12,532,082,904.00	28.54%	86.59%	0.00
	1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2,678,049,980.00	2,340,448,504.00	5.33%	87.39%	0.00
	2 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	11,794,310,000.00	10,191,634,400.00	23.21%	86.41%	0.00
11	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,461,690,000.00	3,180,690,000.00	7.24%	71.29%	2,979,725,000.00
	1 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	4,461,690,000.00	3,180,690,000.00	7.24%	71.29%	2,979,725,000.00
12	Belanja Hibah Bidang Pendidikan *)	15,026,880,000.00	14,066,184,400.00	32.03%	93.61%	15,697,295,317.00
	1 Belanja Hibah Bidang Pendidikan*)	15,026,880,000.00	14,066,184,400.00	32.03%	93.61%	14,697,295,317.00
	2 Belanja Hibah Untuk Pondok Pesantren*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,000,000,000.00
J U M L A H		49,380,929,980.00	43,911,496,040.00	100.00%	88.92%	73,317,478,619.00

Pada Tabel 5.1.14. dijelaskan bahwa dari 7 kelompok Belanja Hibah, pengeluaran terbesar pada Belanja Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp14.066.184.400,00 dan pengeluaran terendah pada Belanja Hibah untuk Keagamaan*) yaitu Kepada Majelis Ta'lim*) sebesar Rp70.000.000,00.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial	2.165.000.000,00	544.800.000,00	1.369.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pos pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang dan atau barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam APBD Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp544.800.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015, terjadi penurunan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp824.700.000,00 atau sebesar 60,22%. Rincian Bantuan Sosial tampak pada Tabel 5.1.15 berikut:

Tabel 5.1.15
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

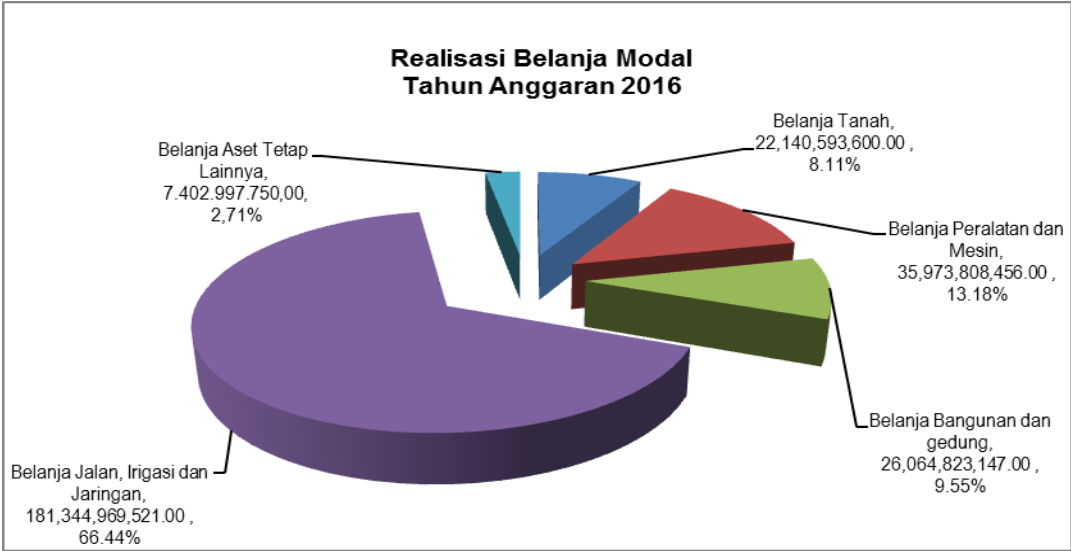
No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat*)	1,165,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,265,000,000.00
	Belanja Bantuan Sosial Untuk Kesejahteraan Sosial *)	1,165,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,265,000,000.00
2	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1,000,000,000.00	544,800,000.00	100.00%	54.48%	104,500,000.00
	Belanja bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan*)	1,000,000,000.00	544,800,000.00	100.00%	54.48%	104,500,000.00
Jumlah		2,165,000,000.00	544,800,000.00	100.00%	25.16%	1,369,500,000.00



	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.2. Belanja Modal	344,333,382,943.00	272.927.192.474,30	303.453.096.460,27

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan. Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp344.333.382.943,00 dan terealisasi sebesar Rp272.927.192.474,30. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar Rp30.525.903.985,97 atau sebesar 10,06%

Pada Gambar 5.1.4 menjelaskan bahwa realisasi Belanja Modal Tahun 2016 yang terbesar dikeluarkan untuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp181.344.969.521,00 dan yang terendah untuk Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.402.997.750,00.



Gambar 5.1.4
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2016

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Tanah	34.517.700.000,00	22.140.593.600,00	8.430.079.187,00

Anggaran Belanja Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp34.517.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.140.593.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar Rp13.710.514.413,00 atau sebesar 162,64%. Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2016 seperti tampak pada tabel 5.1.16.

Tabel 5.1.16
Realisasi Belanja Tanah
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0.00	0.00	0.00%	0.00%	222,000,000.00
	1 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	0.00	0.00	0.00%	0.00%	222,000,000.00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	34,517,700,000.00	22,140,593,600.00	100.00%	64.14%	7,203,690,187.00
	1 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	15,917,700,000.00	6,036,389,600.00	27.26%	37.92%	5,648,238,300.00
	2 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	18,600,000,000.00	16,104,204,000.00	72.74%	86.58%	1,555,451,887.00
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,004,389,000.00



No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,004,389,000.00
J U M L A H		34,517,700,000.00	22,140,593,600.00	100.00%	64.14%	8,430,079,187.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	49.781.656.816,00	35.973.808.456,30	42.811.670.997,55

Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp49.781.656.816,00 dan terealisasi sebesar Rp35.973.808.456,30. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar Rp6.837.862.541,25 atau sebesar 15,97%. Pada Tabel 5.1.2.7 dijelaskan bahwa pengeluaran terbesar digunakan untuk pengadaan Alat Kedokteran sebesar Rp11.754.537.645,30 dan pengeluaran terendah untuk Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp6.400.000,00. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Tabel 5.1.17.

Tabel 5.1.17
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	140,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	140,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	3,503,800,000.00	3,502,791,450.00	9.74%	99.97%	0.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator	3,503,800,000.00	3,502,791,450.00	9.74%	99.97%	0.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	27,250,000.00	23,336,500.00	0.06%	85.64%	8,200,000.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	27,250,000.00	23,336,500.00	0.06%	85.64%	8,200,000.00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	11,058,464,193.00	8,811,309,400.00	24.49%	79.68%	8,987,827,000.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7,573,214,193.00	6,043,513,750.00	16.80%	79.80%	6,188,880,000.00
2	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,462,150,000.00	1,246,340,500.00	3.46%	85.24%	680,900,000.00
3	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1,047,150,000.00	545,555,150.00	1.52%	52.10%	631,250,000.00
4	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Jeep	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
5	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	975,950,000.00	975,900,000.00	2.71%	99.99%	1,380,970,000.00
6	6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0.00	0.00	0.00%	0.00%	105,827,000.00
7	7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Stasion wagon	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
8	8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Bus	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	750,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	750,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	63,190,000.00	49,940,000.00	0.14%	79.03%	0.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	63,190,000.00	49,940,000.00	0.14%	79.03%	0.00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16,200,000.00	14,960,000.00	0.04%	92.35%	616,127,000.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
2	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,500,000.00
3	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	15,000,000.00	14,960,000.00	0.04%	99.73%	0.00
4	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es	0.00	0.00	0.00%	0.00%	611,627,000.00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	387,010,000.00	360,350,000.00	1.00%	93.11%	0.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
2	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting	385,510,000.00	360,350,000.00	1.00%	93.47%	0.00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	190,000,000.00	23,820,000.00	0.07%	12.54%	89,655,000.00
1	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	136,500,000.00	20,370,000.00	0.06%	14.92%	31,550,000.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,400,000.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	50,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	51,205,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	3,500,000.00	3,450,000.00	0.01%	98.57%	1,500,000.00
	10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	25,700,000.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0.00	0.00	0.00%	0.00%	12,500,000.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	13,200,000.00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	1,820,420,000.00	810,000,000.00	2.25%	44.50%	2,000,000.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	4,400,000.00	3,000,000.00	0.01%	68.18%	0.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	1,001,850,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,000,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	814,170,000.00	807,000,000.00	2.24%	99.12%	0.00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2,481,534,598.00	2,043,460,588.00	5.68%	82.35%	1,315,988,228.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01%	100.00%	4,000,000.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	242,189,998.00	133,030,000.00	0.37%	54.93%	0.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	50,700,000.00	48,100,000.00	0.13%	94.87%	3,000,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	382,500,000.00	305,899,900.00	0.85%	79.97%	317,505,728.00
	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1,804,144,600.00	1,554,430,688.00	4.32%	86.16%	991,482,500.00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4,711,212,000.00	3,675,289,876.00	10.22%	78.01%	5,255,136,207.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2,775,613,200.00	2,469,046,851.00	6.86%	88.96%	3,644,575,007.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	3,050,000.00	3,050,000.00	0.01%	100.00%	14,800,000.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	51,000,000.00	28,500,000.00	0.08%	55.88%	18,750,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	638,876,000.00	454,547,000.00	1.26%	71.15%	555,640,000.00
	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	62,000,000.00	20,175,000.00	0.06%	32.54%	21,450,000.00
	6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	837,172,800.00	699,971,025.00	1.95%	83.61%	999,921,200.00
	7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	343,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2,636,981,600.00	1,671,786,422.00	4.65%	63.40%	3,288,532,693.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	51,000,000.00	44,810,000.00	0.12%	87.86%	0.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	947,606,300.00	799,486,372.00	2.22%	84.37%	1,698,986,640.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	558,700,000.00	254,191,500.00	0.71%	45.50%	818,625,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	235,293,000.00	226,957,000.00	0.63%	96.46%	243,768,818.00
	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	459,968,800.00	264,687,350.00	0.74%	57.54%	441,456,735.00
	6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	384,413,500.00	81,654,200.00	0.23%	21.24%	85,695,500.00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1,927,885,000.00	1,829,001,000.00	5.08%	94.87%	1,329,561,700.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1,668,800,000.00	1,587,763,000.00	4.41%	95.14%	1,109,311,800.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00%	0.00%	98,000,000.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	212,085,000.00	202,663,000.00	0.56%	95.56%	87,644,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.01%	100.00%	0.00
	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	27,500,000.00	27,225,000.00	0.08%	99.00%	15,000,000.00
	6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14,500,000.00	6,350,000.00	0.02%	43.79%	19,605,900.00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	211,254,000.00	137,536,575.00	0.38%	65.10%	484,932,000.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	176,254,000.00	103,284,575.00	0.29%	58.60%	239,047,000.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	31,000,000.00	30,292,000.00	0.08%	97.72%	245,885,000.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	4,000,000.00	3,960,000.00	0.01%	99.00%	0.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	156,958,000.00	141,763,750.00	0.39%	90.32%	72,604,500.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	156,958,000.00	141,763,750.00	0.39%	90.32%	66,516,000.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,088,500.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	150,000,000.00	149,270,000.00	0.41%	99.51%	6,000,000.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,000,000.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	150,000,000.00	149,270,000.00	0.41%	99.51%	0.00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	19,191,638,225.00	11,754,537,645.30	32.68%	61.25%	18,288,146,419.55
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	87,013,300.00	37,107,328.00	0.10%	42.65%	9,437,182,307.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	4,450,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	238,778,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Famasi	2,700,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	17,493,777,125.00	11,145,317,968.30	30.98%	63.71%	8,701,339,112.55
	6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	30,100,000.00	7,500,000.00	0.02%	24.92%	0.00
	7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary	662,166,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	672,653,800.00	564,612,349.00	1.57%	83.94%	0.00
	9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	149,625,000.00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	97,800,000.00	79,800,000.00	0.22%	81.60%	2,277,985,000.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	10,300,000.00	7,500,000.00	0.02%	72.82%	0.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	87,500,000.00	72,300,000.00	0.20%	82.63%	0.00
	3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,272,485,000.00
	4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500,000.00
	5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000,000.00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	88,139,200.00	0.00	0.00%	0.00%	200,900,000.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	88,139,200.00	0.00	0.00%	0.00%	200,900,000.00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	6,500,000.00	6,400,000.00	0.02%	98.46%	0.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan	6,500,000.00	6,400,000.00	0.02%	98.46%	0.00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	654,820,000.00	654,820,000.00	1.82%	100.00%	0.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	3,000,000.00	3,000,000.00	0.01%	100.00%	0.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	651,820,000.00	651,820,000.00	1.81%	100.00%	0.00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	34,250,000.00	34,210,000.00	0.10%	99.88%	0.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	34,250,000.00	34,210,000.00	0.10%	99.88%	0.00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	225,600,000.00	199,425,250.00	0.55%	88.40%	562,375,250.00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	225,600,000.00	199,425,250.00	0.55%	88.40%	462,085,000.00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,290,250.00
J U M L A H		49,781,656,816.00	35,973,808,456.30	100.00%	72.26%	42,811,670,997.55

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	36.559.435.996,00	26.064.823.147,00	51.268.572.991,00

Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2016 sebesar Rp36.559.435.996,00 dan terealisasi sebesar Rp26.064.823.147,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar Rp25.203.749.844,00 atau sebesar 49,16%.

Tabel 5.1.18
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	36,302,015,996.00	25,982,163,147.00	99.68%	71.57%	48,828,003,451.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
	1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7,642,917,626.00	5,924,376,877.00	22.73%	77.51%	28,521,450,724.00
	2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	209,650,000.00	208,730,000.00	0.80%	99.56%	903,103,000.00
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	214,520,000.00	214,185,000.00	0.82%	99.84%	608,760,000.00
	4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	461,800,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,429,007,400.00
	5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	394,317,500.00
	6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24,899,294,000.00	17,923,200,900.00	68.76%	71.98%	8,069,122,497.00
	7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	222,700,000.00	201,496,000.00	0.77%	90.48%	894,052,000.00
	8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1,941,809,370.00	865,464,370.00	3.32%	44.57%	3,740,083,630.00
	9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0.00	0.00	0.00%	0.00%	325,550,000.00
	10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	35,000,000.00	33,280,000.00	0.13%	95.09%	0.00
	11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	429,908,700.00
	12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	196,684,000.00
	13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0.00	0.00	0.00%	0.00%	260,850,000.00
	14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	674,325,000.00	611,430,000.00	2.35%	90.67%	1,055,114,000.00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0.00	0.00	0.00%	0.00%	415,727,540.00
	1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	0.00	0.00	0.00%	0.00%	415,727,540.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0.00	0.00	0.00%	0.00%	435,919,000.00
	1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	0.00	0.00	0.00%	0.00%	435,919,000.00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	173,150,000.00	1,150,000.00	0.00%	0.66%	132,575,000.00
	1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	173,150,000.00	1,150,000.00	0.00%	0.66%	132,575,000.00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	84,270,000.00	81,510,000.00	0.31%	96.72%	1,456,348,000.00
	1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	84,270,000.00	81,510,000.00	0.31%	96.72%	1,456,348,000.00
Jumlah		36,559,435,996.00	26,064,823,147.00	100.00%	71.29%	51,268,572,991.00

Pada Tabel 5.1.2.8 dapat dijelaskan bahwa pengeluaran terbesar digunakan untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp25.982.163.147,00 dan pengeluaran terendah untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan sebesar Rp1.150.000,00.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	210.476.290.881,00	181.344.969.521,00	186.749.598.359,72

Anggaran Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Tahun 2016 sebesar Rp210.476.290.881,00 dan terealisasi sebesar Rp181.344.969.521,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar Rp5.404.628.838,72 atau sebesar 2,89%.



Pada Tabel 5.1.19 dapat dijelaskan bahwa belanja terbesar digunakan untuk Belanja Modal Pengadaan Jalan sebesar Rp107.813.181.100,00 dan pengeluaran terendah untuk Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih sebesar Rp31.166.000,00.

Tabel 5.1.19
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	115.745.669.300,00	107.813.181.100,00	59,45%	93,15%	155.132.748.944,72
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	105.103.769.300,00	98.193.583.100,00	54,15%	93,43%	149.567.610.944,72
	2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.641.900.000,00	9.619.598.000,00	5,30%	90,39%	5.565.138.000,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	8.663.097.400,00	7.863.269.000,00	4,34%	90,77%	11.062.472.187,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	8.435.697.400,00	7.652.079.000,00	4,22%	90,71%	11.027.572.187,00
	2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	0,00	0,00	0,00%	0,00%	34.900.000,00
	3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	227.400.000,00	211.190.000,00	0,12%	92,87%	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	18.923.745.881,00	16.372.577.491,00	9,03%	86,52%	6.555.467.000,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	18.188.647.000,00	15.637.478.610,00	8,62%	85,97%	6.070.264.000,00
	2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	735.098.881,00	735.098.881,00	0,41%	100,00 %	485.203.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.201.750.000,00	1.100.000.000,00	0,61%	91,53%	0,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.201.750.000,00	1.100.000.000,00	0,61%	91,53%	0,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	5.932.684.900,00	3.854.726.800,00	2,13%	64,97%	7.425.458.608,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.932.684.900,00	3.854.726.800,00	2,13%	64,97%	1.070.148.000,00
	2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.076.968.608,00
	3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	278.342.000,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	452.850.000,00	201.539.000,00	0,11%	44,50%	0,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	452.850.000,00	201.539.000,00	0,11%	44,50%	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.069.725.800,00	740.430.000,00	0,41%	69,22%	3.520.252.000,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.069.725.800,00	740.430.000,00	0,41%	69,22%	3.520.252.000,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	3.118.623.400,00	0,00	0,00%	0,00%	327.356.000,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	3.118.623.400,00	0,00	0,00%	0,00%	327.356.000,00
	2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	77.750.000,00	31.166.000,00	0,02%	40,08%	26.950.000,00
	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah	30.000.000,00	29.000.000,00	0,02%	96,67%	0,00
	2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.950.000,00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	37.750.000,00	2.166.000,00	0,00%	5,74%	20.000.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	181.520.000,00	181.040.000,00	0,10%	99,74%	0,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	181.520.000,00	181.040.000,00	0,10%	99,74%	0,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	749.500.000,00	532.037.750,00	0,29%	70,99%	1.039.245.000,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	749.500.000,00	532.037.750,00	0,29%	70,99%	1.039.245.000,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00%	0,00%	72.821.000,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	0,00	0,00	0,00%	0,00%	72.821.000,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	101.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	101.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	37.129.024.200,00	27.680.785.800,00	15,26%	74,55%	794.925.000,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	37.129.024.200,00	27.680.785.800,00	15,26%	74,55%	794.925.000,00
21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	17.129.300.000,00	14.974.216.580,00	8,26%	87,42%	787.637.420,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	16.928.250.000,00	14.774.166.580,00	8,15%	87,28%	757.637.420,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	201.050.000,00	200.050.000,00	0,11%	99,50%	30.000.000,00
22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.265.200,00
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.265.200,00
J U M L A H		210.476.290.881,00	181.344.969.521,00	100,00%	86,16%	186.749.598.359,72

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	12.998.299.250,00	7.402.997.750,00	14.193.174.925,00

Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp12.998.299.250,00 dan terealisasi sebesar Rp7.402.997.750,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar Rp6.790.177.175,00 atau sebesar 47,84%. Pada Tabel 5.1.20 di bawah dapat dijelaskan bahwa belanja terbesar digunakan untuk Belanja modal Pengadaan Buku sebesar Rp4.328.357.300,00 dan pengeluaran terendah untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya sebesar Rp161.050.000,00.

Tabel 5.1.20
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9,000,956,800.00	4,328,357,300.00	58.47%	48.09%	0.00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	220,348,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Dokumen Perencanaan	8,780,608,800.00	4,328,357,300.00	58.47%	49.29%	0.00



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2015 (Rp)
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	472,167,375.00
	1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	0.00	0.00	0.00%	0.00%	472,167,375.00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	210,000,000.00	208,850,000.00	2.82%	99.45%	25,000,000.00
	1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	200,000,000.00	198,850,000.00	2.69%	99.43%	0.00
	2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.14%	100.00%	25,000,000.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	198,400,000.00	161,050,000.00	2.18%	81.17%	7,500,000.00
	1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air	198,400,000.00	161,050,000.00	2.18%	81.17%	0.00
	2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0.00	0.00	0.00%	0.00%	7,500,000.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	3,588,942,450.00	2,704,740,450.00	36.54%	75.36%	13,688,507,550.00
	1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90,000,000.00
	2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	0.00	0.00	0.00%	0.00%	17,500,000.00
	3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	3,588,942,450.00	2,704,740,450.00	36.54%	75.36%	13,581,007,550.00
J U M L A H		12,998,299,250.00	7,402,997,750.00	100.00%	56.95%	14,193,174,925.00

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	336.020.750,00	0,00

Pos Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial, dan keperluan belanja tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp336.020.750,00.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.3. Transfer Bantuan Keuangan	194.728.210.795,00	182.368.336.242,00	184.952.218.653,95

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diklasifikasikan dalam Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik. Anggaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp194.728.210.795,00 dan terealisasi sebesar Rp182.368.336.242,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar Rp2.583.882.411,95 atau sebesar 1,40%. Pada Tabel 5.1.21 menjelaskan secara rinci tentang anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2016.

Tabel 5.1.21
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	194,028,210,795.00	181,668,402,842.00	99.62%	93.63%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecaamatan Batulicin*)	8,915,550,000.00	8,366,884,790.00	4.59%	93.85%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Kusan Hilir*)	43,145,600,000.00	40,367,806,406.00	22.14%	93.56%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecaamatan Kusan Hulu*)	26,727,900,000.00	25,160,216,157.00	13.80%	94.13%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecaamatan Satu*)	22,361,800,000.00	20,969,285,158.00	11.50%	93.77%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecaamatan Sungai Loban*)	22,886,750,000.00	21,626,754,951.00	11.86%	94.49%



No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Simpang Empat*)	13,607,150,000.00	12,934,966,667.00	7.09%	95.06%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Karang Bintang*)	15,358,650,000.00	14,476,304,895.00	7.94%	94.26%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Mantewe*)	17,467,010,795.00	16,001,776,352.00	8.77%	91.61%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Angsana*)	12,800,650,000.00	12,041,284,026.00	6.60%	94.07%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Kuranji*)	9,601,950,000.00	9,037,923,440.00	4.96%	94.13%
	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa*)	1,155,200,000.00	685,200,000.00	0.38%	59.31%
2	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa*)	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	700,000,000.00	699,933,400.00	0.38%	99.99%
	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	700,000,000.00	699,933,400.00	0.38%	99.99%
Jumlah		194,728,210,795.00	182,368,336,242.00	100.00%	93.65%

Untuk Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terjadi pengurangan realisasi sebesar Rp38.122.170,00 dikarenakan adanya pengembalian oleh Partai Persatuan Pembangunan yang disetor ke Kas Daerah pada tanggal 7 Maret 2017.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.4. Surplus/Defisit	(17.329.781.317,20)	81.027.520.263,65	(38.770.221.710,70)

Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menganggarkan Defisit Anggaran sebesar (Rp17.329.781.317,20) namun Surplus Anggaran terjadi sebesar Rp81.027.520.263,65. Jika dibandingkan dengan Defisit Anggaran yang terjadi di Tahun 2015, terjadi peningkatan Surplus Anggaran sebesar Rp119.797.741.974,35 atau sebesar 308,99%. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah realisasi pendapatan lebih besar dibanding realisasi belanja.

5.1.5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi penerimaan maupun pengeluaran dan perlu dibayar atau diterima kembali.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan	42.513.194.185,20	42.513.194.185,20	93.572.727.853,90

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarannya diperuntukkan menutup defisit anggaran. Jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan yang terjadi di Tahun 2015, terjadi penurunan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp51.059.533.668,70 atau sebesar 54,57%. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel Tabel 5.1.22

Tabel Tabel 5.1.22
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	42,513,194,185.20	42,513,194,185.20	100.00%	93,072,727,853.90
2	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00%	500,000,000.00
Jumlah		42,513,194,185.20	42,513,194,185.20	100.00	93,572,727,853.90



Dari Tabel 5.1.22 di atas dapat dijelaskan bahwa persentase realisasi penerimaan pembiayaan dari anggaran pada tahun 2016 sebesar 100,00%.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan	25.183.412.868,00	22.365.791.525,33	12.294.658.016,00

Pengeluaran pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang akan diterima kembali, dimana dalam penganggarnya untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp25.183.412.868,00 dan terealisasi sebesar Rp22.365.791.525,33. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp12.294.658.016,00, terjadi peningkatan sebesar Rp10.071.133.509,33 atau sebesar 81,91%. Tabel 5.1.23. menjelaskan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016.

Tabel 5.1.23
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Lebih/ Kurang
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	8.950.000.000,00	40,02%	81,36%	2.050.000.000,00
1	Penyertaan Modal pada BUMD	11.000.000.000,00	8.950.000.000,00	40,02%	81,36%	2.050.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	14.183.412.868,00	13.415.791.525,33	59,98%	94,59%	767.621.342,67
1	Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga	14.183.412.868,00	13.415.791.525,33	59,98%	94,59%	767.621.342,67
	Jumlah	25.183.412.868,00	22.365.791.525,33	100,00%	88,81%	2.817.621.342,67

Dari Tabel 5.1.23 di atas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2016 berasal dari:

1. Realisasi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp8.950.000.000,00 yang terdiri dari PDAM sebesar Rp 3.950.000.000,00 dan Bank Kalsel sebesar Rp5.000.000.000,00.
2. Pembayaran Pokok Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp13.415.791.525,33.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.6. Pembiayaan Netto	17.329.781.317,20	20.147.402.659,87	81.278.069.837,90

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada Tahun 2016 pembiayaan netto dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp17.329.781.317,20 dan terealisasi sebesar Rp20.147.402.659,87 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp61.130.667.178,03 atau sebesar 75,21% jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2015.

	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)
5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	101.174.922.923,52	42.507.848.127,20

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja ditambah dengan pembiayaan netto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran



(SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp101.174.922.923,52. Jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi di Tahun 2015, maka terjadi peningkatan sebesar Rp58.667.074.796,32 atau sebesar 138,01%. Tabel 5.1.24 menjelaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016.

Tabel 5.1.24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran 2016

No	Tertampung Pada:	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	84,353,341,935.45
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2,494,500.00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000.00
4	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	121,359,142.00
5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	14,111,130,937.07
6	Kas di Puskesmas sebagai Dana Kapitasi JKN	2,585,596,409.00
Jumlah		101,174,922,923.52





5.2. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ataupun Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA dan SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2016 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	42.513.194.185,20	93.072.727.853,90

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal sebesar Rp42.513.194.185,20 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2015. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2015. Nilai SAL awal per 1 Januari 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp42.513.194.185,20 dan Rp93.072.727.853,90 sehingga terjadi penurunan saldo sebesar Rp50.559.533.668,70 atau sebesar 54,32% dari jumlah SAL awal tahun 2015.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	42.513.194.185,20	93.072.727.853,90

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2016 adalah seluruh SAL akhir tahun 2015. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2016 adalah sebesar Rp42.513.194.185,20.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	101.174.922.923,52	42.507.848.127,20

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp101.174.922.923,52. Perhitungan nilai SiLPA Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 5.2.1. berikut:

Tabel 5.2.1
Perhitungan Nilai SiLPA
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	SiLPA Tahun 2015	42,513,194,185.20
2	Realisasi Pendapatan LRA	1,464,602,376,843.95
3	Realisasi Belanja LRA	(1,383,574,856,580.30)
4	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan LRA	(22,365,791,525.33)
SiLPA Tahun 2015		101,174,922,923.52



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	5.346.058,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.346.058,00.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	101.174.922.923,52	42.513.194.185,20

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp101.174.922.923,52 dan Rp42.513.194.185,20 sehingga terjadi kenaikan saldo sebesar Rp58.661.728.738,32 atau sebesar 137,98% dari jumlah SAL akhir tahun 2015.

Rincian Saldo Akhir Kas dapat terlihat pada Tabel 5.2.2. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2
Saldo Anggaran Lebih Akhir
Per 31 Desember 2016

No	URAIAN	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Saldo Akhir Kas di BUD	84,353,341,935.45	33,960,967,454.93	50,392,374,480.52	148.38%
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	14,111,130,937.07	7,155,819,994.27	6,955,310,942.80	97.20%
3	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	2,585,596,409.00	1,386,036,576.00	1,199,559,833.00	86.55%
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000.00	4,011,160.00	(3,011,160.00)	-75.07%
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2,494,500.00	6,359,000.00	(3,864,500.00)	-60.77%
6	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	121,359,142.00	0.00	121,359,142.00	0.00%
Saldo Akhir Kas di BUD		101,174,922,923.52	42,513,194,185.20	58,661,728,738.32	137.98%



5.3. KOMPONEN - KOMPONEN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1. Aset	3.044.134.990.248,35	2.930.134.205.448,03

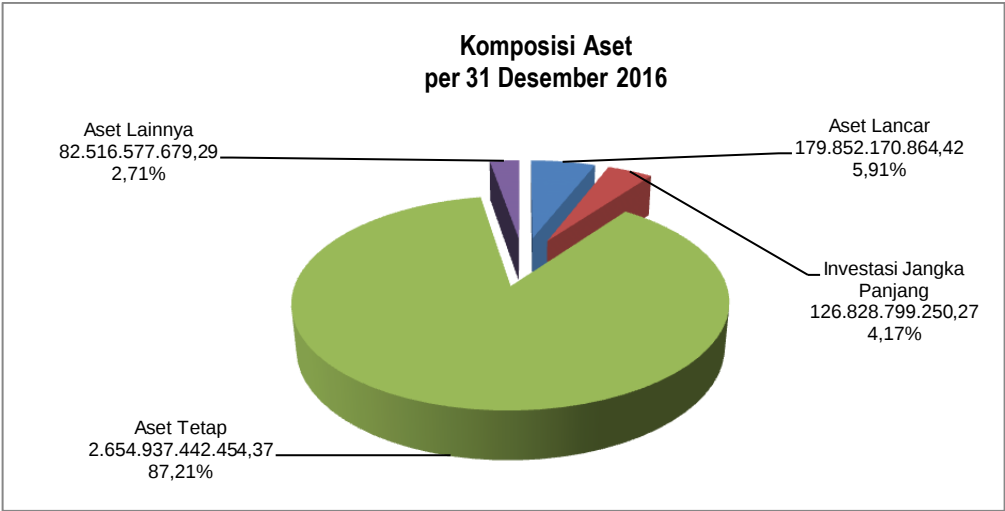
Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp3.044.134.990.248,35 dan Rp2.930.134.205.448,03. Saldo Aset per 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp114.000.784.800,32 atau sebesar 3,89% dari Saldo Aset per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	179,852,170.864.42	134,490,423,902.62	45,361,746,961.80	33.73%
2	Investasi Jangka Panjang	126,828,799,250.27	144,074,765,836.02	(17,245,966,585.75)	-11.97%
3	Aset Tetap	2,654,937,442,454.37	2,633,919,429,096.10	21,018,013,358.27	0.80%
4	Aset Lainnya	82,516,577,679.29	17,649,586,613.29	64,866,991,066.00	367.53%
Jumlah		3,044,134,990,248.35	2,930,134,205,448.03	114,000,784,800.32	3.89%

Komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 dapat digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 5.3.1
Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Per 31 Desember 2016



Penjelasan dari keempat unsur Aset sebagai berikut:

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	179.852.170.864,42	134.490.423.902,62

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp179.852.170.864,42 dan Rp134.490.423.902,62. Saldo Aset per 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp45.361.746.961,80 atau sebesar 33,73% dari Saldo Aset per 31 Desember 2015.



Penjelasan dari unsur dalam kepemilikan Aset Lancar Per 31 Desember 2016 adalah:

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	84.353.341.935,45	33.960.967.454,93

Saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp84.353.341.935,45 dan Rp33.960.967.454,93. Saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp50.392.374.480,52 atau sebesar 148,38% dari saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2015, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Mutasi Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	33,960,967,454.93 (+)
Penerimaan Kas Daerah:	
- Pendapatan	1,405,123,451,445.15
- Penerimaan Pembiayaan	0.00 (+)
	1,405,123,451,445.15 (+)
Pengurangan Kas Daerah untuk SKPD:	
- SP2D LS	1,145,939,305,199.63
- SP2D UP	11,600,000,000.00
- SP2D GU	108,597,496,880.00
- SP2D TU	94,784,646,099.00 (+)
	1,360,921,448,178.63 (-)
Setoran Bendahara Pengeluaran / BLUD ke Kas Daerah:	
- Pengembalian Belanja Bendahara Pengeluaran	1,154,312,588.00
- Setoran Sisa SP2D UP/TU Bendahara Pengeluaran	5,025,861,329.00
- Setoran Bendahara Penerimaan	6,359,000.00
- Setoran Bendahara Pengeluaran	4,011,160.00 (+)
	6,190,544,077.00 (+)
Piutang BRI (Kesalahan Pencairan Penerimaan Kas Daerah)	72.00 (+)
Pengembalian Pendapatan	172,935.00 (-)
Saldo Akhir	84,353,341,935.45

Kas di Kas Daerah terdiri dari rekening giro dan deposito berjangka 1 (satu) bulan. Adapun rincian Kas Di Kas Daerah untuk per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No. Rekening	Nama Rekening	Pada Bank	Saldo Kas 2016	Saldo Kas 2015
010 00 03 00006.4	Kas Umum Daerah Kab. Tanah Bumbu	Bank Kalsel	68,158,965,660.24	8,453,992,167.09
010 00 03 00010.6	Bantuan Provinsi Kal- Sel	Bank Kalsel	1,534,227,969.50	771,873.50
0126- 01- 000568- 30- 3	Kas Umum Daerah Kab. Tanah Bumbu	BRI	14,654,565,589.71	5,083,007,664.34
0126- 01- 000600- 40- 6	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BRI	0.00	0.00
0126- 01- 000593- 40- 5	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BRI	0.00	0.00
0126- 01- 000926- 40- 4	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BRI	0.00	5,000,000,000.00
0126- 01- 000927- 40- 0	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BRI	0.00	5,000,000,000.00
00255.01.40.000043.7	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	0.00
00255- 01- 40- 000083- 5	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	1,000,000,000.00
00255- 01- 40- 000084- 3	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	1,000,000,000.00
00255- 01- 40- 000085- 1	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	1,000,000,000.00
00255- 01- 40- 000086- 9	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	1,000,000,000.00



No. Rekening	Nama Rekening	Pada Bank	Saldo Kas 2016	Saldo Kas 2015
00255- 01- 40- 000087- 7	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	1,000,000,000.00
00255- 01- 40- 000074- 6	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BTN	0.00	423,195,750.00
PAA 0434416	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BNI	0.00	1,000,000,000.00
PAA 0434417	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BNI	0.00	1,000,000,000.00
PAA 0434418	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BNI	0.00	1,000,000,000.00
PAA 0220704	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BNI	0.00	1,000,000,000.00
PAA 0220705	Pemkab Tanah Bumbu (Deposito)	BNI	0.00	1,000,000,000.00
Jumlah			84,347,759,219.45	33,960,967,454.93

Antara Saldo Kas Daerah di Rekening Koran dengan Saldo di Buku Kas Umum Daerah terdapat selisih sebesar Rp5.582.716,00, ini dikarenakan adanya kelebihan setor pajak sebesar Rp5.582.644,00 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 10 Maret 2017 dan kesalahan pencatatan penerimaan Pajak Daerah oleh Bank BRI sebesar Rp72,00 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 9 Januari 2017.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00	4.011.160,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas dari aktivitas operasi SKPD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp4.011.160,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp3.011.160,00 atau sebesar 75,07% dari Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.000.000,00 merupakan pengembalian belanja tunjangan sertifikasi guru tahun 2016, dan sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 28 Februari 2017.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	2.494.500,00	6.359.000,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.494.500,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp3.864.500,00 atau sebesar 60,77% dari Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015. Saldo kas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.494.500,00 yang masih ada di Puskesmas dan sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 03 dan 04 Januari 2017. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan
Per 31 Desember 2016

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH (Rp)	DISETOR KE KASDA	
			TANGGAL	NILAI (Rp)
1	PUSKESMAS TELUK KEPAYANG	210,000.00	03/Jan/17	210,000.00
2	PUSKESMAS DARUL AZHAR	165,000.00	03/Jan/17	165,000.00
3	PUSKESMAS PAGATAN	70,000.00	03/Jan/17	70,000.00
4	PUSKESMAS BATULICIN I	215,000.00	03/Jan/17	215,000.00
5	PUSKESMAS SEBAMBAN I	10,000.00	03/Jan/17	10,000.00



NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH (Rp)	DISETOR KE KASDA	
			TANGGAL	NILAI (Rp)
6	PUSKESMAS SEBAMBAN II	202,000.00	03/Jan/17	202,000.00
7	PUSKESMAS SATUI	1,307,500.00	03/Jan/17	1,307,500.00
8	PUSKESMAS SIMP EMPAT	120,000.00	04/Jan/17	120,000.00
9	PUSKESMAS GIRI MULIA	30,000.00	04/Jan/17	30,000.00
10	PUSKESMAS MANTEWE	105,000.00	04/Jan/17	105,000.00
11	PUSKESMAS BATULICIN	60,000.00	04/Jan/17	60,000.00
JUMLAH		2,494,500.00		2,494,500.00

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	14.111.130.937,07	7.155.819.994,27

Kas di BLUD merupakan rekening kas yang berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan yang langsung diterima oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dan langsung digunakan sebagai belanja tanpa melalui rekening BUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp14.111.130.937,07 dan sebesar Rp7.155.819.994,27. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp6.955.310.942,80 atau sebesar 97.20% dari saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2015. Saldo Kas di BLUD sebesar Rp14.111.130.937,07 merupakan saldo rekening koran per 31 Desember 2016, yang diperoleh dari:

Tabel 5.3.5
Mutasi Kas di BLUD
Tahun 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal	7,155,819,994.27
Penerimaan	51,339,038,843.80
Pengeluaran	44,383,727,901.00 (-)
SILPA	6,955,310,942.80 (+)
Saldo Akhir	14,111,130,937.07

Jumlah kas di BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp14.111.130.937,07, sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas di BLUD
Per 31 Desember 2016

No	Nomor	Jenis Rekening	Saldo 2016 (Rp)
1	0126- 01- 000633- 30- 2	Giro	14,095,800,101.07
2	-	Uang Tunai	15,330,836.00
Jumlah			14,111,130,937.07

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi JKN	2.585.596.409,00	1.386.079.444,00

Kas Dana Kapitasi JKN merupakan saldo kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola puskesmas di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Saldo Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp2.585.596.409,00 dan sebesar Rp1.386.079.444,00. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp



1.199.516.965,00 atau sebesar 86.54% dari saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2015. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.7
Kas Dana Kapitasi JKN
Per 31 Desember 2016

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	PUSKESMAS PAGATAN	340,924,174.00	1,005,210,000.00	898,677,226.00	447,456,948.00
2	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	103,142,365.00	813,852,000.00	803,143,757.00	113,850,608.00
3	PUSKESMAS BATULICIN	123,950,182.00	710,508,000.00	561,733,493.00	272,724,689.00
4	PUSKESMAS SEBAMBAN I	89,816,667.00	591,048,000.00	450,855,442.00	230,009,225.00
5	PUSKESMAS PULAU TANJUNG	6,013,291.00	118,734,500.00	107,245,085.00	17,502,706.00
6	PUSKESMAS KARANG BINTANG	29,134,676.00	295,933,500.00	235,042,817.00	90,025,359.00
7	PUSKESMAS TELUK KEPAYANG	40,207,906.00	199,777,000.00	195,216,292.00	44,768,614.00
8	PUSKESMAS SATUI	237,704,932.00	1,483,044,000.00	1,236,427,825.00	484,321,107.00
9	PUSKESMAS DARUL AZHAR	56,588,914.00	437,905,000.00	328,661,962.00	165,831,952.00
10	PUSKESMAS BATULICIN I	32,731,880.00	244,896,000.00	235,236,555.00	42,391,325.00
11	PUSKESMAS SEBAMBAN II	59,031,886.00	498,690,000.00	368,651,764.00	189,070,122.00
12	PUSKESMAS MANTEWE	142,349,602.00	813,132,000.00	661,607,529.00	293,874,073.00
13	PUSKESMAS LASUNG	47,742,098.00	471,594,000.00	456,138,976.00	63,197,122.00
14	PUSKESMAS GIRI MULYA	76,698,003.00	365,855,000.00	311,980,444.00	130,572,559.00
J U M L A H		1,386,036,576.00	8,050,179,000.00	6,850,619,167.00	2,585,596,409.00

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.6 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	124.630.106,00	54.122.811,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp61.121.406,00 merupakan saldo :

- Pajak katering tahun 2016 yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran SKPD dan baru disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp64.508.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Pajak Katering)
Per 31 Desember 2016

NO	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bagian Humas	990,000.00
2	Bagian Umum	33,286,300.00
3	Dinas Kesehatan	6,268,600.00
4	Dinas Pendidikan	14,704,800.00
5	Dinas Pendapatan	120,000.00
6	Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	183,000.00
7	Inspektorat	756,000.00
8	Kec. Batulicin	1,545,000.00
9	Kec. Karang Bintang	5,775,000.00
10	Kec. Mentewe	700,000.00
11	Kel. Kampung Baru	180,000.00
Jumlah		64,508,700.00

- PPh pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai pada Kelurahan Batulicin telah dipungut tahun 2016, dan baru disetor kas daerah pada tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp1.150.000,00.



- Akumulasi pendapatan bunga bank dikurangi administrasi pajak yang ada di rekening Bendahara BOP/BOMM pada Dinas Pendidikan sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 (sejak penetapan dana BOP/BOMM langsung masuk ke rekening Bendahara) sebesar Rp56.850.442,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran BOP/BOMM
Per 31 Desember 2016

NO	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Saldo Akhir Dana BOP pada TK	3,184,703.00
2	Saldo Akhir Dana BOP pada 180 SDN/MIN	33,072,488.00
3	Saldo Akhir Dana BOP pada SMPN/MTSN	13,935,529.00
4	Saldo Akhir Dana BOMM pada 16 SMAN/SMKN	6,657,722.00
Jumlah		56,850,442.00

- PFK pada Kecamatan Karang Bintang yang telah dipungut tahun 2016, dan sudah disetorkan pada tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp2.120.964,00 berupa:
- PPh 21 sebesar Rp865.000,00;
 - PPh 22 sebesar Rp22.073,00;
 - PPh 23 sebesar Rp762.300,00;
 - PPn sebesar Rp471.591,00.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas Lainnya di Bendahara BOS	771.235.874,00	1.190.582.533,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara BOS per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp771.235.874,00 dan Rp1.190.582.533,00. Saldo kas lainnya di bendahara BOS mengalami kenaikan sebesar Rp419.346.659,00 atau sebesar 35,22%. Kas Lainnya di Bendahara BOS merupakan saldo dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di rekening Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Tanah Bumbu yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dana BOS yang dikelola oleh Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami koreksi saldo awal dan mutasi dari pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Kas Lainnya di Bendahara BOS
Tahun 2016

No	Uraian	Saldo 2015	Koreksi Tambah (Kurang) Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Total Penerimaan	Total Pengeluaran	Saldo Akhir
1	SD	902,555,844.00	(12,998,025.00)	889,557,819.00	26,355,068,609.00	26,757,842,395.00	486,784,033.00
2	SMP	288,026,689.00	2,763,446.00	290,790,135.00	10,666,535,796.00	10,672,874,090.00	284,451,841.00
Jumlah		1,190,582,533.00	(10,234,579.00)	1,180,347,954.00	37,021,604,405.00	37,430,716,485.00	771,235,874.00

Koreksi tambah saldo awal sebagaimana tersebut pada tabel di atas didapat dari rekonsiliasi dengan bendahara sekolah, dimana terdapat penerimaan bunga tabungan, pajak bunga tabungan dan biaya administrasi bank yang belum tercatat. Sisa Kas pada Bendahara BOS SMA/SMK Negeri tidak termasuk dalam saldo Kas Lainnya di Bendahara BOS tahun 2016 karena wewenang pengelolaan SMA/SMK Negeri telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 30 September 2016.



	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.9 Piutang Pajak	28.477.373.852,00	30.832.888.233,00

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Termasuk dalam pos ini adalah piutang pajak daerah yang berumur lebih dari 12 (dua belas) bulan tapi belum dikategorikan sebagai piutang pajak daerah yang kadaluwarsa. Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp28.477.373.852,00 dan Rp30.832.888.233,00. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.355.514.381,00 atau sebesar 7,64%. Saldo piutang pajak adalah piutang pajak setelah penghapusbukuan piutang, sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2016

N o	Jenis Pajak	Saldo Awal	Koreksi Tambah Saldo Awal	Koreksi Kurang Saldo Awal	SKP Daerah Tahun 2016	Setoran Ke Kasda Tahun 2016	Saldo Akhir Sebelum Penghapusbukuan	Penghapusbukuan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 - 5 + 6 - 7	9	10 = 8 - 9
1	Pajak Hotel	488.160.00	0.00	0.00	4.571.833.00	0.00	5.059.993.00	488.160.00	4.571.833.00
2	Pajak Air Bawah Tanah	0.00	0.00	0.00	2.154.800.00	0.00	2.154.800.00	0.00	2.154.800.00
3	Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	16.289.250.00	0.00	16.289.250.00	0.00	16.289.250.00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00	0.00	113.705.301.00	0.00	113.705.301.00	0.00	113.705.301.00
5	Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	1.020.238.387.00	0.00	1.020.238.387.00	0.00	1.020.238.387.00
6	Pajak Restoran	10.377.750.00	0.00	0.00	158.120.923.00	0.00	168.498.673.00	10.377.750.00	158.120.923.00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.822.022.323.00	166.825.229.00	18.191.932.00	3.530.348.897.00	2.262.414.880.00	32.238.589.637.00	5.076.296.279.00	27.162.293.358.00
Jumlah		30.832.888.233.00	166.825.229.00	18.191.932.00	4.845.429.391.00	2.262.414.880.00	33.564.536.041.00	5.087.162.189.00	28.477.373.852.00

Dengan diberlakukannya akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Daerah berbasis akrual dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2014, dimana dalam setiap piutang harus diperhitungkan penyisihannya sesuai umur piutang dan untuk piutang yang telah disisihkan sebesar 100%, akan dihapusbukukan. Sedangkan perhitungan penyisihan Piutang Pajak dan piutang pajak netto sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak
Tahun 2016

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo Buku (Rp)
Pajak Hotel	2016	0	4.571.833.00	0.00	4.571.833.00
Pajak Air Bawah Tanah	2016	0	2.154.800.00	0.00	2.154.800.00
Pajak Hiburan	2016	0	16.289.250.00	0.00	16.289.250.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2016	0	113.705.301.00	0.00	113.705.301.00
Pajak Penerangan Jalan	2016	0	1.020.238.387.00	0.00	1.020.238.387.00
Pajak Restoran	2016	0	158.120.923.00	0.00	158.120.923.00
PBB P2	2015	1	23.631.944.461.00	12.598.526.798.80	11.033.417.662.20
PBB P2	2016	0	3.530.348.897.00	0.00	3.530.348.897.00
Jumlah			28.477.373.852.00	12.598.526.798.80	15.878.847.053.20

Adapun Piutang Pajak yang dihapusbukukan sebagai berikut:



Tabel 5.3.13
Piutang Pajak Yang Dihapusbukukan
Tahun 2016

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Umur Piutang	Jumlah	Dihapusbukukan	Saldo Buku
Hotel	2011	5	248.160.00	248.160.00	0.00
Hotel	2011	5	240.000.00	240.000.00	0.00
Restoran	2011	5	5.487.750.00	5.487.750.00	0.00
Restoran	2011	5	350.000.00	350.000.00	0.00
Restoran	2011	5	3.017.000.00	3.017.000.00	0.00
Restoran	2011	5	1.523.000.00	1.523.000.00	0.00
PBB P2	2011	5	5.076.296.279.00	5.076.296.279.00	0.00
Jumlah			5.087.162.189.00	5.087.162.189.00	0.00

Piutang PBB P2 merupakan pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menyelesaikan validasi Piutang PBB P2 hasil pelimpahan tersebut menjadi enam kategori sebagai berikut:

1. Piutang PBB P2 telah dibayar dilengkapi dengan bukti pembayaran;
2. Piutang PBB P2 telah dibayar tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran;
3. Piutang PBB P2 belum dibayar, kondisi Wajib Pajak tidak mampu;
4. Piutang PBB P2 belum dibayar, kondisi Wajib Pajak Mampu;
5. Objek Pajak dan Wajib Pajak tidak sesuai/telah berubah; dan
6. Objek Pajak tidak jelas dan Wajib Pajak tidak ditemukan.

Hasil validasi tersebut akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian sisa Piutang PBB P2 atas enam kategori tersebut dapat dilihat pada (lampiran 1.1)

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.9 Piutang Retribusi	751.685.825,00	1.210.200.000,00

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung saldo tagihan retribusi Daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu dua belas bulan kedepan, termasuk dalam pos ini adalah piutang retribusi daerah yang berumur lebih dari dua belas bulan tapi belum dikategorikan sebagai piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp751.685.825,00 dan Rp1.210.200.000,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp458.514.175,00 atau sebesar 37,89% dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015. Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 yang dikelola SKPD sebagai berikut:



Tabel 5.3.14
Mutasi Piutang Retribusi
Tahun 2016

No	Uraian	Dinas Pertambangan dan Energi	Dinas Pasar	
		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Retribusi Pelayanan Parkir	Retribusi Pelayanan Pasar
1	Saldo Awal	1.210.200.000.00	0.00	0.00
2	Koreksi Tambah Saldo Awal	12.100.000.00	0.00	0.00
3	Koreksi Kurang Saldo Awal	36.300.000.00	0.00	0.00
4	SKR Daerah Tahun 2016	0.00	76.650.000.00	681.748.830.00
5	Pelunasan Piutang Tahun 2015	147.300.000.00	0.00	0.00
6	Pembayaran SKRD Tahun 2016	0.00	74.650.000.00	609.863.005.00
7	Kelebihan Setor	2.100.000.00	0.00	0.00
8	Saldo Sebelum Penghapusbukuan (1+2+3- 4+5)	1.040.800.000.00	2.000.000.00	71.885.825.00
9	Penghapusbukuan	363.000.000.00	0.00	0.00
	Saldo Akhir (8-9)	677.800.000.00	2.000.000.00	71.885.825.00

Kelebihan setor piutang yang terdapat pada Retribusi Cetak Peta Dinas Pertambangan sebesar Rp2.100.000,00 diakui sebagai Lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Cetak Peta dan Piutang Retribusi Cetak Peta Netto pada Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut:

Tabel 5.3.15
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Cetak Peta
Pada Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2016

Tahun SKRD	Umur Piutang Lebih Dari	Jumlah (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Buku 2016 (Rp)
2012	4	181,600,000.00	145,280,000.00	36,320,000.00
2013	3	314,700,000.00	188,820,000.00	125,880,000.00
2014	2	181,500,000.00	72,600,000.00	108,900,000.00
Jumlah		677,800,000.00	406,700,000.00	271,100,000.00

Piutang Retribusi cetak peta masuk pada kategori piutang tak tertagih dan akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Tabel 5.3.16
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Parkir
Pada Dinas Pasar
Tahun 2016

Tahun SKRD	Umur Piutang Lebih Dari	Jumlah (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Buku 2016 (Rp)
2015	1	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00
2015	1	71,885,825.00	14,377,165.00	57,508,660.00
Jumlah		73,885,825.00	14,777,165.00	59,108,660.00

Adapun Penghapusbukuan Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 5.3.17
Perhitungan Penghapusbukuan Piutang Retribusi Cetak Peta
Pada Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2016

Tahun SKRD	Umur Piutang Lebih Dari	Jumlah Piutang	Dihapusbukukan	Nilai Buku 2016
Retribusi Cetak Peta Pertambangan Dinas DISTAMBEN				
2011	5	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00
2011	5	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00
2011	5	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00



5.3.1.1.10 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Tabel 5.3.18
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tersebut merupakan:

- Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV 2016 sebesar Rp18.130.315.685,98 berdasarkan



Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8,9,10, dan 78 Tahun 2017;

- Kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2015 sebesar Rp389.427.155,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2016;

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi atas Pajak Rokok telah diterima di Kas Daerah tanggal 22 Februari Tahun 2017 sebesar Rp2.264.539.557,00.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.11 Belanja Dibayar di Muka	261.763.485,29	241.520.898,35

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp261.763.485,29 dan Rp241.520.898,35. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 merupakan perhitungan sisa masa sewa gedung yang dibayar pada tahun 2016 oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp20.242.586,94 atau sebesar 8,38% dari saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015. Rincian Belanja Dibayar di Muka sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Belanja Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Keterangan	Beban Sewa per Hari (Rp)	Sewa Tahun 2016		Sewa Tahun 2017	
			Hari	Jumlah	Hari	Jumlah
1	Pembayaran sewa Mess Pemda Tanah Bumbu	68.493.15	359	24.589.041.10	6	410.958.90
2	Pembayaran Sewa Mess Pemda Tanah Bumbu	68.493.15	359	24.589.041.10	6	410.958.90
3	Pembayaran Biaya Sewa Kontrak Gedung Kantor Unit Pelayanan Perpustakaan Daerah Kec. Kusan Hilir	81.967.21	336	27.540.983.61	30	2.459.016.39
4	Pembayaran Biaya Sewa Gedung Kantor Unit Pelayanan Perpustakaan Daerah Kec. Batulicin	95.628.42	336	32.131.147.54	30	2.868.852.46
5	Pembayaran Biaya Perpanjangan Sewa Kontrak Asrama Mahasiswa Tanah Bumbu Putra di Makassar	191.780.82	268	51.397.260.27	97	18.602.739.73
6	Pembayaran Biaya Sewa Kontrak Asrama Mahasiswa Tanah Bumbu Putri di Yogyakarta	136.986.30	303	41.506.849.32	62	8.493.150.68
7	Pembayaran Biaya Perpanjangan Kontrak Asrama Mahasiswa Putra Tanah Bumbu Malang	219.178.08	247	54.136.986.30	118	25.863.013.70
8	Pembayaran Biaya Perpanjangan Sewa Kantor Penyimpanan dan Peralatan Logistik BPBD Tanah Bumbu	73.972.60	359	26.556.164.38	6	443.835.62
9	Pembayaran Biaya Perpanjangan Sewa Asrama Mahasiswa Malang	219.178.08	213	46.684.931.51	152	33.315.068.49
10	Pembayaran Biaya Perpanjangan Asrama Mahasiswa Putri Tanah Bumbu di Banjarbaru	90.410.96	183	16.545.205.48	182	16.454.794.52
11	Pembayaran Perpanjangan Sewa Asrama Mahasiswa Putra 2 Tanah Bumbu di Banjarmasin	93.150.68	152	14.158.904.11	213	19.841.095.89
12	Pembayaran Perpanjangan Sewa Asrama Mahasiswa Putra Tanah Bumbu di Banjarbaru	90.410.96	152	13.742.465.75	213	19.257.534.25
13	Pembayaran Biaya Sewa Kontrak Asrama Mahasiswa Putra Tanah Bumbu di Pare Pare	95.890.41	152	14.575.342.47	213	20.424.657.53
14	Pembayaran Biaya Sewa Kontrak Asrama Mahasiswa Putri Tanah Bumbu di Pare Pare	95.890.41	152	14.575.342.47	213	20.424.657.53
15	Pembayaran Biaya Perpanjangan Sewa Kontrak Asrama Mahasiswa Tanah Bumbu Putri di Makassar	136.986.30	91	12.465.753.42	274	37.534.246.58
16	Pembayaran biaya sewa Mess Anggaran Kab. Tanah Bumbu	150.684.93	133	20.041.095.89	232	34.958.904.11
JUMLAH				435.236.514.72		261.763.485.28



	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.12 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	804.337.000,00	921.637.000,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp804.337.000,00 dan Rp921.637.000,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp117.300.000,00 atau sebesar 12,73% dari saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2015. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan penjualan angsuran yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2016 dan yang akan jatuh tempo pada 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Penjualan Angsuran tersebut berasal dari pengadaan *Hand Tractor* Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya diserahkan kepada petani dengan suatu perikatan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut petani harus mengembalikan harga *Hand Tractor* tersebut dalam jangka waktu 4 tahun.

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut:

Tabel 5.3.20
Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
per 31 Desember 2016

No	Tahun Perjanjian	Saldo Awal	Mutasi dari Tagihan Penjualan Angsuran	Angsuran pada Tahun 2016	Saldo Sebelum Penghapusbukuan	Penghapusbukuan	Saldo Akhir
1	2008	117,300,000.00	0.00	0.00	117,300,000.00	117,300,000.00	0.00
2	2011	114,337,000.00	0.00	0.00	114,337,000.00	0.00	114,337,000.00
3	2012	690,000,000.00	0.00	0.00	690,000,000.00	0.00	690,000,000.00
Jumlah		921,637,000.00	0.00	0.00	921,637,000.00	117,300,000.00	804,337,000.00

Sedangkan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Tahun 2016

No	Tahun Perjanjian	Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran s/d 2015	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun Berjalan	Nilai Buku (Rp)
1	2008	117.300.000.00	104.870.000.00	12.430.000.00	0.00
2	2011	114.337.000.00	80.509.600.00	20.187.400.00	13.640.000.00
3	2012	690.000.000.00	66.500.000.00	138.000.000.00	485.500.000.00
Jumlah		921.637.000.00	251.879.600.00	170.617.400.00	499.140.000.00

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.13 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.040.095.682,52	1.153.811.848,50

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.040.095.682,52 dan Rp1.153.811.848,50. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp113.716.165,98 atau sebesar 9,86% dari saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.231.789.263,12 tagihan yang pada 31 Desember 2016 telah jatuh tempo dan yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca, dengan rincian mutasi sebagai berikut:



Tabel 5.3.22
Mutasi Tuntutan Ganti Rugi
Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Saldo Awal - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - Koreksi Tambah	1,175,253,812.78 <u>221,959,809.34</u> (+) 1,397,213,622.12
2.	Penambahan : - SKTJM 2016	<u>196,193,709.42</u> (+)
3.	Pengurangan : - Setoran ke Kas Daerah	1,593,407,331.54 <u>553,311,649.02</u> (-) 1,040,095,682.52

Adapun Daftar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.23
Daftar Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto
per 31 Desember 2016

No	No SKTJM	Umur Piutang Lebih dari:	Saldo	Penyisihan Piutang	Nilai Buku
1	SKTJM No: 104/MP.TP-TGR/TB/IX/2013, tgl 5 Sept 2013	3	57,925,000.00	34,755,000.00	23,170,000.00
2	SKTJM No: 103/MP.TP-TGR/TB/IX/2013, tgl 5 Sept 2013	3	79,000,000.00	47,400,000.00	31,600,000.00
3	SKTJM No: 062/MP.TP-TGR/TB/IV/2014, tgl 21 April 2014	2	4,946,405.00	1,978,562.00	989,281.00
4	SKTJM No: 23/MP.TP-TGR/TB/II/2013, tgl 17 Juli 2013	3	149,885,206.00	89,931,123.60	59,954,082.40
5	SKTJM No: 24/MP.TP-TGR/TB/II/2013, tgl 17 Juli 2013	3	22,662,321.00	13,597,392.60	9,064,928.40
6	SKTJM No: 115/MP.TP-TGR/TB/IX/2013, tgl 10 Sept 2013	3	108,007,180.00	64,804,308.00	43,202,872.00
7	SKTJM No: 118/MP.TP-TGR/TB/IX/2013, tgl 10 Sept 2013	3	26,875,643.00	16,125,385.80	10,750,257.20
8	SKTJM No: 120/MP.TP-TGR/TB/IX/2013, tgl 10 Sept 2013	3	68,560,860.00	41,136,516.00	27,424,344.00
9	SKTJM No: 119/MP.TP-TGR/TB/IX/2013, tgl 10 Sept 2013	3	155,010,770.00	93,006,462.00	62,004,308.00
10	SKTJM No. 050/MP.TP-TGR/TB/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014	2	73,329,442.93	29,331,777.17	14,665,888.59
11	SKTJM No. 038/MP.TP-TGR/TB/III/2014, Tanggal 4 Maret 2014	2	73,234,363.21	29,293,745.28	14,646,872.64
12	SKTJM No 088/MP.TP-TGR/TB/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014	2	58,829,186.97	23,531,674.79	11,765,837.39
13	SKTJM No 078/MP.TP-TGR/TB/VI/2014 tgl 25 Juni 2014	2	15,386,000.00	6,154,400.00	3,077,200.00
14	SKTJM No 094/MP.TP-TGR/TB/IX/2014 tgl 3 Sep 2014	2	9,938,000.00	3,975,200.00	1,987,600.00
15	SKTJM No. 108/MP.TP-TGR/TB/IV/2014 tanggal 1 April 2014	2	7,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00
16	SKTJM No. 000/MP.TP-TGR/TB/II/2016	1	21,440,775.43	4,288,155.09	4,288,155.09
17	SKTJM No. 04/MP.TP-TGR/TB/I/2016	0	63,408,759.56	0.00	0.00
18	SKTJM No. 07/MP.TP-TGR/TB/II/2016	0	7,662,702.20	0.00	0.00
19	SKTJM No. 06/MP.TP-TGR/TB/I/2016	0	30,592,067.22	0.00	0.00
20	SKTJM No. 017/MP.TP-TGR/TB/III/2016	0	5,901,000.00	0.00	0.00
JUMLAH			1,040,095,682.52	502,309,702.33	320,091,626.71

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.



	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.15 Piutang Lainnya	9.675.974.012,00	22.745.627.157,35

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp9.675.974.012,00 dan Rp22.745.627.157,35. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp13.069.653.145,35 atau sebesar 57,46%. Saldo piutang lainnya merupakan akibat dari kegiatan yang dikelola SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.24
Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2016

No	Nama SKPD / Nama Piutang	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Pembayaran)	Saldo Akhir (Rp)	Penyisihan	Netto (Rp)
			Tambah	Kurang					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4-5+6-7	9	10 = 8 - 9
1	Dinas Pekerjaan Umum								
	- Piutang Uang Muka	3.185.298.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.298.776,00	1.274.119.510,40	1.911.179.265,60
	Jumlah Piutang DPU	3.185.298.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.298.776,00	1.274.119.510,40	1.911.179.265,60
2	Dinas Pendidikan								
	- Piutang Hibah	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00
	Jumlah Piutang Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00
3	RSUD H. Andi Abdurrahman Noor								
	- Piutang Pelayanan Kesehatan kepada Pasien Umum	122.003.269,00	1.118.000,00	0,00	90.160.543,00	84.106.519,00	129.175.293,00	14.980.250,00	114.195.043,00
	- Piutang Pelayanan Kesehatan kepada INHEALTH	32.049.444,00	0,00	0,00	2.618.907,00	20.368.636,00	14.299.715,00	5.455.000,00	8.844.715,00
	- Piutang Pelayanan Kesehatan kepada JAMKESDA	18.169.293.695,00	0,00	0,00	15.653.615.187,00	27.615.021.382,00	6.207.887.500,00	0,00	6.207.887.500,00
	- Piutang Pelayanan Kesehatan kepada JAMKESMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Pelayanan Kesehatan kepada ASKES / BPJS	695.998.500,00	0,00	0,00	13.178.318.374,00	13.843.111.874,00	31.205.000,00	6.241.000,00	24.964.000,00
	- Piutang Pelayanan Kesehatan kepada Perusahaan	223.161.626,00	0,00	0,00	291.325.413,00	466.379.311,00	48.107.728,00	6.116.295,40	41.991.432,60
	- Piutang Bunga Deposito	114.109.513,00	0,00	0,00	0,00	114.109.513,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Jasa Giro	62.573.851,44	0,00	0,00	0,00	62.573.851,44	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Sewa Lahan Parkir	0,00	12.000.000,00	0,00	24.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	- Piutang Sewa Warung	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	15.900.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
	Jumlah Piutang RSUD H. Abdurrahman Noor	19.419.189.898,44	13.118.000,00	0,00	29.269.138.424,00	42.241.571.086,44	6.459.875.236,00	32.792.545,40	6.427.082.690,60
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)								
	- Piutang Bunga Deposito	141.138.482,91	0,00	0,00	0,00	141.138.482,91	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	141.138.482,91	0,00	0,00	0,00	141.138.482,91	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	22.745.627.157,35	13.118.000,00	0,00	29.299.938.424,00	42.382.709.569,35	9.675.974.012,00	1.306.912.055,80	8.369.061.956,20

1. Piutang Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.185.298.776,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.25
Piutang Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2016

No	Uraian	Nomor Kontrak	Jumlah (Rp)	Penyisihan (Rp)	Netto (Rp)
1	PT. Telaga Mega Buana	620/037/KONT.PJLBTM-MY/BM/DPU/2013	1.398.273.500.00	559.309.400.00	838.964.100.00
2	KSO PT. Telaga Mega Buana dan PT. Buana Karya Wiratama	620/056/KONT.PPJTP-T2-MY/BM/DPU/2013	813.893.150.50	325.557.260.20	488.335.890.30
3	PT. Telaga Mega Buana	620/035/KONT.PJBKMR-T2-MY/BM/DPU/2013	973.132.125.50	389.252.850.20	583.879.275.30
	Jumlah		3.185.298.776.00	1.274.119.510.40	1.911.179.265.60

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Piutang Uang Muka Tahun 2014 yang berasal dari uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan dari pekerjaan yang putus kontrak sebesar Rp3.185.298.776,00.

2. Piutang Dinas Pendidikan sebesar Rp30.800.000,00 merupakan penerimaan hibah BOS yang diterima tahun 2017 yang belanjanya sudah terealisasi di tahun 2016;
3. Piutang RSUD Tanah Bumbu sebesar Rp6.459.875.236,00 terdiri dari:
 - Piutang atas Pelayanan Kesehatan kepada Pasien Umum/Perorangan sebesar Rp129.175.293,00;
 - Piutang Inhealth sebesar Rp14.299.715,00 dan
 - Pasien Peserta Jamkesda sebesar Rp6.207.887.500,00 yang terdiri dari:



Tabel 5.3.26
Piutang Pelayanan Kesehatan
Kepada Pasien Peserta Jamkesda
Per 31 Desember 2016

No	No Surat Klaim	Tanggal Surat	Pelayanan Bulan	Jumlah Setelah Diverifikasi
1	090/021/IX-2016/Jamkesda-RSUD	08-Sep-16	Agu-16	1.599.495.700,00
2	090/031/X-2016/Jamkesda-RSUD	11-Ok1-16	Sep-16	1.449.711.200,00
3	090/034/XI-2016/Jamkesda-RSUD	14-Nov-16	Ok1-16	1.565.378.500,00
4	090/035/XII-2016/Jamkesda-RSUD	09-Des-16	Nov-16	1.593.302.100,00
Jumlah				6.207.887.500,00

- Pasien Peserta BPJS sebesar Rp31.205.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.27
Piutang Pelayanan Kesehatan
Kepada Pasien Peserta BPJS
Per 31 Desember 2016

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kekurangan Pembayaran Klaim nomor 090/007/VI- 2015/BPJS- RSUD tanggal 11 Juni 2015	6.800.000,00
2	Kekurangan Pembayaran Klaim nomor 090/008/VI- 2015/BPJS- RSUD tanggal 17 Juni 2015	24.405.000,00
Jumlah		31.205.000,00

- Piutang Perusahaan sebesar Rp48.107.728,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.28
Piutang Pelayanan Kesehatan Kepada Perusahaan
Per 31 Desember 2016

NO	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	PT. Meralus Jaya Iron Steel	6.556.759,00
2	PT. Meralus Jaya Iron Steel	6.301.227,00
3	PT. Meralus Jaya Iron Steel	17.723.491,00
4	PT. Indocemet Tunggal Perkasa	7.186.513,00
5	PT. Dua Samudra Perkasa	1.843.102,00
6	PT. Indocemet Tunggal Perkasa	8.076.536,00
7	PT. Trakindo Utama	420.100,00
Jumlah Piutang Perusahaan		48.107.728,00

- Piutang Sewa Lahan Parkir sebesar Rp16.000.000,00;
- Piutang Sewa Warung sebesar Rp13.200.000,00;

Selain jumlah piutang lain-lain tersebut, masih terdapat piutang lainnya berupa kelebihan setor PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji pegawai dan anggota DPRD. Piutang tersebut belum dapat disajikan karena masih dalam proses klarifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.1.16 Persediaan	33.323.973.051,42	26.331.135.753,12

Persediaan merupakan pos untuk mencatat perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp33.323.973.051,42 dan Rp26.331.135.753,12. Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp6.992.837.298,30 atau sebesar 26,56% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2015. Saldo persediaan ini merupakan hasil *stok opname* yang dilakukan oleh pengurus barang yang berada pada SKPD berdasarkan surat pernyataan cek fisik persediaan yang dibuat para pengurus barang



SKPD. Rincian saldo Persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Persediaan
Per 31 Desember 2016

No	Nama SKPD	Alat Tulis Kantor	Barang Cetak	Obat-obatan	Bahan Kimia	Benda Pos	Perlengkapan Kantor	Alat Kesehatan	Barang Hibah	Belanja barang dan jasa BLUD*)	Jumlah
1	DINKES	0.00	0.00	4.112.492.718.00	467.571.645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.580.064.363.00
2	RSUD	0.00	0.00	350.986.025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.861.033.070.86	5.212.019.095.88
3	DINAS PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.667.528.702.00	0.00	21.667.528.702.00
4	DTBK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.250.000.00	0.00	350.250.000.00
5	BLHD	0.00	0.00	0.00	362.954.849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.954.849.00
6	DISDUKCAPIL	0.00	609.923.110.00	0.00	0.00	474.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.397.110.00
7	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	2.361.000.00	1.260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.621.000.00
8	BAGIAN UMUM SETDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.850.000.00	0.00	0.00	0.00	198.850.000.00
9	BAGIAN PEMERINTAH SETDA	733.250.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.733.250.00
10	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA	4.940.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.940.250.00
11	DISPENDA	0.00	29.457.262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.457.262.25
12	DISTANPANAK	0.00	0.00	38.423.669.29	0.00	0.00	0.00	8.420.000.00	34.326.500.00	0.00	81.170.169.29
13	DINAS PASAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.987.000.00	0.00	219.987.000.00
Jumlah		8.034.500.00	642.640.372.25	4.501.902.412.31	830.526.494.00	474.000.00	198.850.000.00	8.420.000.00	22.272.092.202.00	4.861.033.070.86	33.323.973.051.42

Dari hasil opname fisik persediaan obat- obatan ditemukan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Rumah Sakit dr. H. Andi Abdurrahman Noor, terdapat 597.022 item obat dengan nilai sebesar Rp500.013.550,69 yang telah kadaluarsa atau rusak;
2. Pada Dinas Kesehatan, terdapat 347.291 item obat dengan nilai sebesar Rp299.652.268,00 yang telah kadaluarsa atau rusak.

Rincian mutasi persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 1.2

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	126.828.799.250,27	144.074.765.836,02

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp126.828.799.250,27 dan Rp144.074.765.836,02. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 tersebut menurun sebesar Rp17.245.966.585,75 atau 11,97% dari saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015. Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Permanen	126.828.799.250,27	144.074.765.836,02

Investasi Permanen merupakan saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada



BUMD, dan Bank Kalsel. Rincian Mutasi Investasi Permanen selama tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.3.30
Rincian Mutasi Investasi
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi (Rugi) / Laba Tahun Sebelumnya	Penambahan / (Pengurangan) Investasi	Pengakuan Bagian (Rugi) / Laba Ditahan	Saldo Akhir (Rp)
1	Perusahaan Daerah Agro Bersujud	6.711.059.991,00	0,00	0,00	(197.651.024,00)	6.513.408.967,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum	71.694.908.358,10	(2.551.272.289,16)	3.950.000.000,00	(23.335.341.695,60)	49.758.294.373,34
3	PT. Nusantara Batulicin	35.155.821.453,67	0,00	0,00	1.558.750.987,85	36.714.572.441,52
4	Bank Pembangunan Daerah Kalsel	19.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	24.000.000.000,00
5	Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama	11.512.976.033,25	(386.236.134,80)	0,00	(1.284.216.430,04)	9.842.523.468,41
JUMLAH		144.074.765.836,02	(2.937.508.423,96)	8.950.000.000,00	(23.258.458.161,79)	126.828.799.250,27

Penjelasan rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1) **Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Agro Bersujud**

Jumlah saldo Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Agro Bersujud per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.513.408.967,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. PD Agro Bersujud sudah tidak beroperasi sejak 23 Desember 2015 sesuai SK Bupati Nomor 188.46/588/eko/2015 tentang Pembekuan Aktivitas Usaha PD Agro Bersujud. Pada tanggal 4 Juli 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Perda Nomor 14 Tahun 2016 mengatur proses pembubaran PD Agro Bersujud. Menindaklanjuti perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Piutang Petani dan Aset PD. Agro Bersujud dengan SK Bupati Tanah Bumbu No.188.45/EKO/2017 yang sampai dengan saat ini masih melakukan proses likuidasi sampai dengan 30 Juni 2017.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Perusahaan Daerah Agro Bersujud menggunakan metode ekuitas. Jumlah tersebut merupakan Saldo dari Laporan Perubahan Ekuitas Perusahaan Daerah Agro Bersujud posisi likuidasi (Juni 2016). Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Perusahaan Daerah Agro Bersujud dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel. 5.3.31
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Pada Perusahaan Daerah Agro Bersujud
Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
Saldo Awal	6,711,059,991.00	6,991,880,612.00	7,645,599,743.00	8,092,136,354.00
Koreksi Saldo Awal	-	185,893,626.00		
Saldo Awal Setelah Koreksi	6,711,059,991.00	7,177,774,238.00		
Penyertaan Modal Tahun Berjalan	-	-	-	-
Pengakuan Laba/Rugi Tahun Berjalan	(197,651,024.00)	(466,714,247.00)	(653,719,131.00)	(446,536,611.00)
Jumlah	6,513,408,967.00	6,711,059,991.00	6,991,880,612.00	7,645,599,743.00
Penerimaan Dividen	-	-	-	-
Saldo Akhir	6,513,408,967.00	6,711,059,991.00	6,991,880,612.00	7,645,599,743.00

2) **Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum**

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada PDAM per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp49.758.294.373,34 ,dengan prosentase kepemilikan sebesar 98,31%. Jumlah tersebut merupakan Saldo dari Laporan Perubahan Ekuitas PDAM yang telah di-audit oleh Auditor Independen serta berdasarkan pada perhitungan ulang nilai



investasi Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan metode ekuitas. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada PDAM tampak sebagai berikut:

Tabel 5.3.32
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Pada PDAM
Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Saldo Awal	71.694.908.358,10	90.368.853.154,36
Koreksi Saldo Awal	(2.551.272.289,16)	(290.456.769,21)
Saldo Awal Setelah Koreksi	69.143.636.068,94	90.078.396.385,15
Penyertaan Modal Tahun Berjalan	3.950.000.000,00	1.050.000.000,00
Pengakuan Laba/Rugi Tahun Berjalan	(23.335.341.695,60)	(19.433.488.027,05)
Jumlah	49.758.294.373,34	71.694.908.358,10
Penerimaan Dividen	0,00	0,00
Saldo Akhir	49.758.294.373,34	71.694.908.358,10

3) Penyertaan Modal pada PT. Nusantara Batulicin

PT.Nusantara Batulicin dibentuk berdasarkan akte notaris No.140 oleh notaris Rasfienora Ronadinihari,SH pada tanggal 16 Desember 2011 dengan komposisi saham 49% yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan 51% dikuasai oleh PTPN XIII (Persero).

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 sebesar Rp36.714.572.441,52 adalah berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas PT.Nusantara Batulicin, yang telah di- audit oleh Auditor Independen. Perubahan Investasi pada PT. Nusantara Batulicin dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.3.33
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Pada PT. Nusantara Batulicin
Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015 *
Saldo Awal	35,155,821,453.67	32,542,884,887.22
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi		
Penyertaan Modal Tahun Berjalan	-	3,920,000,000.00
Pengakuan Laba/Rugi Tahun Berjalan	1,558,750,987.85	(1,307,063,433.55)
Jumlah	36,714,572,441.52	35,155,821,453.67
Penerimaan Dividen	-	-
Saldo Akhir	36,714,572,441.52	35,155,821,453.67

4) Penyertaan Modal pada Bank Kalsel

Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Bank Kalsel kurang dari 20%, maka metode penilaian yang digunakan adalah metode *at cost* dimana nilai investasi diakui sebesar nilai Penyertaan Modal yang dikeluarkan.Jumlah penyertaan Modal pada Bank Kalsel Cabang Batulicin berdasarkan bukti penyertaan/kepemilikan saham (Surat Kolektif Saham) sebagai berikut:

Tabel 5.3.34
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Pada Bank Kalsel
Tahun 2016 dan 2015

Investasi Tahun	Nomor Sertifikat	Nomor Saham	Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Jumlah (Rp)
2007	0014	1.220.625 s.d 1.228.624	250,000.00	8,000	2,000,000,000.00
2010	0014	1.228.625 s.d 1.236.624	250,000.00	8,000	2,000,000,000.00



2011	0027	1.542.825 s.d 1.562.824	250,000.00	20,000	5,000,000,000.00
2013	0039	1.860.615 s.d 1.880.614	250,000.00	20,000	5,000,000,000.00
2014	0075	3.303.659 s.d 3.323.658	250,000.00	20,000	5,000,000,000.00
2016	0096	4.477.245 s.d 4.497.244	250,000.00	20,000	5,000,000,000.00
				96,000	24,000,000,000.00

5) **Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama**

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 pada Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama sebesar Rp9.842.523.468,41 adalah berdasarkan Laporan Keuangan Perusda Batulicin Jaya Utama yang telah diaudit oleh pihak independen. Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu tanggal 11 Juni 2013.

Tabel 5.3.35
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Pada PT. Batulicin Jaya Utama
Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Saldo Awal	11,512,976,033.25	1,985,086,957.25
Koreksi Saldo Awal	(386,236,134.80)	
Saldo Awal Setelah Koreksi	11,126,739,898.45	
Penyertaan Modal Tahun Berjalan	-	6,438,000,000.00
Pengakuan Laba/Rugi Tahun Berjalan	(1,284,216,430.04)	3,089,889,076.00
Jumlah	9,842,523,468.41	11,512,976,033.25
Penerimaan Deviden	-	-
Saldo Akhir	9,842,523,468.41	11,512,976,033.25

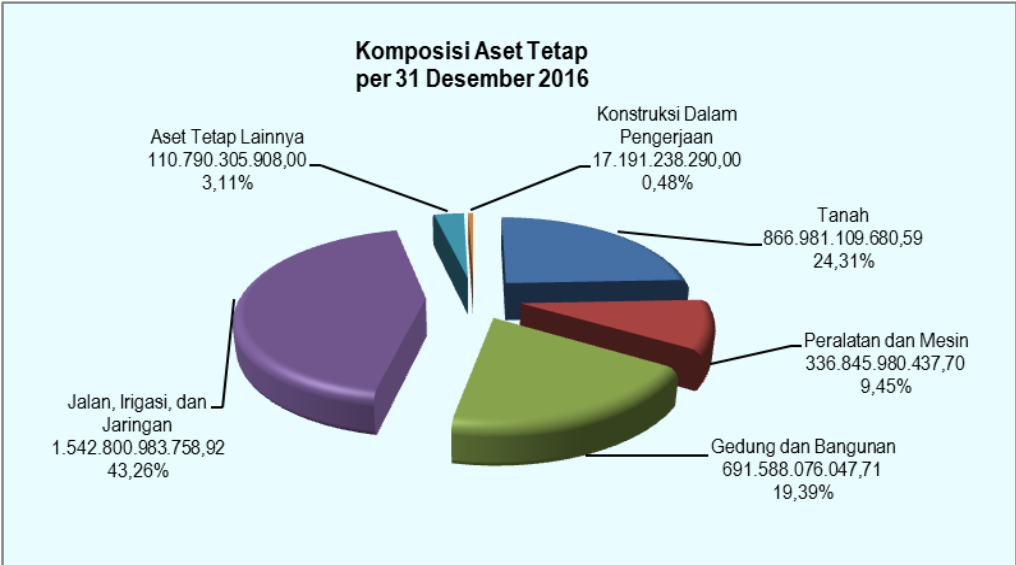
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	2.654.937.442.454,37	2.633.919.429.096,10

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.36
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Komponen Aset Tetap	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
				Rp	%
1	Tanah	866.981.109.680,59	823.032.247.601,09	43.948.862.079,50	5,34%
2	Peralatan dan Mesin	336.845.980.437,70	315.991.641.018,15	20.854.339.419,55	6,60%
3	Gedung dan Bangunan	691.588.076.047,70	678.518.514.680,35	13.069.561.367,35	1,93%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.542.800.983.758,92	1.408.200.212.171,29	134.600.771.587,63	9,56%
5	Aset Tetap Lainnya	110.790.305.908,00	100.374.405.360,29	10.415.900.547,71	10,38%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.191.238.290,00	17.664.388.337,00	(473.150.047,00)	-2,68%
7	Akumulasi Penyusutan	(911.260.251.668,54)	(709.861.980.072,07)	(201.398.271.596,47)	28,37%
Jumlah		2.654.937.442.454,37	2.633.919.429.096,10	21.018.013.358,28	0,80%

Komposisi aset tetap per 31 Desember 2016 dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini:



Gambar 5.3.2
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Per 31 Desember 2016

Bertambahnya Aset Tetap pada tanggal pelaporan dipengaruhi oleh penambahan dari belanja modal tahun berjalan. Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan belanja modal dari DPA masing- masing SKPD, dari kegiatan tersebut dilakukan verifikasi dengan cara rekonsiliasi antara realisasi belanja modal SKPD dengan realisasi fisik aset tetap yang kemudian dikelompokkan sesuai deangan klasifikasinya masing- masing.

Tabel 5.3.37
Klasifikasi Belanja Modal setelah Rekonsiliasi
Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
	Saldo Per 31 Desember 2015	823.032.247.601,09	315.991.641.018,15	678.518.514.680,35	1.408.200.212.171,29	100.374.405.360,29	17.664.388.337,00	3.343.781.409.168,17
1	Belanja Modal	22.140.593.600,00	35.973.808.456,30	26.064.823.147,00	181.344.969.521,00	7.402.997.750,00	0,00	272.927.192.474,30
2	Koreksi Belanja Modal	682.332.000,00	691.287.750,00	2.018.904.558,00	1.040.035.950,00	208.207.100,00	1.883.076.000,00	6.523.843.358,00
3	Belanja Barang Jasa	0,00	129.029.500,00	0,00	93.585.000,00	2.583.338.000,00	458.067.000,00	3.264.019.500,00
4	Belanja Pegawai	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5	Hibah	19.676.103.010,00	877.168.475,00	2.743.912.525,00	158.877.000,00	0,00	0,00	23.456.061.010,00
6	BOP/BOMM	0,00	563.208.500,00	0,00	1.200.000,00	39.928.000,00	0,00	604.336.500,00
7	BOS	0,00	2.324.074.910,00	73.500.000,00	58.672.445,00	125.926.000,00	0,00	2.582.173.355,00
8	Koreksi Pencatatan	8.238.330.249,50	0,00	4.136.370.700,64	1.430.378.502,63	0,00	0,00	13.805.079.452,77
9	Reklasifikasi	0,00	278.046.405,49	2.507.579.047,00	1.150.742.100,00	173.758.000,00	0,00	4.110.125.552,49
10	Hutang	8.100.000,00	991.160.000,00	3.730.992.400,00	8.445.514.650,00	4.540.039.500,00	1.544.984.000,00	19.260.790.550,00
11	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0,00	0,00	21.550.000,00	248.482.000,00	0,00	0,00	270.032.000,00
12	Mutasi Antar SKPD	2.925.000,00	27.772.345.870,43	15.117.277.495,01	348.943.100,00	0,00	0,00	43.241.491.465,44
	Jumlah Penambahan	50.748.383.859,50	69.604.429.867,22	56.414.909.872,65	194.321.400.268,63	15.074.194.350,00	3.886.127.000,00	390.049.445.218,00
1	Koreksi Belanja Modal	86.699.600,00	2.504.854.500,00	1.566.159.700,00	564.657.000,00	1.801.472.558,00	0,00	6.523.843.358,00
2	Hutang Tahun Lalu	0,00	0,00	605.089.770,00	2.894.418.281,00	2.400.136.692,00	0,00	5.899.644.743,00
3	HIBAH	0,00	8.344.811.400,83	1.127.246.420,00	410.246.000,00	0,00	0,00	9.882.303.820,83
4	Barang Jasa	0,00	0,00	3.356.300,00	49.900.000,00	0,00	0,00	53.256.300,00
5	Koreksi Pencatatan	1.167.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.838.000,00
6	Reklasifikasi	5.542.059.180,00	4.685.484.100,31	24.918.452.820,29	55.445.874.300,00	410.295.552,29	4.089.245.047,00	96.091.410.999,89
7	Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	0,00	689.933.536,62	7.766.000,00	0,00	500.000,00	0,00	698.199.536,62
8	Persediaan Habis Pakai	0,00	595.542.000,00	0,00	6.590.000,00	0,00	0,00	602.132.000,00
9	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.032.000,00	270.032.000,00
10	Penghapusan	0,00	4.157.119.039,48	0,00	0,00	45.889.000,00	0,00	4.203.008.039,48
11	Mutasi Antar SKPD	2.925.000,00	27.772.345.870,43	15.117.277.495,01	348.943.100,00	0,00	0,00	43.241.491.465,44
	Jumlah Pengurangan	6.799.521.780,00	48.750.090.447,67	43.345.348.505,30	59.720.628.681,00	4.658.293.802,29	4.359.277.047,00	167.633.160.263,26
	Saldo Per 31 Desember 2016	866.981.109.680,59	336.845.980.437,70	691.588.076.047,70	1.542.800.983.758,92	110.790.305.908,00	17.191.238.290,00	3.566.197.694.122,91

Penjelasan atas saldo masing- masing komponen aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan,Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebagai berikut:

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.1 Tanah	866.981.109.680,59	823.032.247.601,09

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam kondisi



siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp866.981.109.680,59 dan Rp823.032.247.601,09. penambahan aset tetap tanah tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2016 sebesar Rp823.032.247.601,09

a. Penambahan sebesar Rp50.748.383.859,50.

Penambahan aset tetap tanah senilai Rp50.748.383.859,50 berasal dari :

- 1) Pelaksanaan belanja modal selama tahun 2016 senilai Rp22.140.593.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bagian Pemerintahan	22,053,894,000.00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86,699,600.00
JUMLAH		22,140,593,600.00

- 2) Koreksi belanja modal yang bukan belanja tanah senilai Rp682.332.000,00 yang menambah aset tetap tanah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.39
Penambahan Aset Tetap Tanah dari Koreksi Belanja Modal
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	59,417,000.00
2	Dinas Pendidikan	622,915,000.00
JUMLAH		682,332,000.00

- 3) Penerimaan aset tetap tanah yang berasal dari hibah senilai Rp19.676.103.010,00:
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp219.180.000,00 yang berasal dari Desa Sebambaru Kecamatan Sungai Loban 1 persil dengan luas 7.209 M2 senilai Rp144.180.000,00 dan hibah Desa Jombang Kecamatan Satui 1 persil dengan luas 5.000 M2 senilai Rp75.000.000,00;
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menerima hibah dari desa berupa tanah bangunan taman/wisata dan rekreasi sebanyak 10 persil dengan nilai Rp10,00;
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan menerima hibah tanah fasilitas umum berupa tanah jalan komplek perumahan sebanyak 7 persil seluas 87,780 m2 dengan nilai Rp18.182.573.000,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.274.350.000,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum mencatat mutasi tambah tanah dibawah jalan dengan nilai Rp8.238.330.249,50 tanah tersebut merupakan penerimaan hibah dari desa pada tahun 2016 berupa tanah dibawah jalan 39 persil dengan luas 100.697,35 dan tanah jalan lingkungan sebanyak 21 persil dengan luas 42.794,20 M²;
- 5) Pelaksanaan belanja pada Dinas Pendidikan yang menjadi hutang senilai Rp8.100.000,00;
- 6) Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD dari Dinas Pendidikan Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.925.000,00.

b. Pengurangan sebesar Rp6.799.521.780,00

Pengurangan Aset tetap tanah senilai Rp6.799.521.780,00 terdiri dari:

- a) Koreksi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp86.699.600,00



- b) Koreksi pencatatan pada Dinas Pekerjaan Umum dikarenakan nilai yang tercantum pada KIB tahun 2015 diminta untuk dilakukan pengukuran kembali sebanyak 58 persil dengan nilai Rp1.167.838.000,00;
- c) Reklasifikasi aset tetap tanah ke aset lain-lain dikarenakan kewenangan SMA/SMK berpindah ke provinsi senilai Rp5.542.059.180,00
- d) Perpindahan penggunaan aset antar SKPD dari Dinas Pendidikan Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.925.000,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas diketahui bahwa total saldo aset tanah di neraca per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp866.981.109.690,59.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	336.845.980.437,70	315.991.641.018,15

Peralatan dan mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing- masing sebesar Rp336.845.980.437,70 dan Rp315.991.641.018,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.40
Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
				Rp	%
1	Alat-alat Besar	35,725,866,084.93	33,606,171,907.73	2,119,694,177.20	6.31%
2	Alat-alat Angkutan	124,353,646,706.88	122,331,771,807.54	2,021,874,899.34	1.65%
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	3,660,232,971.93	3,905,152,043.79	(244,919,071.86)	-6.27%
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	2,096,500,455.66	2,018,207,492.03	78,292,963.63	3.88%
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	94,679,967,716.26	88,847,541,470.13	5,832,426,246.13	6.56%
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	12,326,698,437.60	11,963,015,888.07	363,682,549.53	3.04%
7	Alat-alat Kedokteran	44,650,065,612.58	35,594,290,541.09	9,055,775,071.49	25.44%
8	Alat-alat Laboratorium	18,940,449,432.72	17,312,936,848.63	1,627,512,584.09	9.40%
9	Alat-alat Keamanan	412,553,019.14	412,553,019.14	0.00	0.00%
Jumlah		336,845,980,437.70	315,991,641,018.15	20,854,339,419.55	6.60%

Rincian transaksi mutasi peralatan dan mesin di tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan sebesar Rp69.604.429.867,22 terdiri dari :
 - 1) Pelaksanaan belanja belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2016 Rp35.973.808.456,30 dan belanja barang jasa sebesar Rp129.029.500,00 serta belanja pegawai sebesar Rp4.300.000,00 yang diatribusikan dalam aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.41
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja
Tahun 2016

No.	Uraian	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Belanja Pegawai	Jumlah
1	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	104,260,000.00	0.00	0.00	104,260,000.00
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	400,122,300.00	0.00	0.00	400,122,300.00
3	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	719,955,000.00	0.00	0.00	719,955,000.00



No.	Uraian	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Belanja Pegawai	Jumlah
4	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	72,476,000.00	0.00	0.00	72,476,000.00
5	BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH	330,151,375.00	0.00	700,000.00	330,851,375.00
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	320,340,750.00	0.00	0.00	320,340,750.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	431,275,000.00	0.00	3,600,000.00	434,875,000.00
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17,800,000.00	0.00	0.00	17,800,000.00
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,273,183,450.00	0.00	0.00	12,273,183,450.00
10	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	0.00	129,029,500.00	0.00	129,029,500.00
11	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	3,178,750,481.00	0.00	0.00	3,178,750,481.00
12	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
13	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	477,181,875.00	0.00	0.00	477,181,875.00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	971,443,200.00	0.00	0.00	971,443,200.00
16	DINAS KESEHATAN	1,740,736,321.00	0.00	0.00	1,740,736,321.00
17	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	226,040,000.00	0.00	0.00	226,040,000.00
18	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	198,000,000.00	0.00	0.00	198,000,000.00
19	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	7,187,500.00	0.00	0.00	7,187,500.00
20	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	614,087,000.00	0.00	0.00	614,087,000.00
21	INSPEKTORAT	39,516,000.00	0.00	0.00	39,516,000.00
22	DINAS PASAR	64,524,000.00	0.00	0.00	64,524,000.00
23	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	49,750,000.00	0.00	0.00	49,750,000.00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	360,350,000.00	0.00	0.00	360,350,000.00
25	DINAS PENDIDIKAN	729,295,290.00	0.00	0.00	729,295,290.00
26	KECAMATAN BATULICIN	22,850,000.00	0.00	0.00	22,850,000.00
27	KECAMATAN KURANJI	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
28	KECAMATAN KUSAN HILIR	15,650,000.00	0.00	0.00	15,650,000.00
29	KECAMATAN SATUI	40,100,000.00	0.00	0.00	40,100,000.00
30	KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN	12,999,750.00	0.00	0.00	12,999,750.00
31	RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR	11,925,843,164.30	0.00	0.00	11,925,843,164.30
32	SEKRETARIAT DPRD	592,740,000.00	0.00	0.00	592,740,000.00
Jumlah		35,973,808,456.30	129,029,500.00	4,300,000.00	36,107,137,956.30

- 2) Koreksi belanja modal yang bukan peralatan mesin senilai Rp691.287.750,00 yang menambah aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari :
- Bagian Umum dan Perlengkapan senilai Rp198.850.000,00
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp161.050.000,00
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai Rp194.750.000,00
 - Dinas Pasar senilai Rp136.637.750,00



- 3) Penerimaan hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan menerima hibah dari Pusat berupa peralatan kantor dan perikanan senilai Rp877.168.475,00;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dana BOP/BOMM pada Dinas Pendidikan yang menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp563.208,500,00;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan yang menghasilkan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp2.324.074.910,00;
- 6) Reklasifikasi pada kelompok alat- alat kantor dan rumah tangga pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp278.046.405,49 yang sebelumnya tercatat pada kelompok gedung dan bangunan;
- 7) Pelaksanaan belanja peralatan dan mesin yang menjadi hutang senilai Rp991.160.000,00 yang terdiri dari :
 - Badan Lingkungan Hidup Daerah senilai Rp149.800.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp297.760.000,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahmannoor senilai Rp543.600.000,00
- 8) Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD selama Tahun 2016 senilai Rp27.772.345.870,43 yang terdiri dari :

Tabel 5.3.42
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Antar SKPD
Tahun 2016

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	177,361,754.63
2	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	157,403,225.81
3	BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH	65,681,703.00
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	401,196,022.70
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21,047,411,788.73
6	BAGIAN HUKUM	32,039,826.92
7	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	60,829,230.77
8	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	49,961,145.16
9	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9,754,329.71
10	BAGIAN ORGANISASI	7,070,000.00
11	BAGIAN PEMERINTAHAN	13,018,076.92
12	BAGIAN PEREKONOMIAN	47,432,982.11
13	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	62,961,290.32
14	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	157,403,225.81
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69,701,434.00
16	DINAS KESEHATAN	329,731,750.00
17	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	720,446,424.19
18	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	194,970,000.00
19	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	389,946,424.19
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	334,077,503.23
21	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	69,701,434.00
22	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	94,441,935.48
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	125,922,580.65
24	KECAMATAN KUSAN HULU	62,961,290.32
25	KELURAHAN BATULICIN	10,061,111.11
26	KELURAHAN GUNUNG TINGGI	194,970,000.00
27	KELURAHAN KAMPUNG BARU	194,970,000.00
28	KELURAHAN PAGATAN	194,970,000.00



29	KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN	194,970,000.00
30	SEKRETARIAT DPRD	2,300,979,380.67
Jumlah		27,772,345,870.43

Pengurangan sebesar Rp48.750.090.447,67

b. Pengurangan sebesar Rp Rp48.750.090.447,67 terdiri dari:

- 1) Koreksi belanja modal yang tidak menambah asset tetap peralatan dan mesin senilai Rp2.504.854.500, terdiri dari :
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp41.511.700,00
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika senilai Rp149.270.000,00
 - Inspektorat senilai Rp7.766.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp360.350.000,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp5.423.800,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor senilai Rp1.740.833.000,00
 - Sekretariat DPRD senilai Rp199.700.000,00
- 2) Hibah asset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp8.344.811.400,83 terdiri dari :
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberi hibah berupa alat angkutan bermotor kepada instansi vertikal Senilai Rp7.740.602.472,26
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan hibah berupa alat angkutan bermotor kepada pihak ketiga Senilai Rp604.208.928.57;
- 3) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain senilai Rp4.685.484.100,31 terdiri dari :
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp252.964.533,35
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp319.156.945,28
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp40.162.001,00
 - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp229.920.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp203.217.600,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp3.500.185.551,00
 - Kecamatan Satui senilai Rp139.877.469,68
- 4) Terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin yang dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp689.933.536,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43
Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Aset dibawah Nilai Kapitalisasi
Tahun 2016

No.	Uraian	Mutasi Antar SKPD
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,250,000.00
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89,278,000.00
3	BAGIAN UMUM	3,146,500.00
4	DINAS KESEHATAN	123,209,408.00
5	INSPEKTORAT	7,960,000.00
6	DINAS PASAR	29,985,339.62
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,260,400.00
8	DINAS PENDIDIKAN	347,076,711.00
9	KECAMATAN KURANJI	2,100,000.00
10	RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR	81,667,178.00
Jumlah		689,933,536.62

- 5) Terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin merupakan kategori persediaan Senilai Rp595.542.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.44
Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Masuk Kategori Persediaan
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	63.025.000,00
2	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	398.647.000,00
3	DINAS KESEHATAN	133.870.000,00
JUMLAH		595.542.000,00

- 6) Terdapat penghapusan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp4.157.119.039,48 yang terdiri dari:
- Penghapusan alat kendaraan bermotor yang telah dilakukan penjualan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp427.000.000,00;
 - Penghapusan alat rumah tangga berupa tenda yang dihibahkan kepada adat ogi pada Bagian Umum dan Perlengkapan senilai Rp1.978.900.000,00;
 - Penghapusan peralatan dan mesin yang telah dimusnahkan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.751.219.039,48.
- 7) Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD selama Tahun 2016 senilai Rp27.772.345.870,43 yang terdiri dari :

Tabel 5.3.45
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi Antar SKPD
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.132.942.664,31
2	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	356.713.000,00
3	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	3.924.368.346,40
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.650.680.909,09
5	DINAS PENDAPATAN	150.000.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500.000.000,00
7	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	154.638.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	13.360.002.950,63
9	SEKRETARIAT DPRD	543.000.000,00
JUMLAH		27.772.345.870,43

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo Aset Peralatan dan Mesin di neraca per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp336.845.980.437,70.

Dari keseluruhan aset yang dikuasai, terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang dipinjamkaikan ke instansi vertikal sebanyak 5 unit terdiri dari 2 unit roda empat dan 3 unit roda dua.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	691.588.076.047,70	678.518.514.680,35

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu- rambu.

Total saldo Aset Gedung dan Bangunan di neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp691.588.076.047,70 dan Rp678.518.514.680,35 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.46
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2016 dan 2015

No.	Komponen Aset Tetap	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung	685,144,795,395.69	672,284,894,028.93	12,859,901,366.76	1.91%
2	Bangunan Monumen	6,443,280,652.01	6,233,620,652.01	209,660,000.00	3.36%
Jumlah		691,588,076,047.70	678,518,514,680.94	13,069,561,366.76	5.28%

Saldo Per 1 Januari 2016 sebesar Rp678.518.514.680,94

- a. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp56.414.909.872,65 terdiri dari :
- a) Pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan selama tahun 2016 dengan senilai Rp26.064.823.147,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47
Belanja Pegadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	214,185,000.00
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	33,280,000.00
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	458,435,000.00
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	812,926,000.00
5	DINAS KESEHATAN	2,214,134,200.00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	81,510,000.00
7	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	281,246,000.00
8	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	449,870,000.00
9	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	1,150,000.00
10	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH	208,730,000.00
11	DINAS PASAR	584,218,370.00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,168,326,677.00
13	DINAS PENDIDIKAN	18,133,085,900.00
14	SEKRETARIAT DPRD	423,726,000.00
JUMLAH		26,064,823,147.00

- b) Koreksi belanja modal yang bukan belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp2.018.904.558,00 yang menambah aset gedung dan bangunan terdiri dari :
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika senilai Rp149.270.000,00
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai Rp415.500.000,00
 - Inspektorat senilai Rp7.766.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp225.712.558,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor senilai Rp1.009.382.000,00
 - Sekretariat DPRD senilai Rp211.274.000,00
- c) Penerimaan hibah bangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Senilai Rp2.743.912.525,00;
- d) Perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari dana bos senilai Rp73.500.000,00
- e) Koreksi pencatatan pada aset gedung dan bangunan senilai Rp4.136.370.700,64 yang terdiri dari :
- Kecamatan Angsana senilai Rp736.346.340,12
 - Kecamatan Batulicin senilai Rp736.346.340, 12
 - Kecamatan Karang Bintang senilai Rp736.346.340, 12



- Kecamatan Kuranji senilai Rp736.346.340, 12
- Kecamatan Mantewe senilai Rp736.346.340, 12
- Kelurahan Tunggaran Pangeran senilai Rp454.639.000,04
- f) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp2.507.579.047,00 yang terdiri dari :
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp42.561.000,00
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp465.286.047,00
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp14.860.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp1.145.395.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp109.352.000,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp515.734.000,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor senilai Rp214.391.000,00
- g) Pelaksanaan kegiatan pengadaan gedung dan bangunan yang menjadi hutang tahun 2017 senilai Rp3.730.992.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.48
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Menjadi Utang
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	390.831.600,00
2	Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	127.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	547.990.800,00
4	Dinas Pendidikan	2.665.170.000,00
JUMLAH		3.730.992.400,00

- h) Adanya penambahan gedung dan bangunan yang berasal dari penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp21.550.000,00 yang terdiri dari:
 - Kantor Ketahanan Pangan Daerah senilai Rp11.950.000,00;
 - RSUD dr. Andi Abdurrahmannoor senilai Rp9.600.000,00;
- i) Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD selama Tahun 2016 senilai Rp15.117.277.495,01 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.49
Perpindahan Penggunaan Aset Gedung dan Bangunan
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	2.840.613.997,00
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.369.836.832,67
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.167.153.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.369.836.832,67
5	Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	3.369.836.832,67
JUMLAH		15.117.277.495,01

- b. Pengurangan sebesar Rp43.345.348.505,30
Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2016 senilai Rp43.345.348.505,30 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Koreksi belanja modal senilai Rp1.566.159.700,00 yang terdiri dari :
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp458.435.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp234.596.000,00
 - Dinas Pasar Rp204.260.000,00



- Dinas Pendidikan senilai Rp668.868.700,00
- b. Terdapat belanja modal gedung dan bangunan merupakan hutang tahun lalu senilai Rp605.089.770,00 terdiri dari :
 - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp26.200.000,00
 - Dinas Pasar senilai Rp379.958.370,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp198.931.400,00
- c. Terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal Gedung dan Bangunan yang diperuntukkan untuk pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.127.246.420,00;
- d. Pelaksanaan kegiatan belanja modal yang tidak masuk kriteria aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.356.300,00;
- e. Reklasifikasi gedung dan bangunan senilai Rp24.918.452.820,29 yang terdiri dari :
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp626.989.505,00;
 - Dinas Pendidikan senilai Rp24.291.463.315,29
- f. Terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan yang dibawah nilai kapitalisasi pada Inspektorat senilai Rp7.766.000,00;
- g. Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD selama Tahun 2016 senilai Rp15.117.277.495,01 yang terdiri dari :
 - Dinas Pekerjaan Umum Senilai Rp12.950.124.495,01;
 - Dinas Pendidikan senilai Rp2.167.153.000,00;

Berdasarkan keseluruhan data diatas, total saldo Aset Gedung dan Bangunan di neraca per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp691.588.076.046,71.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.542.800.983.758,92	1.408.200.212.171,29

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon. Rincian saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.542.800.983.758,92 dan sebesar Rp1.408.200.212.171,29 terdiri dari:

Tabel 5.3.50
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tahun 2016 dan 2015

No.	Komponen Aset Tetap	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Jalan dan Jembatan	1,299,152,177,676.82	1,176,830,270,276.82	122,321,907,400.00	10.39%
2	Bangunan Air/Irigasi	178,778,289,109.64	157,042,754,804.64	21,735,534,305.00	13.84%
3	Instalasi	31,712,881,488.29	16,334,847,188.29	15,378,034,300.00	94.14%
4	Jaringan	33,157,635,484.17	57,992,339,904.17	(24,834,704,420.00)	-42.82%
Jumlah		1,542,800,983,758.92	1,408,200,212,173.92	134,600,771,585.00	75.55%

Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun Anggaran 2016 Senilai Rp194.321.400.268,63 terdiri dari:

- a. Pelaksanaan belanja selama tahun 2016 senilai Rp181.438.554.521,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.51
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja
Tahun 2016

No.	SKPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24,994,200.00	0.00	24,994,200.00
2	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	181,040,000.00	0.00	181,040,000.00
3	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	237,022,280.00	0.00	237,022,280.00
5	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	270,607,000.00	0.00	270,607,000.00
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	154,840,000.00	0.00	154,840,000.00
7	DINAS KESEHATAN	69,911,600.00	0.00	69,911,600.00
8	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	14,893,259,000.00	49,775,000.00	14,943,034,000.00
9	DINAS PASAR	348,657,750.00	0.00	348,657,750.00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	165,091,572,191.00	43,810,000.00	165,135,382,191.00
11	DINAS PENDIDIKAN	31,899,500.00	0.00	31,899,500.00
12	KECAMATAN ANGSANA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
13	KELURAHAN BATULICIN	2,166,000.00	0.00	2,166,000.00
JUMLAH		181,344,969,521.00	93,585,000.00	181,438,554,521.00

- b. Koreksi belanja modal senilai Rp1.040.035.950,00 yang terdiri dari :
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp41.511.700,00
 - Dinas Pasar Rp60.747.250,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor senilai Rp731.451.000,00
 - Sekretariat DPRD senilai Rp206.326.000,00
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan menerima hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp158.877.000,00;
- d. Dinas pendidikan melakukan kegiatan pengadaan bangunan air/irigasi dan jaringan distribusi dari dana BOP senilai Rp1.200.000,00;
- e. Dinas pendidikan melakukan kegiatan pengadaan bangunan air/irigasi dan jaringan distribusi dari dana BOS senilai Rp58.672.445,00;
- f. Koreksi pencatatan aset jalan, irigasi dan jaringan merupakan hibah dari APBN tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.430.378.502,63
- g. Reklasifikasi Jaringan dan irigasi senilai Rp1.150.742.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dikarenakan perencanaan bangunan jalan, irigasi dan jaringan sudah selesai pengerjaannya senilai Rp801.799.000,00 dan pencatatan masih satu di gedung kantor pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp348.943.100,00;
- h. Pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yang menjadi hutang senilai Rp8.445.514.650,00 yang terdiri dari :
- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai 283.090.000,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum Senilai Rp8.162.424.650,00.
- i. Konstruksi dalam pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan yang telah selesai dan menjadi aset yang siap digunakan untuk dimanfaatkan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp248.482.000,00.
- j. Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD selama Tahun 2016 senilai Rp348.943.100,00 yang terdiri dari :
- Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah senilai Rp72.162.200,00;
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Senilai Rp92.260.300,00;
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Senilai Rp92.260.300,00;



- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Rp92.260.300,00.

Sedangkan Pengurangan atas nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi selama tahun anggaran 2016 senilai Rp59.720.628.681,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp564.657.000,00 yang terdiri dari :
 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan senilai Rp59.417.000,00
 - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp109.840.000,00
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai Rp395.400.000,00
- Terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pembayaran hutang tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp2.894.418.281,00
- Terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja modal Gedung dan Bangunan yang diperuntukkan untuk pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp410.246.000,00;
- Pelaksanaan kegiatan belanja modal yang tidak masuk kriteria aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan umum senilai Rp49.000.000,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp900.000,00;
- Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp55.445.874.300,00 yang terdiri dari :
 - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp726.175.000,00 merupakan barang yang sudah diserahkan ke masyarakat
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp53.764.452.300,00 merupakan barang yang akan menjadi penyertaan modal ke PDAM
 - Dinas Pendidikan senilai Rp955.247.000,00 merupakan aset yang diserahkan ke provinsi dikarenakan pengalihan wewenang SMA/SMK
- Pelaksanaan kegiatan belanja modal yang merupakan belanja persediaan pakai habis pada Dinas Pekerjaan umum senilai Rp6.590.000,00;
- Perpindahan Penggunaan aset antar SKPD selama Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp348.943.100,00.

Berdasarkan keseluruhan data diatas, total saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca per 31 Desember 2016 senilai Rp1.596.565.436.058,92.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	110.790.305.908,00	100.374.405.360,29

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi dan pembangunan atas aset tetap yang bukan dalam pengelolaannya. Total saldo Aset Tetap Lainnya di neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp110.790.305.908,00 dan Rp100.374.405.360,29 yang terdiri dari:



Tabel 5.3.52
Aset Tetap Lainnya
Tahun 2016 dan 2015

No.	Komponen Aset Tetap	Tahun 2016	Tahun 2015	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Buku Perpustakaan	49.308.665.245.78	38.962.872.643.46	10.345.792.602.32	26.55%
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1.322.652.587.81	1.390.404.241.81	(67.751.654.00)	-4.87%
4	Hewan Ternak dan Tumbuhan	4.073.508.159.48	4.132.188.159.48	(58.680.000.00)	-1.42%
5	Aset Renovasi	56.085.479.914.93	55.888.940.314.93	196.539.600.00	0.35%
Jumlah		110.790.305.908.00	100.374.405.359.68	10.415.900.548.32	20.61%

Penambahan Aset tetap Lainnya selama tahun anggaran 2016 senilai Rp15.074.194.350,00 yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan belanja selama tahun 2016 senilai Rp9.986.335.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.53
Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja
Tahun 2016

No.	SKPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah (Rp)
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0.00	1.340.955.000.00	1.340.955.000.00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0.00	411.860.000.00	411.860.000.00
3	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	198.850.000.00	0.00	198.850.000.00
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	161.050.000.00	0.00	161.050.000.00
5	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	10.000.000.00	533.200.000.00	543.200.000.00
6	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	1.476.842.450.00	0.00	1.476.842.450.00
7	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0.00	297.323.000.00	297.323.000.00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	5.338.355.300.00	0.00	5.338.355.300.00
9	SEKRETARIAT DPRD	217.900.000.00	0.00	217.900.000.00
JUMLAH		7.402.997.750.00	2.583.338.000.00	9.986.335.750.00

- b. Koreksi belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp208.207.100,00 yang terdiri dari :
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp86.699.600,00
 - Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp109.840.000,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp11.667.500,00
- c. Pengelolaan dana BOP/BOMM yang menghasilkan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp39.928.000,00;
- d. Pengelolaan dana BOS yang menghasilkan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp125.926.000,00;
- e. Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan yang dibatalkan pelaksanaannya senilai Rp173.758.000,00
- f. Terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang merupakan pembayaran hutang tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4.540.039.500,00

Pengurangan aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2016 senilai Rp4.658.293.802,29 yang terdiri dari:

- a. Koreksi belanja modal senilai Rp1.801.472.558,00 yang terdiri dari :
 - Bagian Umum dan Perlengkapan senilai Rp198.850.000,00
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp 161.050.000,00
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai Rp214.850.000,00



- Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.008.822.558,00
- Sekretariat DPRD senilai Rp217.900.000,00
- b. Terdapat belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja hutang tahun lalu senilai Rp2.400.136.692,00 yang terdiri dari :
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai Rp1.261.992.450,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.138.144.242,00
- c. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lain-lain senilai Rp410.295.552,29 yang terdiri dari :
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Senilai Rp18.690.327,29
 - Dinas Pendidikan senilai Rp391.605.225,00
- d. Terdapat aset tetap lainnya yang nilainya dibawah batas kapitalisasi pada Dinas Pendidikan senilai Rp500.000,00;
- e. Pada Dinas Pendidikan melakukan kegiatan penghapusan aset tetap lainnya senilai Rp45.889.000.

Total saldo Aset Tetap Lainnya di neraca per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp110.790.305.908,00.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.191.238.290,00	17.664.388.337,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.3.54 dan Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2016 pada Tabel 5.3.55.

Tabel 5.3.54
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2016

No.	SKPD	Nilai (Rp)
Gedung dan Bangunan		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	3.169.805.700,00
2	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	285.076.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-
4	DINAS KESEHATAN	1.503.460.500,00
5	RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR	-
6	DINAS PENDIDIKAN	245.418.000,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	29.788.000,00
8	DINAS PENDAPATAN	-
9	DINAS PASAR	56.650.000,00
10	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	49.200.000,00
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	458.435.000,00
Jumlah		5.797.833.200,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	8.870.806.000,00
2	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	61.260.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.950.000,00
4	RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR	183.802.395,00
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.270.586.695,00
Jumlah		11.393.405.090,00
Total		17.191.238.290,00



Tabel 5.3.55
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2016

No.	SKPD	Uraian	Harga	Keterangan
Gedung dan Bangunan				
1	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,925,000.00	Perencanaan Pelestarian Cagar Budaya di Pagatan dan Batulicin (Fisik belum di kerjakan)
2	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	176,330,000.00	Perencanaan Gedung BLK Kab.Tanbu (Fisik belum di kerjakan)
3	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39,502,100.00	Perencanaan Pembangunan MCK + IPAL Komunal dan Perpipaan+ Kolam Tampungan / Retensi / Saluran (Fisik belum di kerjakan)
4	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,225,000.00	Perencanaan Penataan Kawasan Pasar Satui kecamatan satui
5	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,159,000.00	Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Satui
6	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	28,345,000.00	Perencanaan Pengaspalan Halaman Pasar Satui
7	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	297,850,000.00	Perencanaan Pembangunan Food Court
8	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	594,580,000.00	Perencanaan Pembangunan Gedung Pertemuan
9	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	657,912,000.00	Perencanaan GOR Kabupaten Tanah Bumbu
10	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	21,697,000.00	Perencanaan Pembangunan Gedung Serabaguna Desa Batuah Kec. Kusan Hilir
11	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,750,000.00	Review Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Satu Pintu
12	DPU	Bangunan Pagar Permanen	10,000,000.00	Perencanaan Pintu Gerbang Perbatasan Kab. Tanah Bumbu (Fisik Belum di kerjakan)
13	DPU	Bangunan Pagar Permanen	19,664,700.00	Perencanaan Pagar Lapangan Basket (Fisik belum di kerjakan)
14	DPU	Bangunan Taman	50,262,000.00	perencanaan penataan kawasan pantai
15	DPU	Makam Bersejarah	49,329,000.00	perencanaan rehabilitasi makam sekh H. M. arsyad Al banjari
16	DPU	Bangunan Taman	121,310,000.00	DED RTH
17	DPU	Bangunan Taman	115,571,000.00	DED RTH
18	DPU	Bangunan Taman	50,174,000.00	perencanaan RTH
19	DPU	Bangunan Taman	118,191,900.00	DED RTH
20	DPU	Bangunan Taman	116,726,000.00	DED RTH
21	DPU	Tugu Pembangunan Lainnya	49,984,000.00	Perencanaan RTH
22	DISTABHAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,830,000.00	perencanaan pembuatan bundaran tugu depan kantor bupati
23	DISTABHAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9,966,000.00	perencanaan bundara simpang empat pagatan
24	DISTABHAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,930,000.00	Perencanaan. RTH(taman)
25	DISTABHAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14,900,000.00	Perencanaan Pagar Hutan Kota
26	DISTABHAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	29,900,000.00	Perencanaan Median Jalan Masjid Agung
27	DISTABHAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	23,900,000.00	Taman RTH sepunggur
28	DISTABHAN	Bangunan Taman	49,800,000.00	perencanaan penataan hutan kapet
29	DISTABHAN	Bangunan tempat sampah	49,850,000.00	perencanaan tps3r
30	DINKES	Bangunan Gedung Pagar Kantor	13,921,000.00	perencanaan Pagar PKm BTL I
31	DINKES	Bangunan Gedung Pagar Kantor	13,913,000.00	Perencanaan Pagar Puskesmas Sebamban I
32	DINKES	Bangunan Gedung Pagar Kantor	16,424,000.00	Perencanaan Pagar Puskesmas Teluk Kepayang
33	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	61,000,000.00	perencanaan Pembangunan Poskesdes



No.	SKPD	Uraian	Harga	Keterangan
34	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	8,140,000.00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN POSKESDES KARANG REJO
35	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12,925,000.00	MTs RIADUSSHALIHIN
36	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	15,800,000.00	DINAS PENDIDIKAN
37	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	7,390,000.00	DINAS PENDIDIKAN
38	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	40,145,000.00	DINAS PENDIDIKAN
39	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	44,900,000.00	APBD II
40	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	11,596,000.00	SDN SUNGAI LOBAN
41	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	11,596,000.00	SDN BINAWARA
42	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	900,000.00	SDN 2 BANJARSARI
43	DISLUTKAN	Gedung Garasi/Pool Permanen	29,788,000.00	Gagal lelang
44	DISDIK	Bangunan Gedung Kantor Permanen	25,237,000.00	Perencanaan Kantor SMAN 1 Sungai loban
45	DISDIK	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35,219,000.00	Perencanaan Kantor SMAN 1 Angsana
46	DINKES	Bagunan Gudang Lainnya	49,163,000.00	Perencanaan Pembangunan Gudang Obat
47	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	83,204,000.00	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Satui
48	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	84,562,500.00	Perencanaan penambahan Bangunan Puskesmas Pagatan
49	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,404,000.00	Perencanaan Penambahan bangunan puskesmas Karang Bintang
50	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,660,000.00	Perencanaan Penambahan Bangunan Puskesmas giri Mulya
51	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,950,000.00	Perencanaan Penambahan Bangunan Puskesmas SBB I
52	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	74,918,000.00	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Non perawatan mnjadi Perawatan Mantewe
53	DINAS PASAR	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	49,775,000.00	Perecn.Pembangunan Pasar Desa Suka Damai
54	DINKES	Bangunan pagar Lainnya	20,457,000.00	Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Pagatan
55	DINKES	Bangunan pagar Lainnya	19,624,000.00	Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Giri Mulya
56	DINKES	Bangunan pagar Lainnya	16,600,000.00	Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas simpang empat
57	DINKES	Bangunan pagar Lainnya	16,349,000.00	Perencanaan Pembuatan Pagar Puskesmas Lasung
58	DINKES	Bangunan pagar Lainnya	16,600,000.00	Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Karang Bintang
59	DISPORBUDPAR	Bangunan Taman	11,940,000.00	Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembuatan Taman dan Patung Pantai Rindu Alam nomor kontrak : 800/035 - UM /Disporbudpar-BLP/2015 Tanggal 24 Maret 2015, Nilai kontrak Rp. 11.940.000,-
60	DISPORBUDPAR	Bangunan Taman	13,340,000.00	Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembuatan/Pembangunan Taman Objek Wisata Angsana nomor kontrak : 800/037-UM /Disporbudpar-BLP/2015 Tanggal 24 Maret 2015, Nilai kontrak Rp. 11.940.000,-
61	DINKES	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	49,879,000.00	Pembangunan Rumah Dinas dokter Puskesmas Pagatan



No.	SKPD	Uraian	Harga	Keterangan
62	DISPORBUDPAR	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	23,920,000.00	Pembayaran 100% Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pendopo Bukit Bangkai nomor kontrak : 800/008 -UM /Disporbudpar-BLP/2015,Tanggal 29 Januari 2015, Nilai kontrak Rp. 23.920.000,-
63	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	48,400,000.00	Perencanaan Gedung KNPI
64	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	47,190,000.00	Perencanaan Pembangunan Sekretariat PGRI Kabupaten Tanah Bumbu
65	DPU	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	260,628,000.00	Perencanaan Pembangunan Islamic Center
66	DPU	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	49,100,000.00	Perencanaan Pembangunan Gedung Bhayangkari dan Gedung Serba Guna Polres Tanah Bumbu
67	DPU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,000,000.00	Perencanaan Kantor Kecamatan Kusan Hulu
68	BPKAD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	428,535,000.00	Perencanaan Gedung kantor BPKAD
69	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,852,000.00	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Satui
70	DINKES	PerencanaanPaving Block Puskesmas Batulicin	15,431,000.00	Perencanaan Paving Block Puskesmas Batulicin
71	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	20,395,000.00	Perencanaan Rehab Puskesmas Pulau Tanjung
72	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,170,000.00	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pagatan
73	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,863,000.00	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Darul Azhar
74	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	49,885,000.00	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Mantewe
75	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	446,038,000.00	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Satui
76	DINKES	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	17,600,000.00	Perencanaan Pembangunan Poskesdes Tungkaran Pangeran
77	DINKES	Bangunan Gedung Kantor Permanen	21,890,000.00	Perencanaan Interior Kantor Dinas Kesehatan
78	DINKES	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49,918,000.00	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor Dinkes
79	DINKES	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39,650,000.00	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinkes
80	DINAS PASAR	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Rp6,875,000.00	Pek.Perencanaan Pembangunan Rumah Kompos Pasar Pusat Niaga
81	BPKAD	Bangunan Bengkel Permanen	29,900,000.00	Perencanaan Pembangunan Workshop
82	DISTABHAN	Taman	7,000,000.00	Perencanaan taman
83	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	19,855,000.00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas
84	DISDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	19,855,000.00	Perencanaan Pembangunan (Relokasi)
Sub Jumlah			5,797,833,200.00	
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN				
1	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,800,000.00	Perencanaan Bundaran Simpang 3 Sepunggur Gunung Tinggi (Fisik belum di kerjakan)
2	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,800,000.00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tamunih Kecamatan Kusan Hulu (Fisik belum di kerjakan)
3	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,800,000.00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Bunati (Fisik belum di kerjakan)
4	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,800,000.00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Pulau Panjang (Fisik belum di kerjakan)
5	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,800,000.00	Perencanaan Bundaran Simpang 3 Kersik Putih (Fisik belum di kerjakan)
6	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,022,000.00	Perencanaan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Mantewe (Fisik belum di kerjakan)
7	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	29,800,000.00	Perencanaan Peningkatan Jalan desa Kusambi (Fisik belum di kerjakan)



No.	SKPD	Uraian	Harga	Keterangan
8	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	24,800,000.00	Perencanaan Peningkatan Lingkungan Jalan Desa Maduretno (Fisik belum di kerjakan)
9	DPU	Jalan Kabupaten Kelas V	49,731,000.00	Perencanaan Jalan Akses Balai Latihan Kerja Kec. Kusan Hilir (Fisik belum di kerjakan)
10	DPU	Jalan Desa	49,500,000.00	Perencanaan Jalan Kawasan Pusat Perkantoran
11	DPU	Jalan Desa	47,951,000.00	Perencanaan Jalan Teluk kepayang Mangkal Api
12	DPU	Jalan Desa	49,000,000.00	Perencanaan Pelebaran Jalan Tanah Merah - Sepunggur
13	DPU	Jalan Desa	49,750,000.00	Perencanaan Jalan Akses Kecamatan Satui
14	DPU	Jalan Desa	49,750,000.00	Perencanaan Jalan Alkautsar
15	DPU	Jalan Desa	49,500,000.00	Perencanaan Pembangunan Jalan Akses Pasar Minggu Insgub Karang jawa (Multi Years)
16	DPU	Jalan Desa	49,000,000.00	Perencanaan Pelebaran Jalan Kecamatan Angsana
17	DPU	Jalan Desa	98,890,000.00	Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Teluk Kepadang Desa Tapus Desa Darasan Binjai Desa Karang Mulya Desa Karang Sari
18	DPU	Jalan Desa	49,500,000.00	Perencanaan Pelebaran Jalan Dalam Kec. Satui
19	DPU	Jalan Desa	49,850,000.00	Perencanaan Peningkatan Jalan di Desa Sungai Cuka dar Kec.Satui
20	DPU	Jalan Desa	49,830,000.00	Perencanaan Peningkatan jalan Batu Bahalang - Manuntung
21	DPU	Jembatan Beton	48,680,000.00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah II
22	DPU	Jembatan Beton	49,850,000.00	Perencanaan Rehab Jembatan Bukit Baru Satui
23	DPU	Jembatan Beton	196,820,000.00	Perencanaan Jembatan Kembar Batulicin
24	DPU	Jembatan Beton	49,470,000.00	Perencanaan Jembatan Sei.Kusan Desa Lasung
25	DPU	Jembatan Beton	49,500,000.00	Perencanaan Jembatan Sei.Muara Guntung
26	DPU	Jembatan Beton	49,700,000.00	Perencanaan Jembatan Sei.Muara Buran
27	DPU	Tanggul Banjir	48,181,000.00	Perencanaan bantaran tanggul sungai
28	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	195,775,000.00	Perencanaan Pembangunan Groin Desa Tanjung Petang - Pagatan Kecamatan Kusan Hilir (Fisik APBN)
29	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	326,220,000.00	Perencanaan Penanganan Pantai Pagatan Kusan Hilir
30	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	326,220,000.00	Perencanaan Penanganan pantai Bunati
31	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	292,358,000.00	Perencanaan Penanganan pantai Rindu Alam
32	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	332,397,000.00	Perencanaan Penaganan Pantai Desa Kampung Baru (matone) dan Tanjung Petang Muara
33	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	47,913,000.00	Perencanaan Pengendalian Banjir Kec. Angsana
34	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,365,000.00	Perencanaan Rehabilitasi Sungai Pendamparan Kec. Kusan Hulu (Fisik belum dikerjakan)
35	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,688,000.00	Perencanaan Rehabilitasi Sungai Amparan Jambu Kec. Karang Bintang (Fisik belum dikerjakan)
36	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,325,000.00	Perencanaan Rehabilitasi Sungai Sebampan (Fisik belum dikerjakan)
37	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,545,000.00	Perencanaan Rehabilitasi Muara DAS Satui Barat Kec. Satui (Fisik belum dikerjakan)



No.	SKPD	Uraian	Harga	Keterangan
38	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,523,000.00	Perencanaan Rehabilitasi Sungai Desa Beringin Kec. Kusan Hilir (Fisik tidak termasuk aset karena hanya pengerukan sungai)
39	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,778,000.00	Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi tahun 2013 (Fisik belum dikerjakan)
40	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	46,531,000.00	Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air/Cek Dam/SITU/Danau Kec.Karang Bintang
41	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,521,000.00	Perencanaan Tanggul Penahan Banjir Irigasi Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Hulu
42	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	47,641,000.00	Perencanaan Tanggul Sungai Kec. Sei Loban
43	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,449,000.00	Perencanaan Tanggul Penahan Banjir Irigasi Desa Bakarangan Kec. Kusan Hulu
44	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	47,410,000.00	Perencanaan Peningkatan Irigasi Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Hulu
45	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,210,000.00	Perencanaan Normalisasi Sungai Pandamaran
46	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,986,000.00	Perencanaan Normalisasi Sungai Lantak
47	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	48,210,000.00	Perencanaan Normalisasi Sungai Serdangan
48	DPU	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	47,941,000.00	Perencanaan Normalisasi Alur Sungai Antasan Desa Saring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir
49	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	97,559,000.00	Perencanaan Detail Desain (DED) IKK Sungai Loban (Fisik belum di Kerjakan)
50	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	29,800,000.00	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal dan perpipaan percontohan
51	DPU	Saluran Sekunder	48,363,000.00	perencanaan peningkatan irigasi
52	DPU	Saluran Drainase	49,923,000.00	perencanaan pemeliharaan drainase kusan hilir
53	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	25,127,000.00	review desain SPAM IKK
54	DPU	Jalan Kabupaten Lokal	99,125,000.00	perencanaan peningkatan dan pelebaran jalan simpang sumpul
55	DPU	Tanggul Banjir	591,213,000.00	DED penanganan banjir kec. Satui
56	DPU	Saluran Drainase	49,850,000.00	perencanaan pemeliharaan drainase satui 2015
57	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	49,632,000.00	DED jaringan distribusi IKK
58	DPU	Jalan Kabupaten Lokal	100,355,000.00	pembangunan jalan lasung, satiung, salimuran
59	DPU	Jalan Desa	49,850,000.00	perencanaan jalan tapus - waringin tunggal
60	DPU	BangunanPenahan Banjir	591,900,000.00	DED penanganan banjir
61	DPU	Saluran Drainase	49,962,000.00	perencanaan pemeliharaan drainase simpang empat
62	DPU	BangunanPenahan Banjir	586,274,000.00	DED penanganan banjir
63	DPU	Jembatan Kayu	199,050,000.00	perencanaan jembatan transmigrasi untuk nelayan
64	DPU	Saluran Sekunder	48,360,000.00	perencanaan peningkatan rawa dan tambak
65	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	48,230,000.00	perencanaan pengembangan jaringan pipa distribusi air bersih
66	DPU	Jalan Kabupaten Lokal	99,805,000.00	perencanaan pelebaran jalan kersik putih
67	DPU	Jalan Kabupaten Lokal	98,969,000.00	perencanaan jalan gunung tinggi - sepunggur
68	DPU	Saluran Sekunder	47,751,000.00	perencanaan peningkatan irigasi dan tambak
69	DISTABHAN	Jalan Desa	4,900,000.00	perencanaan pju



No.	SKPD	Uraian	Harga	Keterangan
70	DISTABHAN	Jalan Desa	4,900,000.00	perencanaan pju
71	DISTABHAN	Jalan Desa	4,900,000.00	perencanaan pju
72	DISTABHAN	Jalan Desa	4,900,000.00	perencanaan pju
73	DISTABHAN	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	5,980,000.00	perencanaan pju desa sungai rukam
74	DISTABHAN	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	5,980,000.00	perencanaan pju jalan poros kuranji
75	RSUD	Instalasi Oksigen	183,802,395.00	Pengadaan Instalasi Oksigen Center RSUD
76	DISLUTKAN	Bangunan Dermaga	2,101,290,695.00	Pemutusan Kontrak
77	DISLUTKAN	Bangunan Dermaga	169,296,000.00	Perencanaan
78	DISKOMINFO	Sumur Gali (SGL)	6,950,000.00	Perencanaan Instalasi Air Terminal Pedesaan Angsana
79	DPU	Jembatan Beton	49,500,000.00	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Jembatan Karang Indah - Bunati, Sesuai Kontrak Nomor: 620/03/PR.JBT.BUNATI/BM-DPU/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,-
80	DPU	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	48,730,000.00	Perencanaan Relokasi IPA Kodeco No. 690/022/PERC.IPA.K/SE/CK-DU/2015, Tgl. 28 September 2015, Nilai Kontrak Rp. 48.730.000,-
81	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,269,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kuranji
82	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,126,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Angsana
83	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,291,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Satui
84	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,071,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sungai Loban
85	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,269,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan Hulu
86	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,850,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Karang Bintang
87	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,850,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan Hilir
88	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,115,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Batulicin
89	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,170,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Mantewe
90	DPU	Jalan Khusus Komplek	49,553,000.00	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Simpang Empat
91	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	43,460,000.00	Penyusunan Detail Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM IKK Angsana
92	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	43,460,000.00	Penyusunan Detail Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM IKK Kuranji
93	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	49,000,000.00	Perencanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kusan Hulu
94	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	49,000,000.00	Perencanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Satui
95	DPU	Taman	111,677,000.00	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kuranji
96	DPU	Taman	49,850,000.00	Review Perencanaan RTH Kawasan Gunung Tinggi
97	DPU	Bangunan Air Laut Lainnya	1,196,926,000.00	Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan (Multy Years)
98	DISTABHAN	Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	29,700,000.00	
99	DPU	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	43,460,000.00	Penyusunan Detail Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM IKK Kuranji
Sub Jumlah			11,393,405,090.00	
Total			17,191,238,290.00	

Saldo Per 1 Januari 2016 sebesar Rp17.664.388.337,00
a. Bertambah sebesar Rp3.886.127.000,00



- a) Pelaksanaan belanja selama tahun 2016 senilai Rp458.067.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.56
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja
Tahun 2016

No.	SKPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah (Rp)
1	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN	0.00	29,700,000.00	29,700,000.00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	0.00	428,367,000.00	428,367,000.00
JUMLAH		0.00	458,067,000.00	458,067,000.00

- b) Koreksi Belanja Modal konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1.883.076.000,00 yang terdiri dari :
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp458.435.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp234.596.000,00
 - Dinas Pasar senilai Rp6.875.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.143.460.000,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp39.710.000,00
- c) Terdapat Belanja barang jasa yang dicatat sebagai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp458.067.000,00
- d) Penambahan konstruksi dalam pengerjaan yang menjadi hutang senilai Rp1.544.984.000,00 terdiri dari:
- Dinas Kesehatan senilai Rp575.096.000,00
 - Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan senilai Rp7.000.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp962.888.000,00
- b. Pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp4.359.277.047,00
- Pengurangan senilai Rp4.359.277.047,00 terdiri dari :
- a) Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai pekerjaan fisiknya namun belum pencatatannya belum digabung dengan nilai pekerjaan fisiknya senilai Rp4.089.245.047,00 terdiri dari :
- Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp14.860.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp1.145.395.000,00
 - Dinas Pendapatan senilai Rp13.200.000,00
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika senilai Rp60.575.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.196.756.000,00
 - Dinas Pendidikan senilai Rp1.428.768.047,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor senilai Rp229.691.000,00
- b) pada tahun 2016 merupakan reklas dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan kepada aset tetap gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan. Reklas dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2015 senilai Rp270.032.000,00 yang terdiri dari :
- Kantor Ketahanan Pangan Daerah senilai Rp11.950.000;
 - Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp248.482.000,00
 - RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor senilai Rp9.600.000,00

Berdasarkan keseluruhan data diatas, total saldo Aset konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp17.191.238.290,00.



	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(911.260.251.668,54)	(709.861.980.072,07)

Seluruh nilai aset tetap kecuali tanah diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 dihitung dari saldo aset tetap per 31 Desember 2016 sesuai masa manfaat dan tarif penyusutan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus
- 2) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu
- 3) Nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan.

Hasil perhitungan penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku).

Berikut rincian akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2016:

Tabel 5.3.57
Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2016

Uraian	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	Nilai Buku Per 31 Desember 2015
PERALATAN DAN MESIN	185.898.992.101,38	151.199.770.782,01
02. Alat-alat Besar	15.224.549.606,77	13.041.872.866,43
03. Alat-alat Angkutan	67.989.355.789,23	55.939.019.518,09
04. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.506.013.924,11	1.197.374.975,53
05. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.857.197.445,45	1.565.163.869,22
06. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	58.560.607.175,14	47.859.749.372,59
07. Alat-alat Studio dan Komunikasi	7.947.423.078,88	6.774.191.884,05
08. Alat-alat Kedokteran	21.792.851.901,13	15.858.774.482,32
09. Alat-alat Laboratorium	10.743.084.132,85	8.753.463.703,12
10. Alat-alat Keamanan	277.909.047,82	210.160.110,66
GEDUNG DAN BANGUNAN	184.662.514.096,74	153.750.085.176,72
11. Bangunan Gedung	182.730.231.112,66	152.282.602.351,93
12. Bangunan Monumen	1.932.282.984,08	1.467.482.824,79
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	520.998.787.123,19	390.548.576.914,10
13. Jalan dan Jembatan	466.801.034.450,95	349.456.181.368,33
14. Bangunan Air/Irigasi	43.351.702.892,86	31.858.385.186,13
15. Instalasi	2.468.830.451,54	1.050.030.939,17
16. Jaringan	8.377.219.327,84	8.183.979.420,47
ASET TETAP LAINNYA	19.699.958.347,23	14.363.601.199,24
20. Aset Renovasi	19.699.958.347,23	14.363.601.199,24
Jumlah	911.260.251.668,54	709.862.034.072,07

Apabila disandingkan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.3.58
Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2016

Uraian	Aset Tetap Per 31 Desember 2016	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2016
TANAH	866.981.109.680.59	0.00	866.981.109.680.59
PERALATAN DAN MESIN	336.845.980.437.70	185.898.992.101.38	150.946.988.336.32
GEDUNG DAN BANGUNAN	691.588.076.047.70	184.662.514.096.74	506.925.561.950.96
JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	1.542.800.983.758.92	520.998.787.123.19	1.021.802.196.635.73



Uraian	Aset Tetap Per 31 Desember 2016	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2016
ASET TETAP LAINNYA	110.790.305.908.00	19.699.958.347.23	91.090.347.560.77
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	17.191.238.290.00	0.00	17.191.238.290.00
Jumlah	3.566.197.694.122.91	911.260.251.668.54	2.654.937.442.454.37

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.3.8 Aset Tetap yang nilainya dibawah Batas kapitalisasi	71.020.558.437,48	69.080.105.940,59

Saldo Aset Tetap yang nilainya dibawah batas kapitalisasi per 31 Desember 2016 dan 31 desember 2015 masing- masing sebesar Rp71.020.558.437,48 dan Rp69.080.105.940,59. Saldo Aset Tetap di bawah nilai kapitalisasi per 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp1.940.452.496,89 atau 2,73% dari saldo Aset Tetap yang nilainya dibawah batas kapitalisasi per 31 Desember 2015. Adapun rincian Aset Tetap yang nilainya dibawah batas kapitalisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.59
Mutasi Aset Tetap yang Nilainya Dibawah Batas Kapitalisasi
Tahun 2016 dan 2015

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Peralatan dan Mesin	46,157,377,104.09	44,549,367,050.50
2	Gedung dan Bangunan	2,744,890,693.58	2,707,924,693.58
3	Aset Tetap Lainnya	22,114,928,458.80	21,819,452,015.50
4	Aset Tak Berwujud	3,362,181.01	3,362,181.01
Jumlah		71,020,558,437.48	69,080,105,940.59

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Aset Tetap yang nilainya dibawah batas kapitalisasi telah mengalami peningkatan dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2016.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.4 Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum mempunyai Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2016.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	82.516.577.679,29	17.649.586.613,29

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp82.516.577.679,29 dan Rp17.649.586.613,29. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 bertambah sebesar Rp64.866.991.066,00 atau 367,53% dari total Aset Lainnya per 31 Desember 2015. Saldo Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain- lain, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi	0,00	21.441.964,28

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp0,00 dan Rp21.441.964,28.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud	2.590.628.194,36	2.392.028.194,36

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.590.628.194,36 dan Rp2.392.028.194,36. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp198.600.000,00 atau 8,30% dari Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 seluruhnya berupa software program aplikasi komputer hasil pengadaan SKPD. Daftar Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.3.60
Daftar Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya
Per 31 Desember 2016

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi 2016	Nilai Buku 2016
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	18.435.714,29	13.375.833,33	5.059.880,95
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.514.009,60	807.471,79	706.537,81
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	310.943.243,47	278.861.654,18	32.081.589,29
DINAS PENDAPATAN	791.749.500,00	473.470.625,00	318.278.875,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.925.727,00	1.657.696,83	1.268.030,17
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	292.860.000,00	239.169.000,00	53.691.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	38.500.000,00	8.983.333,33	29.516.666,67
DINAS KESEHATAN	109.550.000,00	29.213.333,33	80.336.666,67
RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR	598.350.000,00	209.227.500,00	389.122.500,00
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH	196.900.000,00	82.041.666,67	114.858.333,33
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	11.350.000,00	6.999.166,67	4.350.833,33
DINAS PEKERJAAN UMUM	198.600.000,00	3.310.000,00	195.290.000,00
Jumlah	2.590.628.194,36	1.366.067.281,13	1.224.560.913,23

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain	106.617.559.379,71	16.169.183.932,43

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp106.617.559.379,71 dan Rp16.169.183.932,43. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 naik sebesar Rp90.448.375.447,28 atau 17,88% dari saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015, yang disebabkan oleh koreksi, reklasifikasidan penghapusan. Adapun rincian mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.3.61
Aset Lain- lain
Per 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2015	Koreksi Tambah	Penghapusan	31 Desember 2016
Tanah	0,00	5.542.059.180,00	0,00	5.542.059.180,00
Peralatan dan Mesin	2.379.793.553,00	4.685.484.100,31	283.024.000,00	6.782.253.653,31
Gedung dan Bangunan	8.439.911.590,93	24.291.463.315,29	55.000.000,00	32.676.374.906,22



Uraian	31 Desember 2015	Koreksi Tambah	Penghapusan	31 Desember 2016
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.246.202.873,00	55.445.874.300,00	0,00	59.692.077.173,00
Aset Tetap Lainnya	1.103.275.915,50	410.295.551,68	600.000,00	1.512.971.467,18
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	411.823.000,00	0,00	411.823.000,00
Jumlah	16.169.183.932,43	90.786.999.447,28	338.624.000,00	106.617.559.379,71

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, aset lain- lain telah mengalami kenaikan dikarenakan adanya usulan perubahan kondisi aset tetap menjadi rusak berat sebesar Rp1.203.988.875,99, aset SMA/SMK yang akan diserahterimakan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp35.051.477.271,29, usulan hibah sebesar Rp767.081.000,00, dan aset tetap yang diusulkan sebagai penyertaan modal pada PDAM Bersujud sebesar Rp53.764.452.300,00.

		31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.1.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	25.325.542.613,65	0,00

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp25.325.542.613,65 merupakan akumulasi dari aset tetap yang rusak berat, Aset tetap SMA/SMK dan aset tetap yang diusulkan untuk penyertaan modal ke PDAM

		31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.2.	Kewajiban	114.961.083.567,27	43.905.219.897,12

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp114.961.083.567,27 dan Rp43.905.219.897,12. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp71.055.863.670,15 atau sebesar 161,84%. Saldo Kewajiban tersebut seluruhnya berupa Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	114.961.083.567,27	43.905.219.897,12

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp114.961.083.567,27 dan Rp43.905.219.897,12. Rincian kewajiban jangka pendek dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.270.964,00	11.665.679,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.270.964,00 dan Rp11.665.679,00. Saldo utang PFK per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp8.394.715,00 atau 71,96%. Utang PFK yang tertampung pada Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran yang terdapat pada:

1. Kelurahan Batulicin adalah utang pajak PPh pasal 21 sebesar Rp1.150.000,00
2. Kecamatan Karang Bintang sebesar Rp2.120.964,00 berupa:



- PPh 21 sebesar Rp865.000,00;
- PPh 22 sebesar Rp22.073,00;
- PPh 23 sebesar Rp762.300,00;
- PPhn sebesar Rp471.591,00.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka	401.112.574,90	234.443.344,74

Saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp401.112.574,00 dan Rp234.443.344,74, Jika dibandingkan dengan tahun 2015, saldo pendapatan diterima di muka tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp166.669,230,16 atau 71,09%.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 terdapat pada:

- Dinas Pendapatan untuk Pajak Reklame/Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp271.129.241,90;
- RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor pendapatan atas sewa Ruang ATM sebesar Rp129.983.333,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.62
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka RSUD
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1	Bank BRI	1 Bulan 2 Hari	2.400.000,00
2	Bank Kalsel	4 Tahun 3 Bulan 1 Hari	127.583.333,00
J U M L A H			129.983.333,00

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.2.1.3 Utang Belanja	10.152.876.784,72	22.307.152.363,00

Akun utang belanja merupakan akun untuk utang belanja barang dan jasa atau beban pada Laporan Operasional. Saldo utang belanja per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp10.152.876.784,72 dan Rp22.307.152.363,00. Saldo utang belanja per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp12.154.275.578,28 atau sebesar 54,49%. Daftar mutasi utang belanja dapat dilihat pada Tabel 5.3.63 dan rincian utang belanja pada Tabel 5.3.64.



Tabel 5.3.63
Daftar Mutasi Utang Belanja
Per 31 Desember 2016

No	SKPD	TAHUN 2015						UTANG BELANJA TAHUN 2016 (Rp)	JUMLAH UTANG BELANJA TAHUN 2016 (Rp)
		UTANG BELANJA (Rp)	Koreksi		YANG SUDAH DIBAYAR DI		SISA UTANG (Rp)		
			Tambah	Kurang	SKPD	BPKAD			
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7	9	10=8+9
1	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	745.146.000,00	0,00	0,00	461.680.000,00	283.466.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	18.169.293.695,00	0,00	0,00	18.169.293.695,00	0,00	0,00	8.145.788.674,00	8.145.788.674,00
3	Dinas Pendidikan	26.412.000,00	0,00	0,00	26.412.000,00	0,00	0,00	841.466.600,00	841.466.600,00
4	Dinas Perhubungan	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	194.400.000,00	0,00	0,00	194.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	507.550.000,00	0,00	0,00	73.800.000,00	433.750.000,00	0,00	460.087.000,00	460.087.000,00
7	RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	2.663.370.668,00	12.073.001,00	0,00	2.675.443.669,00	0,00	0,00	486.539.288,00	486.539.288,00
8	Dinas Tata Bangunan dan Keberssihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.125.000,00	139.125.000,00
9	Dinas Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949.222,72	17.949.222,72
10	Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.921.000,00	61.921.000,00
J u m l a h		22.307.152.363,00	12.073.001,00	0,00	21.602.009.364,00	717.216.000,00	0,00	10.152.876.784,72	10.152.876.784,72

Tabel 5.3.64
Rincian Utang Belanja
Per 31 Desember 2016

SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)
DINKES	Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	CV. Kenzo Borneo	99.496.000,00
DINKES	Belanja Pakaian Batik Tradisional	CV. Pelangi Biru	283.340.050,00
DINKES	Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan (Jamkesda)	RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	6.207.887.500,00
DINKES	Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov)	RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin	42.388.880,00
DINKES	Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov)	RSJ Sambang Lihum	5.051.680,00
DINKES	Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov)	RSUD Ulin Banjarmasin	161.333.942,00
DINKES	Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan Daerah/Provinsi (Jamkesda/Jamkesprov)	Pihak Ketiga	32.805.422,00
DINKES	Biaya Transportasi Rujukan	Pihak Ketiga	42.140.000,00
DINKES	Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan (Jamkesda)	Rumas Sakit Swasta	1.271.345.200,00
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas Ponpes Al Furqon	CV. Vertical Project	8.140.000,00
DISDIK	Pembangunan Ruang Guru Ponpes Al Furqon	CV. Daffa Berkah Abadi	139.557.600,00
DISDIK	Pengawasan Ruang Guru Ponpes Al Furqon	CV. Fortuner Project Consultant	8.162.000,00
DISDIK	Pengawasan Rehabilitasi Pagar MI Al Hidayah	CV. Kasuma Jaya Engineering	8.100.000,00
DISDIK	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas SD Muhammadiyah Kec. Satui	CV. Seno Nugraha Konsultan	8.100.000,00
DISDIK	Pembangunan Pagar SDIT Ar-Rasyid Kec. Batulicin	CV. Kalimantan	199.598.000,00
DISDIK	Pengawasan Pembangunan Pagar SDIT Ar-Rasyid Kec. Batulicin	CV. Kasuma Jaya Engineering	8.100.000,00
DISDIK	Pembangunan WC MI Nurul Hidayah	CV. Karya Bersinar Mandiri	199.275.000,00
DISDIK	Pengawasan WC MI Nurul Hidayah	CV. Asrindo Graha Konsultan	8.100.000,00
DISDIK	Pembangunan WC MTSN 1 Satui	CV. Borneo Jaya Mandiri	199.450.000,00
DISDIK	Pengawasan Pembangunan WC MTSN 1 Satui	CV. Afapasta Konsultan	8.050.000,00
DISDIK	Pengawasan Pembangunan WC SMP Muhammadiyah Kec. Kusan Hilir	CV. Ozone Dimensi Teknik	3.900.000,00



SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)
DISDIK	Pengawasan Pemasangan Paving Halaman SMP Muhammadiyah Kec. Kusan Hilir	CV. Ozone Dimensi Teknik	3.900.000,00
DISDIK	Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Mts Syarif Ali Kec. Angsana	CV. Afapasta Konsultan	8.050.000,00
DISDIK	Belanja yang bersumber dari Dana BOS	SDN. Saring Sungai Binjai	10.800.000,00
DISDIK	Belanja yang bersumber dari Dana BOS	SDN Emil Baru	20.184.000,00
DPU	Penggantian Kabel Optik Telkomsel	Telkomsel	200.000.000,00
DPU	Perencanaan Pemeliharaan Mushola Kantor Polres Tanah Bumbu	CV. Prima Teknik Consultant	9.700.000,00
DPU	Pengawasan Pemeliharaan Mushola Kantor Polres Tanah Bumbu	CV. Seno Nugraha konsultan	9.600.000,00
DPU	PENGAWASAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	CV. Alv@bet Medi@kons	39.182.000,00
DPU	Pengawasan Pemeliharaan Normalisasi Sungai Kec. Kusan Hilir Kec. Kusan Hulu Kec. Simpang Empat	CV. Fortuner Project Consultant	39.105.000,00
DPU	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas, Gedung Penjagaan dan Site Development Polres Tanah Bumbu	CV. Ganesha Teknik	49.300.000,00
DPU	Pengawasan Pembangunan Taman Mako Polres Tanah Bumbu	CV. Tornado Konsultan	9.600.000,00
DPU	Pengawasan Pembangunan Taman Lalu Lintas	CV. Tornado Konsultan	49.700.000,00
DPU	Perencanaan Pembangunan Mako Polres Tanah Bumbu	CV. Gambar Konsultan	49.000.000,00
DPU	Pengawasan pemasangan PJU Kantor Polres Tanah Bumbu	CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	4.900.000,00
RSUD	Pelayanan Kesehatan RSUD H. Andi Abdurrahman Noor (obat)	Distributor Obat	68.114.910,00
RSUD	Jasa Pelayanan RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	Pegawai RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	418.424.378,00
DTBK	Pemeliharaan Rutin PJU di Kec. Simpang Empat	CV. Panca Usaha Bersatu	139.125.000,00
DISPENDA	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Pegawai Dinas Pendapatan	17.949.222,72
Bag. UMUM	Belanja Makan Minum Acara	Depot Nalla	14.555.000,00
Bag. UMUM	Belanja Makan Minum Acara	Catering Athaya	5.317.000,00
Bag. UMUM	Belanja Makan Minum Acara	Catering Maurai	21.200.000,00
Bag. UMUM	Belanja Makan Minum Acara	Kantin Bersujud	20.849.000,00
Jumlah			10.152.876.784,72

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya	104.403.823.243,65	21.351.958.510,38

Akun utang jangka pendek lainnya merupakan akun untuk utang aset. Adapun saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp104.403.823.243,65 dan Rp21.351.958.510,38. Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp83.051.864.733,27 atau sebesar 388,97%. Kenaikan signifikan utang jangka pendek tahun 2016 ini dikarenakan adanya kelebihan penyaluran dari transfer pemerintah pusat atas dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp83.056.062.500. Daftar mutasi utang belanja dapat dilihat pada Tabel 5.2.65 dan rincian utang jangka pendek lainnya pada Tabel 5.2.66.



Tabel 5.3.65
Daftar Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2016

No	SKPD	TAHUN 2015				UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA TAHUN 2016 (Rp)	JUMLAH UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA TAHUN 2016 (Rp)
		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA (Rp)	YANG SUDAH DIBAYAR DI		SISA UTANG (Rp)		
			SKPD	BPKAD			
1	2	3	4	5	6=3-4-5	7	8=6+7
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	272.326.704,05	0,00	30.469.012,00	241.857.692,05	83.585.073.401,60	83.826.931.093,65
2	Dinas Pasar	379.958.370,00	379.958.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pendidikan	198.931.400,00	198.931.400,00	0,00	0,00	2.673.270.000,00	2.673.270.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	221.427.000,00	26.200.000,00	195.227.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	306.948.950,00	306.948.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	17.671.673.636,33	4.081.292.523,00	12.472.879.513,33	1.117.501.600,00	14.411.942.950,00	15.529.444.550,00
7	Bagian Pemerintahan (Setda)	1.038.700.000,00	1.038.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	1.261.992.450,00	1.261.992.450,00	0,00	0,00	417.090.000,00	417.090.000,00
9	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.687.600,00	1.263.687.600,00
10	RSUD H. Andi Abdurrahman Noor	0,00	0,00	0,00	0,00	543.600.000,00	543.600.000,00
11	Badan Lingkungan Hidup Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00
Jumlah		21.351.958.510,38	7.294.023.693,00	12.698.575.525,33	1.359.359.292,05	103.044.463.951,60	104.403.823.243,65

Tabel 5.3.66
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2016

SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)	Ket
BPKAD	Kelebihan Setor Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Pegawai	3.260.496,00	2015
BPKAD	Dana Desa dari APBN yang belum tersalurkan dan dikembalikan ke kasda oleh Desa	Pemerintah Pusat	238.597.196,05	2015
DPU	Pembayaran Termin 30% Review Masterplan Drainase Kabupaten Tanah Bumbu, Sesuai Kontrak No. 690/007/KONTRAK/CK/DPU/2015, Tgl. 30 Juni 2015, Nilai Kontrak Rp. 1.396.252.000,-	PT. Candi Kencana Sabdawisesa	335.100.480,00	2015
DPU	Pembayaran Termin 60% Review Masterplan Drainase Kabupaten Tanah Bumbu, Sesuai Kontrak No. 690/007/KONTRAK/CK/DPU/2015, Tgl. 30 Juni 2015, Nilai Kontrak Rp. 1.396.252.000,-	PT. Candi Kencana Sabdawisesa	335.100.480,00	2015
DPU	Pembayaran Termin 100% Review Masterplan Drainase Kabupaten Tanah Bumbu, Sesuai Kontrak No. 690/007/KONTRAK/CK/DPU/2015, Tgl. 30 Juni 2015, Nilai Kontrak Rp. 1.396.252.000,-	PT. Candi Kencana Sabdawisesa	446.800.640,00	2015
DPU	Kurang Bayar atas Pembayaran 100% Perencanaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Perkantoran Gunung Tinggi, Sesuai Kontrak No. 620/016/PEREC.PJLPG-SPK/BM/DPU/2015, Tgl. 10 Nopember 2015, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,-	CV. Empat Belas	500.000,00	2015
BPKAD	Dana Desa dari APBN yang belum tersalurkan dan dikembalikan ke kasda oleh Desa	Pemerintah Pusat	339.658.901,60	2016
BPKAD	Kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Pemerintah Pusat	83.056.262.500,00	2016
BPKAD	Kelebihan penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB Keluarga Berencana	Pemerintah Pusat	54.572.000,00	2016
BPKAD	Kelebihan penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Sarana Perdagangan	Pemerintah Pusat	134.580.000,00	2016
DINKES	Pembangunan Tahap II Puskesmas Lasung	CV. Muzakhir Jaya	302.253.600,00	2016
DINKES	Konsultan Pengawas Gedung Puskesmas Lasung	CV. Afapasta Consultant	38.789.000,00	2016
DINKES	Konsultan Pengawas Gedung Puskesmas Teluk Kepayang	CV. Fathir Al Maegaly Engineer	49.789.000,00	2016
DINKES	Peng. Peralatan Jaringan (Puskesmas Satui dan Pagatan)	CV. Kenzo Borneo	148.880.000,00	2016
DINKES	Peng. Peralatan Jaringan (Puskesmas Simpang Empat dan Batulicin)	CV. Kenzo Borneo	148.880.000,00	2016
DINKES	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit	CV. Asrindo Graha Consultant	446.038.000,00	2016



SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)	Ket
DINKES	Perencanaan Pembangunan Poskesdes Tungkaran Pangeran	CV. Dinar Dwi Cipta	17.600.000,00	2016
DINKES	Perencanaan Interior Kantor Dinas Kesehatan	CV. Tri Sakti Indonesia	21.890.000,00	2016
DINKES	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	CV. Fathir Al Maegaly Engineer	49.918.000,00	2016
DINKES	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas Kesehatan	CV. Rahmat Fajar Bersaudara	39.650.000,00	2016
DTBK	Perencanaan Pembuatan Taman Jalan Taman Dharma Praja	CV.Arisa Consultant	7.000.000,00	2016
DTBK	Pemasangan Fisik Lampu Penerangan Jalan Umum di Desa Wirittasi	CV. Rezeki Elektrik	97.930.000,00	2016
DTBK	Pemasangan PJU Jalan Ins Gub Kec. Simpang empat	CV. Duta Perkasa Mandiri	185.160.000,00	2016
DTBK	Pekerjaan Pembuatan bundaran tugu simpang empat kusambi	CV. Sumber Rezeki keluarga	120.000.000,00	2016
DTBK	Perencanaan Pembuatan bundaran tugu simpang empat kusambi	CV.Arisa Consultant	7.000.000,00	2016
RSUD	Pengadaan Alat Kedokteran (Mortuary)	PT. Matachana	543.600.000,00	2016
DPU	Peningkatan Jalan Tungkaran Pangeran Kodeco	PT. Hari Mulia Family	5.257.442.200,00	2016
DPU	Pengecoran Jalan Gg. Keluarga Kel. Kota Pagatan	CV. Sumber Arta	60.000.000,00	2016
DPU	Perkerasan Jalan (COR) menuju Musholla Al-Azhar RT.02 Kel. Gunung Tinggi	CV. Sumber Arta	48.500.000,00	2016
DPU	Peningkatan Jalan Lintas Desa, Desa Sepunggur Rt. 6 Kec. Kusan Hilir	CV. Bumi Temposok	102.000.000,00	2016
DPU	Peningkatan Jalan Lintas Desa, Desa Salimuran Rt. 1 Kec. Kusan Hilir	CV. Sejahtera Abadi Mandiri	199.400.000,00	2016
DPU	Pembangunan Jalan Lingkungan Teluk Kepayang	CV. Kalimantan	198.800.000,00	2016
DPU	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 13 Desa Teluk Kepayang	CV. Kalimantan	198.600.000,00	2016
DPU	Pembangunan Drainase Kec. Batulicin	CV. Perdana Putra Mandiri	840.314.450,00	2016
DPU	Pemasangan Paving Block Halaman Pasar Pagatan Tahap II	CV. Rafi Karya	289.714.800,00	2016
DPU	Pembangunan Infrastruktur IPLT (Pendamping APBN)	CV. Kalindo Ciptamega	219.376.000,00	2016
DPU	Pembangunan Embung Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu	CV. Kalimantan	198.697.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN SYARIF ALI KEC. SEI. LOBAN	CV. Jaya Sukses Sejahtera	32.120.000,00	2016
DPU	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Batulicin	CV. Setiatama Engineering	49.115.000,00	2016
DPU	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan Hulu	CV. Itnasindo Consultant	49.269.000,00	2016
DPU	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Mantewe	CV. Setiatama Engineering	49.170.000,00	2016
DPU	Perencanaan Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan	PT. Multi Setia Utama	48.471.000,00	2016
DPU	DED Irigasi Tanah Bumbu	CV. Sentratecs	426.864.600,00	2016
DPU	Penyusunan Neraca Air DAS Kusan	CV. Intishar Karya	237.132.500,00	2016
DPU	Fisibility Study Pembangunan Bendungan Kab. Tanah Bumbu	PT. Indra Karya (Persero) Wilayah I	1.651.072.500,00	2016
DPU	Penyusunan Neraca Air DAS Kusan	CV. Intishar Karya	94.853.000,00	2016
DPU	DED Irigasi Tanah Bumbu	CV. Sentratecs	39.184.400,00	2016
DPU	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Jl. Batulicin - Tanah Merah	PT. Belaputera Interplan	215.187.000,00	2016
DPU	Fisibility Study Pembangunan Bendungan Kab. Tanah Bumbu	PT. Indra Karya (Persero) Wilayah I	550.357.500,00	2016
DPU	Masterplan Perencanaan Penataan lingkungan Pantai dan Sungai Perkotaan (Water Front City)	PT. Bela Putra	705.221.000,00	2016
DPU	Penyusunan Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis Sistem Air Limbah Kab. Tanah Bumbu	PT. Kinarya Alam Raya	620.167.000,00	2016



SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)	Ket
DPU	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Karang Bintang	CV. Drajad Konsulindo	49.850.000,00	2016
DPU	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan Hilir	CV. Rahmat Banua Mandiri	49.850.000,00	2016
DPU	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Angsana	CV. Fortuner Project Consultant	46.200.000,00	2016
DPU	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Kusan Hilir	CV. Rohana Sultarindo	49.200.000,00	2016
DPU	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Simpang Empat	CV. Fiazta Matrix Consultant	49.150.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Drainase Kec. Batulicin	CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	49.300.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Drainase Kec. Kusan Hilir	CV. Tornado Konsultan	9.850.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Drainase Kec. Angsana	CV. Tornado Konsultan	29.850.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Drainase Kec. Simpang Empat	CV. Tornado Konsultan	49.150.000,00	2016
DPU	Pengawasan Perluasan Sambungan Rumah Ds. Rejosari Kec. Mantewe	CV. Seno Nugraha konsultan	49.732.000,00	2016
DPU	Pengawasan Perluasan Sambungan Rumah Ds. Kuranji Kec. Kuranji	CV. Trisakti Indonesia	49.688.000,00	2016
DPU	Pengawasan Perluasan Sambungan Rumah Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir	CV. Trisakti Indonesia	49.776.000,00	2016
DPU	Pengawasan Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sinar Bulan Kec. Satui	CV. Rohana Sultarindo	49.776.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pemasangan Pipa Pembuangan Air Cuci Belakang Kios Education Park	CV. Seno Nugraha konsultan	4.800.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman Pasar Pagatan Tahap II	CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	19.400.000,00	2016
DPU	Perencanaan Pembangunan Islamic Center	CV. Asrindo Graha Consultant	260.628.000,00	2016
DPU	Perencanaan dan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Simpang Empat	CV. Rohana Sultarindo	49.553.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur IPLT (Pendamping APBN)	CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	19.500.000,00	2016
DPU	Perencanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kusan Hulu	CV. Digdaya Mahardika	49.000.000,00	2016
DPU	Perencanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Satui	PT. Kinarya Alam Raya	49.000.000,00	2016
DPU	Perencanaan Kantor Kecamatan Kusan Hulu	CV. Fiazta	49.000.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. SIMPANG EMPAT	CV. Arsimetriks Damais	39.039.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. ANGSAANA	CV. Riscon Sultarindo	35.805.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. KARANG BINTANG	CV. Alv@bet Medi@kons	32.680.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. BATULICIN	CV. Alv@bet Medi@kons	32.570.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. KUSAN HULU	CV. Cipta Buditama	33.600.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. MENTEWE	CV. Fiazta Matrix	30.273.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. KURANJI	CV. Prima Teknik Consultant	39.800.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. SEI. LOBAN	CV. Widyadhana Sultan	39.700.000,00	2016
DPU	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. SATUI	CV. Quandran Teknikatama	44.668.000,00	2016
DPU	Pengawasan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KEC. KUSAN HILIR	CV. Citra Madya Design	35.800.000,00	2016



SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)	Ket
DPU	Pengawasan Peningkatan Jalan Tungkaran Pangeran Kodeco	CV. Widyadhana Sultan	18.177.000,00	2016
DPU	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Desa Maju Sejahtera	CV. Alv@bet Medi@kons	10.000.000,00	2016
DPU	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Desa Maju Sejahtera	CV. Alv@bet Medi@kons	10.000.000,00	2016
DPU	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa 3 Karang Bintang	CV. Alv@bet Medi@kons	10.000.000,00	2016
DPU	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa 3 Karang Bintang	CV. Alv@bet Medi@kons	10.000.000,00	2016
DPU	Pengawasan Peningkatan jalan batu harang kec. Mentewe	CV. Alv@bet Medi@kons	10.000.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Embung Desa Mangkal Api dan Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu	CV. Vertical Project	48.125.000,00	2016
DPU	Pengawasan Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan	CV. Griya Shanta	48.455.000,00	2016
DPU	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kuranji	CV. Prisma Jasa	111.677.000,00	2016
DPU	Review Perencanaan RTH Kawasan Gunung Tinggi (Pendamping APBN)	CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	49.850.000,00	2016
DPU	Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang	CV. Satria Borneo	198.600.000,00	2016
DPU	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Desa Maju Bersama	CV. ALVABET MEDI@KONS	10.000.000,00	2016
DPU	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Desa Maju Bersama	CV. ALVABET MEDI@KONS	10.000.000,00	2016
DPU	Pengawasan peningkatan daerah irigasi desa api-api kec. Kusan hilir	CV. Jaya Sukses Sejahtera	39.842.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SDN Sumber Makmur	CV. Empat Belas	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas SDN 1 Karang Indah	CV. Bias Teknologi	8.184.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas SDN 2 Karang Indah	CV. Bias Teknologi	8.184.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SDN Sumber Baru	CV. Seno Nugraha Konsultan	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas SDN 5 Tungkaran Pangeran	CV. Masjaya Graha Marga	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SDN 7 Sungai Danau	CV. Dian Mitra Teknika	8.100.000,00	2016
DISDIK	Penambahan Ruang Kelas SDN Binawara	CV. Amanah	199.383.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas SDN Binawara	CV. Fathir Al Maeqaly Engineer	8.140.000,00	2016
DISDIK	Penambahan Ruang Kelas SDN 2 Sari Gadung	CV. Kurnia Jaya Konsultan	199.611.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas SDN 2 Sari Gadung	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.140.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Kelas SDN 2 Sepunggur	CV. Vertical Project	8.173.000,00	2016
DISDIK	Rehabilitasi Kantor SDN 4 Kampung Baru	CV. Karya Bersinar Mandiri	199.110.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Kantor SDN 4 Kampung Baru	CV. Asrindo Graha Konsultan	8.120.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pembangunan Kantor SDN 2 Sungai Cuka	CV. Seno Nugraha Konsultan	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 2 Sungai Cuka	CV. Dian Mitra Teknika	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Ruang Guru SDN 1 Tungkaran Pangeran	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pagar SDN 8 Kampung Baru	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pagar SDN Indraloka Jaya	CV. Prima Teknik Konsultan	8.180.000,00	2016
DISDIK	Penambahan Ruang Kelas SDN Manuntung	CV. Amanah	199.531.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SDN Manuntung	CV. Afapasta Konsultan	8.140.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Paving Halaman SDN Mustika	CV. Prima Teknik Konsultan	8.180.000,00	2016
DISDIK	Pembangunan Pagar SDN 2 Kampung Baru	CV. Langgung Wealth	199.300.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pagar SDN 2 Kampung Baru	CV. Masjaya Graha Marga	8.100.000,00	2016



SKPD	Uraian	Utang Kepada	Nilai (Rp)	Ket
DISDIK	Pengawasan Pagar SDN 1 Kampung Baru	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.129.000,00	2016
DISDIK	Pembangunan Pagar SDN 1 Suka Damai	CV. Ridho Bersama	161.734.000,00	2016
DISDIK	Pembangunan Pagar SDN 2 Suka Damai	CV. Sabar Subur Mandiri	163.178.000,00	2016
DISDIK	Pembuatan Tempat Parkir SDN 1 Kota Pagatan Fisik	CV. Evolution Project	84.506.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pembuatan Tempat Parkir SDN 1 Kota Pagatan Fisik	CV. Fortuner Project Consultant	4.483.000,00	2016
DISDIK	Pemasangan Paving Halaman SDN 3 Tungkaran Pangeran	CV. Zabrina Putri Mandiri	198.630.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pemasangan Paving Halaman SDN 3 Tungkaran Pangeran	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.100.000,00	2016
DISDIK	Penambahan Pagar SDN Mudalang	CV. Karya Indah Lestari	199.602.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Pagar SDN Mudalang	CV. Genindo Konsultan	8.140.000,00	2016
DISDIK	Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Bayansari	CV. Nabila Jaya Abadi	199.345.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Bayansari	CV. Bias Teknologi	8.173.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Pasar Baru	CV. Vertical Project	8.140.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Batulicin	CV. Pendang Jaya Raya Engineering	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pemasangan Paving Halaman TK Negeri Pembina Kecamatan Mantewe	CV. Ridho Bersama	197.980.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pemasangan Paving Halaman TK Negeri Pembina Kecamatan Mantewe	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.140.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SMPN 1 Karang Bintang	CV. Kurnia Jaya Konsultan	8.140.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pengurukan Halaman SMPN 5 Simpang Empat	CV. Griya Shanta	8.100.000,00	2016
DISDIK	Penambahan Ruang Kelas SMPN 1 Satui	CV. Kalimantan	198.934.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas SMPN 1 Satui	CV. Kasuma Jaya Engineering	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Angsana	CV. Genindo Konsultan	8.000.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Kuranji	CV. Afapasta Konsultan	8.050.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pembangunan Kantor SMPN 2 Kusan Hulu	CV. Empat Belas	8.090.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kusan Hulu	CV. Mitra Utama Teknika	8.100.000,00	2016
DISDIK	Pengawasan Pembangunan Pagar SMPN 4 Kusan Hulu	CV. Dian Mitra Teknika	8.100.000,00	2016
BLHD	Pengadaaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	CV. Kreasi Barbara Utama	149.800.000,00	2016
Jumlah			104.403.823.243,65	

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sama sebesar Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sampai tanggal 31 Desember 2016 tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.



	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.3.3. Ekuitas	2.929.173.906.681,08	2.886.228.985.550,91

Ekuitas merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.929.173.906.681,08 dan Rp2.886.228.985.550,91. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 naik sebesar Rp42.944.921.130,17 atau 1,49% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2015.

Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.929.173.906.681,08 merupakan perhitungan dari Aset sebesar Rp3.044.134.990.248,35 dikurangi kewajiban sebesar Rp114.961.083.567,27.





5.4 KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tercermin dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit operasional. Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan LO yang disandingkan dengan LO tahun 2015. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dilaksanakan dengan pendekatan antara LRA ke LO. Inventarisasi akun- akun unsur pembentuk LO dilakukan dari LRA dengan tambahan fomula, sehingga pembentukan LO sebagai berikut:

1. Pendapatan- LO

Pendapatan- LO diakui dan dihitung berdasarkan formula berikut:

Pendapatan- LO = Nilai Pendapatan pada LRA
(-) Jumlah Pelunasan Piutang dari Piutang per 31 Desember 2015
(-) Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016
(+) Jumlah Piutang dari SKP/SKR Daerah Tahun 2016
(+) Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015

Pendapatan - LO sebagai akibat penerimaan aset hibah diakui sebesar nilai barang hibah yang telah dicatat pada Neraca.

Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut di atas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Pendapatan- LO, seperti ketentuan pajak dan ketentuan retribusi.

2. Beban

Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (*accrued*), nilai pada Tahun 2016 dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Beban = Nilai Belanja pada LRA
(+) Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015
(+) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2016
(-) Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2016
(-) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2015

Beban persediaan dihitung berdasarkan saldo persediaan per 31 Desember 2015 ditambah belanja persediaan pada LRA Tahun 2016 dikurangi saldo persediaan per 31 Desember 2016.

Beban penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dihitung berdasarkan umur piutang dan masa manfaat aset tetap atau aset tak berwujud sesuai kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut di atas direkonsiliasi dengan dokumen sumber sebagai dasar pengakuan Beban.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1. Pendapatan- LO	1.292.394.655.634,26	1.364.737.803.857,79

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4.1
Pendapatan- LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	103,932,338,508.36	149,356,894,496.93
2	Pendapatan Transfer	1,070,820,782,755.40	1,101,465,127,075.58
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	117,641,534,370.50	113,915,782,285.28
Jumlah		1,292,394,655,634.26	1,364,737,803,857.79

Masing- masing akun pendapatan- LO dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah- LO	103.932.338.508,36	149.356.894.496,93

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2016 sebesar Rp103.932.338.508,36. Pendapatan Asli Daerah - LO diperoleh dari jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) ataupun ketetapan lain yang dipersamakan dimana ketetapan tersebut menjadi dasar hak penerimaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah- LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	30,387,885,826.84	34,804,602,320.79
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7,713,575,295.00	7,513,765,220.00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,991,705,932.38	5,883,277,994.00
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	61,839,171,454.14	101,155,248,962.14
Jumlah		103,932,338,508.36	149,356,894,496.93

Pendapatan Asli Daerah - LO apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA maka terdapat perbedaan sebesar Rp12.305.324.398,59 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah- LO
Dengan Pendapatan Asli Daerah- LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	30,387,885,826.84	29,308,277,135.00	1,079,608,691.84
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7,713,575,295.00	7,772,789,470.00	(59,214,175.00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,991,705,932.38	3,991,705,932.38	0.00
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	61,839,171,454.14	75,164,890,369.57	(13,325,718,915.43)
Jumlah		103,932,338,508.36	116,237,662,906.95	(12,305,324,398.59)

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengakuan yang tidak sama yaitu:

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima, sedangkan Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas suatu pendapatan meskipun kas belum diterima. Penjelasan lebih rinci Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebagai berikut:



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah- LO	30.387.885.826,84	34.804.602.320,79

Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp30.387.885.826,84 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah wajib Pajak	SKP-D Terbit Tahun 2016 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Awal (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Akhir (Rp)	Jumlah Pendapatan - LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Pajak Hotel - LO	42	1,083,992,841.00	0.00	0.00	1,083,992,841.00
2	Pajak Restoran - LO	346	2,945,685,835.00	0.00	0.00	2,945,685,835.00
3	Pajak Hiburan - LO	11	604,684,753.00	0.00	0.00	604,684,753.00
4	Pajak Reklame - LO	192	540,690,611.00	222,122,594.74	271,129,241.90	491,683,963.84
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	98,086	11,601,305,620.00	0.00	0.00	11,601,305,620.00
6	Pajak Air Tanah - LO	5	11,213,160.00	0.00	0.00	11,213,160.00
7	Pajak Sarang Burung Walet - LO	7	77,606,000.00	0.00	0.00	77,606,000.00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	233	1,088,523,101.00	0.00	0.00	1,088,523,101.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	36,739	5,837,398,553.00	0.00	0.00	5,837,398,553.00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	1,631	6,645,792,000.00	0.00	0.00	6,645,792,000.00
Jumlah		137,292	30,436,892,474.00	222,122,594.74	271,129,241.90	30,387,885,826.84

Pada Pendapatan Pajak - LO terdapat perbedaan sebesar Rp1.079.608.691,84 dengan Pendapatan Pajak - LRA, perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah di LO dan di LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	1.083.992.841,00	1.102.527.608,00	(18.534.767,00)
2	Pajak Restoran - LO	2.945.685.835,00	3.067.017.999,00	(121.332.164,00)
3	Pajak Hiburan - LO	604.684.753,00	619.049.091,00	(14.364.338,00)
4	Pajak Reklame - LO	491.683.963,84	540.690.611,00	(49.006.647,16)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	11.601.305.620,00	11.552.764.359,00	48.541.261,00
6	Pajak Air Tanah - LO	11.213.160,00	10.883.480,00	329.680,00
7	Pajak Sarang Burung Walet - LO	77.606.000,00	77.606.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.088.523.101,00	1.076.610.963,00	11.912.138,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	5.837.398.553,00	4.615.335.024,00	1.222.063.529,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	6.645.792.000,00	6.645.792.000,00	0,00
Jumlah		30.387.885.826,84	29.308.277.135,00	1.079.608.691,84

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pendapatan Pajak - LO	Rp	30,387,885,826.84		
Pendapatan Pajak - LRA	Rp	29,308,277,135.00	(-)	
Perbedaan				Rp 1,079,608,691.84
Penjelasan Perbedaan:				
Piutang Pajak dari SKP PBB-P2 Tahun 2016	Rp	3,343,452,517.00		
Pelunasan Piutang Pajak Tahun Sebelumnya	Rp	(2,308,285,368.00)	(+)	
				Rp 1,035,167,149.00 (+)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015	Rp	101,793,163.00		
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016	Rp	(113,705,301.00)		
				Rp (11,912,138.00) (+)
Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2015	Rp	1,825,120.00		
Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2016	Rp	(2,154,800.00)		
				Rp (329,680.00) (+)
Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015	Rp	971,697,126.00		
Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2016	Rp	(1,020,238,387.00)		
				Rp (48,541,261.00) (+)
Piutang Pajak Hiburan Tahun 2015	Rp	30,653,588.00		
Piutang Pajak Hiburan Tahun 2016	Rp	(16,289,250.00)		
				Rp 14,364,338.00 (+)
Piutang Pajak Restoran Tahun 2015	Rp	279,453,087.00		
Piutang Pajak Restoran Tahun 2016	Rp	(158,120,923.00)		
				Rp 121,332,164.00 (+)
Piutang Pajak Hotel Tahun 2015	Rp	23,106,600.00		
Piutang Pajak Hotel Tahun 2016	Rp	(4,571,833.00)		
				Rp 18,534,767.00 (+)
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	222,122,594.74		
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	(271,129,241.90)		
				Rp (49,006,647.16) (+)
				Rp 1,079,608,691.84
				Rp -

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah- LO	7.713.575.295,00	7.513.765.220,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing- masing SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi- LO Tahun 2016 berdasarkan jenis Surat Ketetapan Retribusi atau yang dipersamakan adalah sebagai berikut:



Tabel 5.4.6
Pendapatan Retribusi Daerah- LO
Tahun 2016

SKPD		Retribusi	SKR-D Terbit Tahun 2016 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Awal (Rp)	Jumlah Pendapatan - LO (Rp)
Dinas Kesehatan	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	982.606.500,00	0,00	982.606.500,00
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	527.680.000,00	0,00	527.680.000,00
	2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	898.027.570,00	0,00	898.027.570,00
Dinas Pasar	1	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	681.748.830,00	0,00	681.748.830,00
	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	84.250.000,00	0,00	84.250.000,00
	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	76.650.000,00	0,00	76.650.000,00
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	73.050.000,00	0,00	73.050.000,00
	2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	233.562.850,00	0,00	233.562.850,00
	3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	108.535.303,00	0,00	108.535.303,00
	4	Retribusi Terminal - LO	24.136.000,00	0,00	24.136.000,00
	5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	116.423.750,00	0,00	116.423.750,00
	6	Retribusi Izin Trayek - LO	9.903.600,00	0,00	9.903.600,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	354.010.000,00	0,00	354.010.000,00
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	1	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
Dinas Pertambangan dan Energi	1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	291.966.000,00	0,00	291.966.000,00
Badan Lingkungan Hidup Daerah	1	Retribusi Izin Gangguan - LO	1.712.046.192,00	0,00	1.712.046.192,00
	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.523.548.700,00	0,00	1.523.548.700,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Retribusi Izin Perikanan - LO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Jumlah			7.701.475.295,00	12.100.000,00	7.713.575.295,00

Antara Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi - LRA, terdapat perbedaan sebesar Rp135.200.000,00. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan di LRA
Tahun 2016

SKPD		Retribusi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Dinas Kesehatan	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	982.606.500,00	982.606.500,00	0,00
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	527.680.000,00	527.680.000,00	0,00
	2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	898.027.570,00	898.027.570,00	0,00
Dinas Pasar	1	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	681.748.830,00	609.863.005,00	(71.885.825,00)
	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	84.250.000,00	84.250.000,00	0,00
	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	76.650.000,00	74.650.000,00	(2.000.000,00)
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00
	2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	233.562.850,00	233.562.850,00	0,00
	3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	108.535.303,00	108.535.303,00	0,00
	4	Retribusi Terminal - LO	24.136.000,00	24.136.000,00	0,00
	5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	116.423.750,00	116.423.750,00	0,00
	6	Retribusi Izin Trayek - LO	9.903.600,00	9.903.600,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	354.010.000,00	354.010.000,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	1	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
Dinas Pertambangan dan Energi	1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	12.100.000,00	145.200.000,00	133.100.000,00
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	291.966.000,00	291.966.000,00	0,00
Badan Lingkungan Hidup Daerah	1	Retribusi Izin Gangguan - LO	1.712.046.192,00	1.712.046.192,00	0,00
	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.523.548.700,00	1.523.548.700,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Retribusi Izin Perikanan - LO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Jumlah			7.713.575.295,00	7.772.789.470,00	59.214.175,00

Pendapatan Retribusi - LRA tampak lebih besar bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi - LO sebesar Rp59.214.175,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi - LO	Rp	7,713,575,295.00	
Pendapatan Retribusi - LRA	Rp	7,772,789,470.00	(-)
Perbedaan			Rp (59,214,175.00)

Penjelasan Perbedaan:

Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Cetak Peta	Rp	(12,100,000.00)	
Pelunasan Piutang Retribusi Cetak Peta Tahun Sebelumnya	Rp	(121,000,000.00)	
Pendapatan Retribusi Pasar yang belum diterima	Rp	73,885,825.00	(+)
			Rp (59,214,175.00) (-)
			Rp -

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	3.991.705.932,38	5.883.277.994,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO sebesar Rp3.991.705.932,38, terdiri dari:

1. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel sebesar Rp2.484.274.081,00;
2. Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD Batulicin Jaya Utama sebesar Rp1.507.431.851,38.

Antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA tidak ada perbedaan.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	61.839.171.454,14	101.155.248.962,14

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	4,743,000.00	0.00
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	4,049,783,564.00	162,740,283.00
3	Penerimaan Bunga Deposito – LO	2,003,830,880.75	5,867,634,598.05
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	1,941,735,948.92	303,987,146.38
5	Pendapatan Denda Pajak – LO	304,316,919.74	231,831,877.16
6	Pendapatan BLUD – LO	38,366,636,181.36	65,838,218,881.94
7	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	7,019,103,016.37	24,111,002,693.61
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	8,045,379,500.00	4,594,480,461.00
9	Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOS	46,792,001.00	45,353,021.00
10	Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOP/BOMM	56,850,442.00	0.00
Jumlah		61,839,171,454.14	101,155,248,962.14



Tabel 5.4.9
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Lainnya di LO dan di LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	4,743,000.00	4,743,000.00	0.00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	4,049,783,564.00	4,006,176,255.00	43,607,309.00
3	Penerimaan Bunga Deposito - LO	2,003,830,880.75	2,144,969,363.66	(141,138,482.91)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1,941,735,948.92	2,153,512,679.00	(211,776,730.08)
5	Pendapatan Denda Pajak - LO	304,316,919.74	304,316,919.74	0.00
6	Pendapatan BLUD - LO	38,366,636,181.36	51,339,038,843.80	(12,972,402,662.44)
7	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	7,019,103,016.37	7,105,103,866.37	(86,000,850.00)
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	8,045,379,500.00	8,050,179,000.00	(4,799,500.00)
9	Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOS	46,792,001.00		46,792,001.00
10	Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOP/BOMM	56,850,442.00	56,850,442.00	0.00
Jumlah		61,839,171,454.14	75,164,890,369.57	(13,325,718,915.43)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LRA tampak lebih besar bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO sebesar Rp13.325.718.915,43. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	Rp	61,839,171,454.14	
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LRA	Rp	75,164,890,369.57	(-)
Perbedaan			Rp(13,325,718,915.43)

Penjelasan Perbedaan:

SKTJM Tahun 2016 yang belum dibayar	Rp	196,193,709.42	
Pelunasan Piutang Bunga Deposito Tahun 2015	Rp	(141,138,482.91)	
Pendapatan Jasa Giro	Rp	43,607,309.00	
Pelunasan Piutang RSUD Tahun 2015	Rp	(19,306,839,171.44)	
Pendapatan diterima dimuka RSUD Tahun 2015	Rp	220,750.00	
Dana JKN untuk tahun 2015	Rp	(4,799,500.00)	
Piutang RSUD Tahun 2016 yang diterima	Rp	6,334,436,509.00	
Pelunasan TGR dai SKTJM Tahun Sebelumnya	Rp	(407,970,439.50)	
Pelunasan Piutang Pajak yang sudah dihapusbukukan	Rp	45,870,488.00	
Pelunasan Piutang Retribusi Distamben yang sudah dihapusbukukan	Rp	12,100,000.00	
Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOS	Rp	46,792,001.00	
Piutang RSUD Tahun 2016 yang diterima (Jasa Adm Bank)	Rp	899,245.00	
Penerimaan Dana Titipan BRI (Honor PTT Disdik)	Rp	(15,066,000.00)	
Penerimaan Kas Lainnya di Bendh.Pengeluaran (Kec. Kusan Hilir)	Rp	(42,000.00)	
Pendapatan diterima dimuka RSUD Tahun 2016	Rp	(129,983,333.00)	(+)
			Rp(13,325,718,915.43)
			Rp -

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO	1.070.820.782.755,40	1.101.465.127.075,58

Pendapatan Transfer tahun 2016 sebesar Rp1.070.820.782.755,40 merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Transfer-LO berdasarkan ketetapan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sebagai berikut:



Tabel 5.4.10
Pendapatan Transfer - LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	940,989,940,830.00	954,528,068,731.00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61,011,900,418.00	66,081,440,000.00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	68,818,941,507.40	80,855,618,344.58
Jumlah		1,070,820,782,755.40	1,101,465,127,075.58

Tabel 5.4.11
Perbandingan Pendapatan Transfer di LO dan di LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	940,989,940,830.00	1,085,582,320,834.00	(144,592,380,004.00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61,011,900,418.00	149,792,752,518.00	(88,780,852,100.00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	68,818,941,507.40	74,626,379,596.00	(5,807,438,088.60)
Jumlah		1,070,820,782,755.40	1,310,001,452,948.00	(239,180,670,192.60)

Rincian Penjelasan Pendapatan Transfer - LO sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - LO	940.989.940.830,00	954.528.068.731,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan untuk periode Tahun 2016 terdiri atas pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	76,263,659,228.00	22,480,595,100.00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	280,880,320,637.00	437,385,426,631.00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	465,897,113,000.00	445,258,297,000.00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	117,948,847,965.00	49,403,750,000.00
Jumlah		940,989,940,830.00	954,528,068,731.00

Tabel 5.4.13
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di LO dan di LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan(Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	76,263,659,228.00	84,973,743,533.00	(8,710,084,305.00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	280,880,320,637.00	416,573,464,336.00	(135,693,143,699.00)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	465,897,113,000.00	465,897,113,000.00	0.00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	117,948,847,965.00	118,137,999,965.00	(189,152,000.00)
Jumlah		940,989,940,830.00	1,085,582,320,834.00	(144,592,380,004.00)



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA tampak lebih besar bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp144.592.380.004,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	Rp 940,989,940,830.00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	<u>Rp 1,085,582,320,834.00</u>	(-)
Perbedaan		Rp (144,592,380,004.00)

Penjelasan Perbedaan:

Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Pemerintah Tahun 2013 dan 2014	Rp (8,710,084,305.00)	(-)
Kelebihan Setor DBH SDH 2016	Rp (83,056,262,500.00)	(-)
Kelebihan Setor DAK Fisik 2016	Rp (189,152,000.00)	(-)
Kurang Bayar DBH Dari Provinsi SDH Tahun 2014	Rp (170,208,000.00)	(-)
Kurang Bayar DBH Iurang Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) Tahun 2014	<u>Rp (52,466,673,199.00)</u>	(-)
		<u>Rp (144,592,380,004.00)</u>
		Rp -

	<u>Tahun 2016 (Rp)</u>	<u>Tahun 2015 (Rp)</u>
5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	61.011.900.418,00	66.081.440.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO untuk periode Tahun 2016 sebesar Rp61.011.900.418,00 merupakan penerimaan Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	45,617,097,918.00	62,397,740,000.00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	3,121,280,000.00	1,683,700,000.00
3	Dana Insentif Daerah - LO	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	2,740,500,000.00	0.00
5	Jaminan Persalinan	923,497,500.00	0.00
6	Pendapatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3,576,000,000.00	0.00
7	Pendapatan Bantuan Operasional KB	33,525,000.00	0.00
Jumlah		61,011,900,418.00	66,081,440,000.00

Tabel 5.4.15
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya di LO dan di LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	45,617,097,918.00	45,617,097,918.00	0.00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	3,121,280,000.00	3,121,280,000.00	0.00
3	Dana Insentif Daerah - LO	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	2,740,500,000.00	2,740,500,000.00	0.00
5	Jaminan Persalinan	923,497,500.00	923,497,500.00	0.00
6	Pendapatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3,576,000,000.00	3,576,000,000.00	0.00
7	Pendapatan Bantuan Operasional KB	33,525,000.00	33,525,000.00	0.00
8	Dana Desa	0.00	88,780,852,100.00	(88,780,852,100.00)
Jumlah		61,011,900,418.00	149,792,752,518.00	0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA terdapat perbedaan sebesar Rp88.780.852.100,00 akibat tidak diakuinya Pendapatan Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat pada LO.



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	68.818.941.507,40	80.855.618.344,58

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO sebesar Rp68.818.941.507,40 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.16
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun 2016 dan 2015

No	No PERGUB	Uraian	Bulan	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	PERGUB NO 023 TAHUN 2016	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	JAN- MAR 2016	10.216.657.043,00	12.739.746.566,00
2	PERGUB NO 022 TAHUN 2016	Pajak Kendaraan Bermotor		2.862.473.161,00	2.466.213.648,76
3	PERGUB NO 022 TAHUN 2016	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		2.106.554.229,00	2.380.980.394,00
4	PERGUB NO 024 TAHUN 2016	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		10.608.613,00	24.251.583,00
5		Pajak Rokok		0,00	0,00
6	PERGUB NO 042 TAHUN 2016	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	APR- JUNI 2016	7.973.936.044,00	13.690.007.502,00
7	PERGUB NO 041 TAHUN 2016	Pajak Kendaraan Bermotor		3.356.151.270,00	2.826.614.360,00
8	PERGUB NO 041 TAHUN 2016	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		2.127.352.958,00	2.431.929.334,00
9	PERGUB NO 043 TAHUN 2016	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		30.361.435,00	10.126.885,00
10	PERGUB NO 035 TAHUN 2016	Pajak Rokok		574.585.619,00	1.970.234.245,00
11	PERGUB NO 062 TAHUN 2016	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	JULI- SEPT 2016	10.897.471.797,00	12.581.824.746,49
12	PERGUB NO 061 TAHUN 2016	Pajak Kendaraan Bermotor		2.980.697.396,00	2.716.719.430,69
13	PERGUB NO 061 TAHUN 2016	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		2.006.808.282,00	2.296.097.427,39
14	PERGUB NO 063 TAHUN 2016	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		30.714.035,00	15.245.128,00
15	PERGUB NO 051 TAHUN 2016	Pajak Rokok		2.946.259.067,00	4.373.522.079,87
16	PERGUB NO 065 TAHUN 2016	Pajak Rokok (Untuk Bulan Oktober)	OKT- DES 2016	2.567.994.873,00	0,00
17	PERGUB NO 078 TAHUN 2016	Pajak Rokok (Untuk Bulan Desember)		1.875.112.402,00	3.697.722.995,58
18	PERGUB NO 09 TAHUN 2017	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		11.225.290.006,00	11.399.410.459,00
19	PERGUB NO 08 TAHUN 2017	Pajak Kendaraan Bermotor		2.902.125.594,00	2.981.865.402,00
20	PERGUB NO 08 TAHUN 2017	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		2.087.252.268,00	2.217.164.444,00
21	PERGUB NO 010 TAHUN 2017	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		40.535.415,40	35.941.714,00
Jumlah				68.818.941.507,40	80.855.618.344,78

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO terdapat perbedaan sebesar Rp5.807.438.088,60 dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA, perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.17
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi di LO dan di LRA
Tahun 2016

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40,313,354,890.00	40,487,475,343.00	(174,120,453.00)
2	Pajak Kendaraan Bermotor	12,101,447,421.00	12,181,187,229.00	(79,739,808.00)
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8,327,967,737.00	8,457,879,913.00	(129,912,176.00)
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	112,219,498.00	107,625,797.00	4,593,701.00
5	Pajak Rokok	7,963,951,961.40	13,392,211,314.00	(5,428,259,352.60)
Jumlah		68,818,941,507.40	74,626,379,596.00	(5,807,438,088.60)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Rp	68,818,941,507.40	
Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	Rp	74,626,379,596.00	(-)
			Rp (5,807,438,088.60)
Penjelasan Perbedaan:			
Piutang dari Bagi Hasil Pajak Tahun 2016	Rp	18,130,315,685.40	
Pelunasan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	(20,332,105,014.00)	
Koreksi saldo Awal Piutang Tahun 2015	Rp	(3,605,648,760.00)	(+)
			Rp (5,807,438,088.60) (-)
			Rp (0.00)

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.3. Lain- lain Pendapatan yang Sah- LO	117.641.534.370,50	113.915.782.285,28

Lain- lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2016 sebesar Rp117.641.534.370,50 berupa Pendapatan Hibah.

Penjelasan lebih rinci Lain- lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah- LO	117.641.534.370,50	113.915.782.285,28

Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebesar Rp117.641.534.370,50 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.18
Pendapatan Hibah- LO
Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO :	40,522,258,000.00	48,380,682,486.28
- Pendapatan Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	36,742,300,000.00	36,312,650,000.00
- Pendapatan Barang dari Kementerian Pendidikan	0.00	1,511,851,300.00
- Pendapatan Barang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,779,958,000.00	6,290,631,186.28
- Pendapatan Barang dari Kementerian Peternakan	0.00	4,265,550,000.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri (Berupa Aset Tetap) yang diterima oleh SKPD :	38,756,015,381.50	17,022,091,950.00
- Dinas Pekerjaan Umum	9,512,680,249.50	15,238,448,100.00
- Dinas Pendidikan	10,841,582,122.00	1,599,395,000.00
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0.00	149,100,000.00
- Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal	0.00	35,148,850.00
- Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	10.00	0.00
- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan	18,182,573,000.00	0.00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	219,180,000.00	0.00
Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga-LO*) :	38,363,260,989.00	48,513,007,849.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga Bidang Pertambangan-LO	36,297,765,147.00	43,850,583,773.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga Bidang Kehutanan-LO	33,862,730.00	84,805,900.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga Bidang Perkebunan-LO	361,815,065.00	219,859,743.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga Bidang Perikanan-LO	37,131,500.00	24,840,000.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga Bidang PPI-LO	147,598,500.00	90,633,000.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga Bidang Penggunaan Jalan-LO	1,337,040,844.00	4,242,285,433.00
- Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga PT . Arutmin Indonesia (Lumpsum Payment)	148,047,203.00	0.00
Jumlah	117,641,534,370.50	113,915,782,285.28

Pendapatan Hibah - LO dengan Pendapatan Hibah - LRA terdapat perbedaan



sebesar Rp68.324.205.000,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Hibah - LO	Rp	117,641,534,370.50	
Pendapatan Hibah - LRA	Rp	38,363,260,989.00	(+)
Perbedaan	Rp	79,278,273,381.50	

Penjelasan Perbedaan:

Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Rp	40,522,258,000.00	(+)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	Rp	38,756,015,381.50	(+)
	Rp	79,278,273,381.50	
	Rp	-	

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2. Beban	1.295.338.799.978,56	1.283.604.292.341,50

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 sebesar Rp1.295.338.799.978,56 yang terdiri dari beban operasi dan beban transfer sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1. Beban Operasi	1.201.411.656.934,96	1.138.082.067.366,50

Beban Operasi Tahun 2016 sebesar Rp1.201.411.656.934,96 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Beban Operasi
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Beban Pegawai	454.543.661.672,72	412.173.803.904,34
2	Beban Persediaan	44.232.202.682,38	75.566.825.255,30
3	Beban Jasa	331.415.946.602,06	294.321.206.326,92
4	Beban Pemeliharaan	19.587.573.994,00	20.282.418.311,00
5	Beban Perjalanan Dinas	54.967.145.896,00	38.442.799.093,00
6	Beban Hibah	51.527.050.705,83	86.152.969.033,00
7	Beban Bantuan Sosial	544.800.000,00	1.369.500.000,00
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	207.460.470.940,88	174.898.280.680,58
9	Beban Penyisihan Piutang	7.487.617.635,83	6.705.855.269,48
10	Beban Lain-lain	29.645.186.805,26	28.168.409.492,88
Jumlah		1.201.411.656.934,96	1.138.082.067.366,50

Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk membentuk komponen yang sama dengan Beban Operasi pada LO, maka dilakukan konversi atas Belanja Barang dan Jasa sehingga perbandingan Beban Operasi dengan Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.20
Perbandingan Beban Operasi dan Belanja Operasi
Tahun 2016

No	Uraian di LO	Jumlah pada LO (Rp)	Uraian di LRA	Jumlah pada LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Pegawai	454.543.661.672,72	Belanja Pegawai	454.650.746.610,00	(107.084.937,28)
2	Beban Persediaan	44.232.202.682,38	Belanja Barang dan Jasa	91.297.972.967,00	(47.065.770.284,62)
3	Beban Jasa	331.415.946.602,06	Belanja Barang dan Jasa	265.286.457.272,00	66.129.489.330,06
4	Beban Pemeliharaan	19.587.573.994,00	Belanja Barang dan Jasa	17.284.688.329,00	2.302.885.665,00
5	Beban Perjalanan Dinas	54.967.145.896,00	Belanja Barang dan Jasa	54.967.145.896,00	0,00
6	Beban Hibah	51.527.050.705,83	Belanja Hibah	43.911.496.040,00	7.615.554.665,83
7	Beban Bantuan Sosial	544.800.000,00	Belanja Bantuan Sosial	544.800.000,00	0,00



No	Uraian di LO	Jumlah pada LO (Rp)	Uraian di LRA	Jumlah pada LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	207.460.470.940,88			207.460.470.940,88
9	Beban Penyisihan Piutang	7.487.617.635,83			7.487.617.635,83
10	Beban Lain-lain	29.645.186.805,26			29.645.186.805,26
Jumlah		1.201.411.656.934,96		927.943.307.114,00	273.468.349.820,96

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.1. Beban Pegawai	454.543.661.672,72	412.173.803.904,34

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.21
Beban Pegawai
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	275,362,441,759.00	260,413,674,738.34
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	174,085,112,267.00	147,344,164,667.00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	3,343,100,000.00	3,358,000,000.00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,345,288,127.72	858,360,069.00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	407,719,519.00	199,604,430.00
Jumlah		454,543,661,672.72	412,173,803,904.34

Beban pegawai secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO terdapat perbedaan sebesar Rp107.084.937,28. Perbedaan tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Beban Gaji - LO	Rp	454,543,661,672.72	
Beban Gaji - LRA	Rp	454,650,746,610.00	(+)
Perbedaan	Rp		(107,084,937.28)

Penjelasan Perbedaan:

Beban Gaji 2015	Rp	(497,566,685.00)	(-)
Beban Gaji 2016	Rp	591,416,825.00	(+)
Utang kurang Bayar insentif 2016	Rp	17,949,222.72	(+)
Koreksi kurang Bayar insentif tahun 2015	Rp	(218,884,300.00)	(-)
	Rp	(107,084,937.28)	
	Rp		(0.00)

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.2. Beban Persediaan	44.232.202.682,38	75.566.825.255,30

Beban persediaan Tahun 2016 sebesar Rp44.232.202.682,38, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

BEBAN PERSEDIAAN

Saldo awal persediaan (tanpa persediaan hibah)	9.442.724.185,12
Utang beban persediaan 2015	(80.073.001,00)
Utang beban persediaan 2016	351.454.960,00
Penambahan persediaan dari LRA	56.561.615.956,00
Belanja modal dipindahkan ke beban persediaan	602.132.000,00
Pencatatan kembali stok persediaan karcis 2016 di SKPD, karena seluruhnya telah dibebankan	(6.969.572,60)
Penerimaan persediaan Dana Bos	9.694.219.840,00
Belanja persediaan dipindahkan menjadi Aset Tetap	(335.989.500,00)
Belanja persediaan dipindahkan menjadi beban jasa	(20.176.844.627,00)



Belanja persediaan dipindahkan menjadi beban lain-lain	(259.249.500,00)
Belanja persediaan dipindahkan menjadi beban non operasional lainnya	(517.417.862,72)
Saldo akhir persediaan (tanpa persediaan hibah)	(11.043.400.195,42)
	44.232.202.682,38

Dari perhitungan Beban Persediaan di atas dapat kita ketahui bahwa Belanja Barang Jasa pada LRA yang dikategorikan sebagai persediaan, menjadi salah satu komponen penambah Beban Persediaan tahun berjalan.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.3. Beban Jasa	331.415.946.602,06	294.321.206.326,92

Beban Jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Beban Jasa Tahun 2016 dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

BEBAN JASA

Jasa yang dibayar selama tahun 2016 (LRA)	264.108.313.121,00
Utang beban jasa 2015	(21.382.743.313,00)
Utang beban jasa 2016	8.243.298.002,00
Penambahan beban dari Dana BOS	29.964.369.186,00
Penambahan dari belanja persediaan	20.176.844.627,00
Belanja jasa dibayar dimuka tahun 2015	241.727.822,52
Belanja Jasa dibayar dimuka tahun 2016	(261.970.409,46)
Belanja modal dipindahkan ke beban jasa	78.267.810,00
Belanja jasa dipindahkan menjadi aset	(3.743.626.500,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.990.537.011,00
Beban jasa yang langsung memotong pendapatan	929.245,00
	331.415.946.602,06

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan	19.587.573.994,00	20.282.418.311,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan bersifat tidak menambah nilai aset tetap. Beban Pemeliharaan Tahun 2016 sebesar Rp19.587.573.994,00 dapat digambarkan dengan perhitungan berikut:

BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan LRA	17,284,688,329.00
Reklasifikasi dari Persediaan	199,900,000.00
Reklasifikasi ke Persediaan	(19,300,000.00)
Dana Bos	1,742,957,665.00
Utang Beban Pemeliharaan 2015	(156,880,000.00)
Utang Beban Pemeliharaan 2016	536,208,000.00
	19,587,573,994.00



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas	54.967.145.896,00	38.442.799.093,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 sebesar Rp54.967.145.896,00. Beban perjalanan dinas secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja perjalanan dinas TA 2016 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp54.967.145.896,00.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.6. Beban Hibah	51.527.050.705,83	86.152.969.033,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas pemberian hibah. Beban hibah dihitung dari pembayaran belanja hibah sesuai LRA serta ditambah dan dikurang sesuai komponen yang mempengaruhi beban hibah sebagai berikut:

<u>BEBAN HIBAH</u>	
Belanja hibah LRA	45,835,460,191.00
Saldo awal persediaan barang hibah	16,888,411,568.00
Utang beban barang hibah 2016	972,982,600.00
Dana Bos	711,184,728.00
Aset tetap yang dihibahkan	9,882,303,820.83
pelunasan utang hibah tahun 2015	(310,600,000.00)
Saldo akhir persediaan barang hibah	(22,452,692,202.00)
	51,527,050,705.83

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial	544.800.000,00	1.369.500.000,00

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp544.800.000,00 terdiri atas bantuan sosial kepada anggota masyarakat dan bantuan sosial yang tidak direncanakan. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja bantuan sosial Tahun 2016 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp544.800.000,00, yaitu beban bantuan sosial yang tidak direncanakan.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	207.460.470.940,88	174.898.280.680,58

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud Tahun 2016 sebesar Rp207.460.470.940,88. Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
2. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai



perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.

3. Nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2016 diperoleh dengan cara menghitung akumulasi penyusutan dan amortisasi sampai dengan 31 Desember 2016 dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi sampai dengan 31 Desember 2015. Data Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang digunakan untuk perhitungan tersebut adalah data saldo akhir dan saldo awal setelah koreksi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4.22
Perhitungan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2016

No	Penyusutan / Amortisasi	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Beban Tahun 2016 (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	185,898,992,101.38	151,199,770,782.01	34,699,221,319.37
2	Gedung Dan Bangunan	184,662,514,096.74	153,750,031,176.73	30,912,482,920.01
3	Jalan Jaringan Dan Irigasi	520,998,787,123.19	390,548,576,914.09	130,450,210,209.10
4	Aset Tetap Lainnya	19,699,958,347.23	14,363,601,199.24	5,336,357,147.99
5	Aset Lain-lain	25,325,542,613.65	19,696,343,072.59	5,629,199,541.06
	Jumlah Penyusutan	936,585,794,282.19	729,558,323,144.66	207,027,471,137.53
5	Aset Tak Berwujud	1,366,067,281.13	933,067,477.78	432,999,803.35
	Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	937,951,861,563.32	730,491,390,622.44	207,460,470,940.88

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
7.487.617.635,83	6.705.855.269,48

5.4.2.1.9. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun 2015, diakui penyisihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2016 diperoleh berdasarkan data saldo akhir piutang sebelum penghapusbukuan yang dihitung penyisihannya dikurangi penyisihan dari saldo awal piutang setelah koreksi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4.23
Perhitungan Beban Penyisihan Piutang
Tahun 2016

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Beban Tahun 2016 (Rp)
1	Piutang Pajak pada DISPENDA	29,552,981,631.80	23,386,403,985.20	6,166,577,646.60
2	Piutang Retribusi pada DISTAMBEN	4,387,600,000.00	4,193,960,000.00	193,640,000.00
3	Piutang Lainnya pada DPU	1,381,996,510.40	744,936,755.20	637,059,755.20
4	TPA pada DISTANPANAK	596,260,000.00	425,642,600.00	170,617,400.00
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	320,091,626.71	40,233,703.08	279,857,923.63
6	Dinas Pasar	14,777,165.00	0.00	14,777,165.00
6	Piutang Lainnya pada RSUD	25,087,745.40	0.00	25,087,745.40
	Jumlah	36,278,794,679.31	28,791,177,043.48	7,487,617,635.83



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.1.10. Beban Lain- lain	29.645.186.805,26	28.168.409.492,88

Beban lain- lain sebesar Rp29.645.186.805,26 yang berasal dari :

BEBAN LAIN-LAIN

Reklasifikasi dari Persediaan	1,139,397,526.62
Beban Penurunan Nilai Investasi	24,817,209,149.64
Dana Bos	3,688,580,129.00
	29,645,186,805.26

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.2.2. Beban Transfer	93.927.143.043,60	145.522.224.975,00

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang- undangan. Beban transfer terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.24
Beban Transfer
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat*)	93,227,209,643.60	144,949,794,115.00
2	Beban Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan*)	699,933,400.00	572,430,860.00
Jumlah		93,927,143,043.60	145,522,224,975.00

Beban Transfer Tahun 2016 sebesar Rp93.927.143.043,60, dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Transfer Keuangan kepada Desa/Pemerintah Desa Tahun 2016 sebesar Rp93.227.209.643,60;
2. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp699.933.400,00 merupakan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yakni kepada PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Beban transfer secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja transfer Tahun 2016 yang disajikan dalam LRA sebesar Rp88.441.193.198,40 karena dana sudah disalurkan ke desa.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(2.944.144.344,30)	81.133.511.516,29

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 sebesar Rp(2.944.144.344,30), dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4.25
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pendapatan-LO	1.292.394.655.634,26	1.364.737.803.857,79
2	Beban-LO	(1.295.338.799.978,56)	(1.283.604.292.341,50)
Jumlah		(2.944.144.344,30)	81.133.511.516,29

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.500.298.914,35)	(19.772.393.332,26)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 sebesar Rp(3.500.298.914,35), dapat ditunjukkan pada tabel 5.4.26 berikut:

Tabel 5.4.26
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Jumlah Surplus Non Operasional	1.558.750.987,85	0,00
2	Jumlah Defisit Non Operasional	(5.059.049.902,20)	(19.772.393.332,26)
Jumlah		(3.500.298.914,35)	(19.772.393.332,26)

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.5 Pos Luar Biasa	(336.020.750,00)	0,00

Beban Luar Biasa Tahun 2016 merupakan beban tak terduga sebesar Rp(336.020.750,00)

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.4.6 Surplus/Defisit- LO	(6.780.464.008,65)	61.361.118.184,03

Surplus/Defisit - LO Tahun 2016 sebesar Rp(6.780.464.008,65) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.27
Surplus/Defisit - LO
Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional	(2,944,144,344.30)	81,133,511,516.29
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3,500,298,914.35)	(19,772,393,332.26)
3	Pos Luar Biasa	(336,020,750.00)	0.00
Jumlah		(6,780,464,008.65)	61,361,118,184.03



5.5. KOMPONEN- KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2016, dan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2016.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Penjelasan dari aktivitas operasi untuk arus masuk kas, arus keluar kas, dan arus Kas Bersih adalah sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.456.366.469.001,95	1.311.887.549.510,86

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp1.456.366.469.001,95 dan Rp1.311.887.549.510,86. Terjadi kenaikan pemasukan dari Aktivitas Operasi sebesar Rp144.478.919.419,09 atau sebesar 11,01% dari tahun 2015.

Perbandingan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Perbandingan Pendapatan pada LAK dan LRA
Tahun Anggaran 2016

URAIAN	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Perbedaan
1	2	3	4 = (3-2)
Pajak Daerah	29,243,768,435.00	29,308,277,135.00	64,508,700.00
Retribusi Daerah	7,770,294,970.00	7,772,789,470.00	2,494,500.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,991,705,932.38	3,991,705,932.38	0.00
Lain-lain PAD yang sah	66,995,985,727.57	75,164,890,369.57	8,168,904,642.00
Dana Bagi Hasil Pajak	84,973,743,533.00	84,973,743,533.00	0.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	416,573,464,336.00	416,573,464,336.00	0.00
Dana Alokasi Umum	465,897,113,000.00	465,897,113,000.00	0.00
Dana Alokasi Khusus	118,137,999,965.00	118,137,999,965.00	0.00
Dana Penyesuaian	149,792,752,518.00	149,792,752,518.00	0.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	74,626,379,596.00	74,626,379,596.00	0.00
Hibah	38,363,260,989.00	38,363,260,989.00	0.00
Jumlah	1,456,366,469,001.95	1,464,602,376,843.95	8,235,907,842.00

Pada Tabel 5.5.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas bila dibandingkan dengan Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdapat selisih sebesar Rp8.235.907.842,00. Selisih tersebut dikarenakan adanya:

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp2.494.500,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan per 31 Desember 2016 dari 11 puskesmas yang belum disetor ke kas daerah, tetapi realisasi pendapatannya pada tahun anggaran 2016 sudah diakui oleh Dinas Kesehatan;
2. Pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah tetapi langsung digunakan oleh SKPD sebesar Rp8.050.179.000,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan Dinas Kesehatan yang bersumber



dari dana kapitasi JKN;

- 3. Pendapatan yang bersumber dari penjualan aset atas peralatan dan mesin sebesar Rp61.875.200,00 yang diakui sebagai Lain-lain PAD yang sah pendapatan dari pengembalian dan penerimaan lain-lain) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016;
- 4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp64.508.700,00 merupakan pajak catering tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
- 5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp56.850.442,00 merupakan Pendapatan Bunga Rekening Tabungan Dana BOP/BOMM yang diakui sebagai pendapatan jasa giro.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.104.147.434.860,00	1.047.700.492.843,29

Saldo Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp1.104.147.434.860,00 dan Rp1.047.700.492.843,29 sehingga terjadi peningkatan pengeluaran sebesar Rp56.446.942.016,71 atau sebesar 5,39%.

Apabila diperhatikan antara Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas dengan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada LAK
Dengan Belanja Operasi pada LRA
Tahun Anggaran 2016

URAIAN	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Perbedaan
1	2	3	4 = (3 - 2)
Pembayaran Pegawai	454,651,746,610.00	454,650,746,610.00	(1,000,000.00)
Pembayaran Barang	438,047,808,122.00	444,549,037,368.00	6,501,229,246.00
Pembayaran Hibah	28,198,723,136.00	28,198,723,136.00	0.00
Pembayaran Bantuan Keuangan	182,368,336,242.00	182,368,336,242.00	0.00
Pembayaran Bantuan Sosial	544,800,000.00	544,800,000.00	0.00
Belanja Tidak Terduga	336,020,750.00	336,020,750.00	0.00
Jumlah	1,104,147,434,860.00	1,110,647,664,106.00	6,500,229,246.00

Perbedaan antara Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas dengan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran berasal dari:

- 1. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.000.000,00 dimana diakui sebagi pengurang belanja pada LRA
- 2. Penambahan belanja pada LRA dari 14 Puskesmas sebagai penerima Dana Kapitasi JKN sebesar Rp6.501.229.246,00. Rincian Belanja Dana Kapitasi JKN sebagai penambah belanja pada LRA dapat dilihat pada tabel 5.5.3. berikut.

Tabel 5.5.3
Rincian Belanja Dana Kapitasi JKN
Tahun Anggaran 2016

URAIAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
PUSKESMAS PAGATAN	13,050,000.00	780,517,226.00
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	10,800,000.00	733,343,757.00
PUSKESMAS BATULICIN	10,800,000.00	523,845,393.00
PUSKESMAS SEBAMBAN I	9,450,000.00	418,793,942.00
PUSKESMAS PULAU TANJUNG	6,300,000.00	100,945,085.00
PUSKESMAS KARANG BINTANG	8,100,000.00	226,942,817.00



URAIAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
PUSKESMAS TELUK KEPAYANG	5,850,000.00	181,355,292.00
PUSKESMAS SATUI	8,900,000.00	1,212,527,825.00
PUSKESMAS DARUL AZHAR	9,450,000.00	319,211,962.00
PUSKESMAS BATULICIN I	8,100,000.00	216,196,255.00
PUSKESMAS SEBAMBAN II	9,517,500.00	359,134,264.00
PUSKESMAS MANTEWE	8,700,000.00	624,407,529.00
PUSKESMAS LASUNG	10,800,000.00	389,109,955.00
PUSKESMAS GIRI MULYA	6,750,000.00	288,330,444.00
Jumlah	126,567,500.00	6,374,661,746.00

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	352.219.034.141,95	264.187.056.667,57

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp352.219.034.141,95 dan Rp264.187.056.667,57 sehingga terjadi kenaikan Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp88.031.977.434,38 atau sebesar 33,32%.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas ini mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh dan melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	61.875.200,00	0,00

Arus Masuk Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi pada tahun 2016 sebesar Rp61.875.200,00 diperoleh dari pelepasan aset tetap peralatan dan mesin yakni berupa mobil dinas pejabat yang dijual secara penunjukan langsung.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	281.527.802.553,30	314.784.356.723,27

Arus Keluar Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi aset non keuangan selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp281.527.802.553,30 dan Rp314.784.356.723,27 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.256.554.169,97 atau sebesar 10,56%.



Tabel 5.5.4
Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
dengan Realisasi Belanja Modal pada LRA
Tahun Anggaran 2016

URAIAN	Laporan Arus Kas (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4 = (3 - 2)
Belanja Tanah	22,140,593,600.00	22,140,593,600.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	35,624,418,535.30	35,973,808,456.30	349,389,921.00
Belanja Gedung dan Bangunan	26,064,823,147.00	26,064,823,147.00	0.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	181,344,969,521.00	181,344,969,521.00	0.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7,402,997,750.00	7,402,997,750.00	0.00
Penyerlahan Modal Pemerintah Daerah	8,950,000,000.00	8,950,000,000.00	0.00
Jumlah	281,527,802,553.30	281,877,192,474.30	349,389,921.00

Arus Keluar Kas dari investasi aset non keuangan bila dibandingkan dengan data laporan realisasi anggaran terdapat selisih sebesar Rp349.389.921,00 sebagaimana terlihat pada tabel 5.5.4. Selisih tersebut sebagai akibat dari penambahan belanja peralatan dan mesin pada LRA sebesar Rp349.389.921,00 yang berasal dari belanja modal yang bersumber dari dana kapitasi JKN. Rincian Belanja Modal Dana Kapitasi JKN sebagai penambah belanja pada LRA dapat dilihat pada tabel 5.5.5. berikut.

Tabel 5.5.5
Rincian Belanja Modal Dana Kapitasi JKN
Tahun 2016

URAIAN	Belanja Modal (Rp)
PUSKESMAS PAGATAN	105,110,000.00
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	59,000,000.00
PUSKESMAS BATULICIN	27,088,100.00
PUSKESMAS SEBAMBAN I	22,611,500.00
PUSKESMAS TELUK KEPAYANG	8,011,000.00
PUSKESMAS SATUI	15,000,000.00
PUSKESMAS BATULICIN I	10,940,300.00
PUSKESMAS MANTEWE	28,500,000.00
PUSKESMAS LASUNG	56,229,021.00
PUSKESMAS GIRI MULYA	16,900,000.00
Jumlah	349,389,921.00

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(281.465.927.353,30)	(314.784.356.723,27)

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar (Rp281.465.927.353,30) dan (Rp314.784.356.723,27) sehingga terjadi kenaikan Arus Kas Bersih sebesar Rp33.318.429.369,97 atau sebesar 10,58%.

5.5.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	500.000.000,00

Arus Masuk Kas yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sama sebesar Rp0,00 dan Rp500.000.000,00.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	13.415.791.525,33	886.658.016,00

Arus Keluar Kas yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.415.791.525,33 dan Rp886.658.016,00 sehingga terjadi kenaikan pengeluaran sebesar Rp12.529.133.509,33 atau sebesar 1413,07%.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.3.3. Arus Bersih Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(13.415.791.525,33)	(386.658.016,00)

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp13.415.791.525,33) dan (Rp386.658.016,00) sehingga terjadi penurunan Arus Kas Bersih sebesar Rp13.029.133.509,33 atau sebesar 3369,68%.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	70.096.948.480,00	33.941.492.412,00

Arus Masuk Kas yang dihasilkan dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp70.096.948.480,00 dan Rp33.941.492.412,00 sehingga terjadi kenaikan pemasukan kas sebesar Rp36.155.456.068,00 atau sebesar 106,52%.

Perhitungan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran dapat dijelaskan pada Tabel 5.5.6. berikut ini:



Tabel 5.5.6
Perhitungan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
Tahun Anggaran 2016

Uraian	JUMLAH
Iuran Wajib Pegawai	19.567.709.007.00
Taperum	413.137.000.00
Pajak Penghasilan Ps 21	16.322.615.906.00
Pajak Penghasilan Ps 22	1.279.212.991.00
Pajak Penghasilan Ps 23	341.000.915.00
Pajak Penghasilan Final	5.346.679.108.00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26.786.031.727.00
Lainnya	<u>29.343.255.00</u> (+)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.085.729.909.00
UYHD Tahun sebelumnya	4.011.160.00
Pengembalian Kas Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	6.359.000.00
Iuran Wajib Pegawai	200.000.00
Pajak Penghasilan Ps 23	28.411.00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	620.000.00 (+)
Pengembalian Uang Pajak dari kesalahan pembuatan SP2D Non Anggaran	848.411.00 (+)
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	70.096.948.480.00

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	70.086.578.320,00	33.945.503.572,00

Arus Keluar Kas yang dihasilkan dari aktivitas non anggaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp70.086.578.320,00 dan Rp33.945.503.572,00 sehingga terjadi kenaikan pengeluaran kas sebesar Rp36.141.074.748,00 atau sebesar 106,47%.

Perhitungan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran dapat dijelaskan pada Tabel 5.5.6. berikut ini:

Tabel 5.5.7.
Perhitungan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
Tahun Anggaran 2016

Uraian	JUMLAH
Iuran Wajib Pegawai	19,567,709,007.00
Taperum	413,137,000.00
Pajak Penghasilan Ps 21	16,322,428,406.00
Pajak Penghasilan Ps 22	1,279,212,991.00
Pajak Penghasilan Ps 23	341,188,415.00
Pajak Penghasilan Final	5,346,679,108.00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26,786,031,727.00
Lainnya	<u>29.343.255.00</u> (+)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70,085,729,909.00
Iuran Wajib Pegawai	200,000.00
Pajak Penghasilan Ps 23	28,411.00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	620,000.00 (+)
Lebih Setor Pengeluran PFK karena kesalahan pembuatan SP2D Non Anggaran	848,411.00 (+)
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	70,086,578,320.00



	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	10.370.160,00	(4.011.160,00)

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp10.370.160,00 dan (Rp4.011.160,00) sehingga terjadi peningkatan Arus Kas Bersih sebesar Rp14.381.320,00 atau sebesar 358,53%.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	57.347.685.423,32	(50.987.969.231,70)

Penurunan kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp57.347.685.423,32 dan Rp50.987.969.231,70 sehingga terjadi kenaikan terhadap Penurunan Kas sebesar Rp108.335.654.655,02 atau sebesar 212,47% dari jumlah Penurunan Kas Tahun 2015.

Tabel 5.5.8.
Perbandingan Kenaikan/Penurunan Kas
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	352,219,034,141.95	264,187,056,667.57
Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	(281,465,927,353.30)	(314,784,356,723.27)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(13,415,791,525.33)	(368,658,016.00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	10,370,160.00	(4,011,160.00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	57,347,685,423.32	(50,969,969,231.70)

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	41.116.787.449,20	92.104.756.680,90

Saldo awal kas di BUD dan BLUD per 1 Januari 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp41.116.787.449,20 dan Rp92.104.756.680,90 sehingga terjadi penurunan saldo awal kas sebesar Rp50.987.969.231,70 atau sebesar 55,36% dari jumlah saldo awal kas di BUD dan BLUD Tahun 2015. Rincian saldo awal kas di BUD dan BLUD per 01 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

- Saldo awal kas pad BUD sebesar Rp33.960.967.454,93
- Saldo awal kas pada BLUD sebesar Rp7.155.819.994,27

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	98.464.472.872,52	41.116.787.449,20

Saldo akhir kas di BUD dan BLUD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp98.464.472.872,52 dan Rp41.116.787.449,20 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas sebesar Rp57.347.685.423,32 atau sebesar 139,48% dari jumlah saldo akhir kas di BUD dan BLUD Tahun 2015.



Tabel 5.5.9
Perbandingan Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD
Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No	URAIAN	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	57,347,685,423.32	(50,969,969,231.70)	108,317,654,655.02	212.51%
2	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	41,116,787,449.20	92,104,756,680.90	(50,987,969,231.70)	-55.36%
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD		98,464,472,872.52	41,134,787,449.20	57,329,685,423.32	139.37%

Rincian saldo kas di BUD dan BLUD per 31 desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Saldo kas pad BUD sebesar Rp84.347.759.219,45
- Saldo kas pada BLUD sebesar Rp14.111.130.937,07

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.8. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	2.585.596.409,00	1.386.079.444,00

Kas Dana Kapitasi JKN merupakan saldo kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh 14 puskesmas di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp2.585.596.409,00 dan Rp1.386.079.444,00 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas dana kapitasi JKN sebesar Rp1.199.516.965,00 atau sebesar 86,54% dari saldo akhir kas dana kapitasi JKN tahun 2015. Rincian Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN dari 14 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 5.5.10.

Tabel 5.5.10
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	URAIAN	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	PUSKESMAS PAGATAN	447.456.948.00	340.924.174.00	106.532.774.00	31.25%
2	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	113.850.608.00	103.142.365.00	10.708.243.00	10.38%
3	PUSKESMAS BATULICIN	272.724.689.00	123.950.182.00	148.774.507.00	120.03%
4	PUSKESMAS SEBAMBAN I	230.009.225.00	89.816.667.00	140.192.558.00	156.09%
5	PUSKESMAS PULAU TANJUNG	17.502.706.00	6.013.291.00	11.489.415.00	191.07%
6	PUSKESMAS KARANG BINTANG	90.025.359.00	29.134.676.00	60.890.683.00	209.00%
7	PUSKESMAS TELUK KEPAYANG	44.768.614.00	40.207.906.00	4.560.708.00	11.34%
8	PUSKESMAS SATUI	484.321.107.00	237.704.932.00	246.616.175.00	103.75%
9	PUSKESMAS DARUL AZHAR	165.831.952.00	56.588.914.00	109.243.038.00	193.05%
10	PUSKESMAS BATULICIN I	42.391.325.00	32.731.880.00	9.659.445.00	29.51%
11	PUSKESMAS SEBAMBAN II	189.070.122.00	59.074.754.00	129.995.368.00	220.05%
12	PUSKESMAS MANTEWE	293.874.073.00	142.349.602.00	151.524.471.00	106.45%
13	PUSKESMAS LASUNG	63.197.122.00	47.742.098.00	15.455.024.00	32.37%
14	PUSKESMAS GIRI MULYA	130.572.559.00	76.698.003.00	53.874.556.00	70.24%
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN		2.585.596.409.00	1.386.079.444.00	1.199.516.965.00	86.54%

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.9. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00	4.011.160,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp4.011.160,00, sehingga terjadi penurunan saldo sebesar Rp3.011.160,00 atau 75,07% dari jumlah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran tahun 2015.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.10. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2.494.500,00	6.359.000,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing



sebesar Rp2.494.500,00 dan Rp6.359.000,00 sehingga terjadi penurunan saldo sebesar Rp3.864.500,00 atau 60,77% dari jumlah saldo akhir kas di bendahara penerimaan tahun 2015. Saldo Akhir Kas tersebut adalah saldo akhir kas di bendahara penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp2.494.500.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.11. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	124.630.106,00	54.122.811,00

Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp124.630.106,00 dan Rp54.122.811,00 sehingga terjadi kenaikan saldo sebesar Rp70.507.295,00 atau sebesar 130,27% dari jumlah Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2015. Rincian saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran dapat dilihat pada tabel 5.5.11 berikut:

Tabel 5.5.11.
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2016

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Katering	64,508,700.00
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran BOP/BOMM	56,850,442.00
3	Pajak Penghasilan	3,270,964.00
Jumlah		124,630,106.00

Tabel 5.5.11. di atas menjelaskan :

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp64.508.700,00 merupakan pajak catering tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran SKPD; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12.
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Pajak Katering)
Per 31 Desember 2016

NO	SKPD	Nilai (Rp)
1	BAGIAN HUMAS	990,000.00
2	BAGIAN UMUM	33,286,300.00
3	DINKES	6,268,600.00
4	DISDIK	14,704,800.00
5	DISPENDA	120,000.00
6	DISTABAHAN	183,000.00
7	INSPEKTORAT	756,000.00
8	KEC BATULICIN	1,545,000.00
9	KEC KARANG BINTANG	5,775,000.00
10	KEC MENTEW	700,000.00
11	KEL KAMPUNG BARU	180,000.00
Jumlah		64,508,700.00

2. Saldo kas lainnya di Dinas Pendidikan sebesar Rp56.850.442,00 adalah saldo kas bendahara BOP/BOMM yang ada di rekening Bendahara Bantuan Operasional Pendidik (BOP) di 16 TK,180 SDN, 53 SMPN/MTSN dan saldo yang ada di rekening bendahara Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) di 16 SMAN/SMKN di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Saldo akhir kas ini merupakan akumulasi pendapatan bunga bank dikurangi administrasi pajak yang ada di rekening Bendahara BOP/BOMM sejak tahun 2013 (sejak penetapan dana BOP/BOMM langsung masuk ke rekening Bendahara).



Tabel 5.5.13
Saldo Akhir Kas Lainnya dibendahara BOP/BOMM
Per 31 Desember 2016

NO	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Saldo Akhir Dana BOP pada TK	3,184,703.00
2	Saldo Akhir Dana BOP pada 180 SDN/MIN	33,072,488.00
3	Saldo Akhir Dana BOP pada SMPN/MTSN	13,935,529.00
4	Saldo Akhir Dana BOMM pada 16 SMAN/SMKN	6,657,722.00
Jumlah		56,850,442.00

3. Saldo kas lainnya di Bendahara pengeluaran Kelurahan Batulicin (nomor rekening 0126-01-000591-30-6) sebesar Rp1.150.000,00 merupakan utang PFK pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai yang baru disetor kas daerah pada tanggal 27 Januari 2017 dan Saldo kas lainnya di Bendahara pengeluaran Kecamatan Karang Bintang sebesar Rp2.120.000,00 merupakan Utang PFK dan sudah disetorkan pada tanggal 12 Januari 2017.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.12. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara BOS	771.235.874,00	1.190.582.533,00

Saldo Akhir Kas Lainnya di bendahara BOS merupakan saldo dana BOS yang ada di rekening 178 SDN dan 53 SMPN di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp771.235.874,00 dan Rp1.190.582.533,00 sehingga terjadi penurunan saldo sebesar Rp419.346.659,00 atau sebesar 35,22% dari jumlah Saldo Kas Lainnya di Bendahara BOS Tahun 2015. Rincian saldo akhir kas lainnya di Bendahra BOS adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.14
Saldo Akhir Kas Lainnya dibendahara BOS
Per 31 Desember 2016

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Saldo Akhir Dana BOS pada 178 SDN	486,784,033.00
2	Saldo Akhir Dana BOS pada 53 SMPN	284,451,841.00
Saldo Akhir Dana BOS TA 2016		771,235,874.00

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
5.5.14. Saldo Akhir Kas	101.949.429.761,52	43.757.942.397,20

Saldo Akhir Kas merupakan total seluruh saldo kas sampai tanggal 31 Desember 2016. Saldo akhir kas pada Pemerintah Kabupaten Tanah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp101.949.429.761,52 dan Rp43.757.942.397,20 sehingga Saldo Akhir Kas naik sebesar Rp58.191.487.364,32 atau sebesar 132,98% dari Jumlah Saldo Akhir Kas Tahun 2015. Rincian Saldo Akhir Kas dapat dilihat pada tabel 5.5.15.



Tabel 5.5.15
Saldo Akhir Kas
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	URAIAN	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	98,464,472,872.52	41,116,787,449.20	57,347,685,423.32	139.48%
2	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	2,585,596,409.00	1,386,079,444.00	1,199,516,965.00	86.54%
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000.00	4,011,160.00	(3,011,160.00)	-75.07%
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2,494,500.00	6,359,000.00	(3,864,500.00)	-60.77%
5	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	124,630,106.00	54,122,811.00	70,507,295.00	130.27%
6	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara BOS	771,235,874.00	1,190,582,533.00	(419,346,659.00)	-35.22%
Jumlah		101,949,429,761.52	43,757,942,397.20	58,191,487,364.32	132.98%





5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun operasional.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.6.1. Ekuitas Awal	2.886.228.985.550,91	3.382.373.631.739,03

Saldo ekuitas awal tahun 2016 sebesar Rp2.886.228.985.550,91 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2015 sesuai dengan Neraca audited 2015 yang diperoleh dari penjumlahan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Saldo Awal Ekuitas
Tahun 2016

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Aset	2,930,134,205,448.03
Kewajiban	43,905,219,897.12 (-)
Ekuitas	2,886,228,985,550.91

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.6.2. Surplus / Defisit – LO	(6.780.464.008,65)	61.361.118.184,03

Surplus/Defisit LO sebesar Rp(6.780.464.008,65) merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

<u>Surplus /Defisi - LO</u>	
Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional	(3,461,562,207.02)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2,982,881,051.63)
Pos Luar Biasa	(336,020,750.00)
	(6,780,464,008.65)

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.6.3. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	0,00	(560.374.171.108,93)

Selain penambahan ekuitas dari Surplus LO, Ekuitas dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Ekuitas dipengaruhi kebijakan akuntansi yang berubah yaitu akuntansi berbasis akrual, sehingga perlu adanya pembentukan saldo awal akun-akun baru dimana pada Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual, akun-akun tersebut belum ada. Selain itu adanya kebijakan batas kapitalisasi nilai aset tetap juga mempengaruhi naik/turunnya nilai ekuitas.



	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.6.4. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	49.725.385.138,82	2.868.406.736,78

Ekuitas juga dipengaruhi oleh adanya koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya. Dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp49.725.385.138,82 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koreksi Tambah Saldo Awal Kas sebesar Rp333.280.121,00 adalah dari koreksi saldo awal kas bendarahara bos;
- b. Koreksi Kurang Saldo Awal Persediaan sebesar Rp1.511.081,40 adalah Pencatatan kembali stok persediaan karcis tahun 2015 di Dinas Pendapatan, karena tahun sebelumnya seluruhnya telah dibebankan;
- c. Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang sebesar Rp65.366.617.302,34 adalah koreksi atas:
 - Piutang Retribusi Cetak Peta pada Dinas Pertambangan sebesar Rp12.100.000,00 koreksi saldo awal piutang yg tidak terdaftar dalam daftar piutang tahun sebelumnya;
 - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada BPKAD sebesar Rp 221.959.809,34 koreksi saldo awal piutang untuk tuntutan ganti rugi;
 - Piutang Lainnya pada RSUD sebesar Rp13.118.000,00 terdiri atas pendapatan dari jasa umum tahun 2016 yang belum diterima sebesar Rp1.118.000,00 dan pend+apatan dari jasa parkir tahun 2016 yang belum diterima sebesar Rp12.000.000,00;
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi pada BPKAD sebesar Rp3.605.648.760,00 yang merupakan penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2015;
 - Piutang Pajak PBB 2015 yang diterima di Tahun 2016 sebesar Rp166.825.229,00
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang baru diterima Tahun 2016 sebesar Rp61.346.965.504,00;
- d. Koreksi Tambah Saldo Awal Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain sebesar Rp(19.696.343.072,59);
- e. Koreksi Kurang Saldo Awal Piutang sebesar Rp(54.491.932,00) terdiri atas koreksi pajak PBB Tahun 2015 sebesar Rp(18.191.932,00) dan pelunasan piutang cetak peta sebesar Rp(36.300.000,00);
- f. Koreksi Kurang Saldo Awal Penyisihan Piutang sebesar Rp(7.704.800,00); pada piutang RSUD;
- g. Koreksi Tambah Saldo Awal Aset Tetap sebesar Rp5.566.749.203,76 adalah koreksi atas;
 - Penerimaan hibah dari APBN tahun 2015 berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp1.430.378.500,00;
 - Hasil penilaian bangunan kantor Kelurahan Tungkan Pangeran yang sebelumnya bernilai Rp1,00 dengan hasil penilaian dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp454.638.999,00;
 - Pencatatan atas gedung yang dibangun dengan menggunakan dana APBN untuk Kantor Kecamatan Karang Bintang, Batulicin, Mantewe, Kuranji, dan Angsana dengan nilai sebesar Rp3.681.731.700,05; dan
 - Koreksi atas selisih angka dibelakang koma dengan nilai sebesar Rp4,71
- h. Koreksi Kurang Saldo Awal Aset Tetap sebesar Rp(9.487.968.000,61) adalah koreksi atas:
 - Penerimaan hibah aset tetap tanah tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum atas tanah dibawah jalan yang baru selesai dilakukan penilaian dengan nilai sebesar Rp9.293.682.000,00;
 - Reklasifikasi atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan kegiatan normalisasi sungai bukan termasuk dalam aset tetap sebesar Rp194.286.000,00; dan
 - Koreksi atas selisih angka dibelakang koma dengan nilai sebesar Rp0,61
- i. Koreksi Kurang Saldo Awal Utang sebesar Rp1.038.700.000,00 adalah koreksi atas Utang Jangka



- Pendek Lainnya pada Bagian Pemerintahan Setda;
- j. Koreksi kurang Investasi Jangka Panjang atas Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp(2.937.508.423,96) terdiri atas:
- BUMD PDAM atas saldo rugi sebesar Rp956.266.927,16;
 - BUMD PDAM atas koreksi nilai invenstasi saldo awal dengan nilai sebesar Rp1.595.005.362,00; dan
 - BUMD Batulicin Jaya Utama atas saldo rugi sebesar Rp386.236.134,80.
- k. Koreksi Kurang Pendapatan – LO sebesar Rp9.968.816.099,00 terdiri atas:
- DBH Kurang Bayar Pajak Rokok 2015 belum dicatat sebagai piutang dengan nilai sebesar Rp389.427.155,00;
 - Koreksi kurang atas pendapatan Pajak Daerah yang merupakan penerimaan tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp1.408.528.684,00;
 - Koreksi kurang atas pendapatan jasa giro 2015 yang diterima di 2016 dengan nilai sebesar Rp39.093.260,00;
 - Koreksi kurang atas pendapatan JKN 2015 yang diterima di 2016 dengan nilai sebesar Rp5.923.000,00; dan
 - Penyesuaian nilai pendapatan LO atas hibah tanah Dinas PU dengan nilai sebesar Rp8.125.844.000,00
- l. Koreksi Tambah Pendapatan – LO sebesar Rp(83.824.069,00) terdiri atas:
- Koreksi tambah atas pendapatan jasa giro 2016 yang diterima di 2017 dengan nilai sebesar Rp82.700.569,00; dan
 - Koreksi tambah atas pendapatan JKN 2016 yang diterima di 2017 dengan nilai sebesar Rp1.123.500,00;
- m. Koreksi Kurang Aset Lainnya sebesar Rp(1.185.436.892.04) merupakan Koreksi pencatatan TGR - Disesuaikan dengan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah BPK-Inspektorat;
- n. Koreksi Tambah Aset Lainnya sebesar Rp1.040.095.682,52 merupakan koreksi pencatatan TGR - Disesuaikan dengan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah BPK-Inspektorat;
- o. Koreksi Tambah Beban – LO sebesar Rp591.416.825,00 merupakan Penambahan nilai beban LO atas beban gaji 2016 yang dibayar di 2017;
- p. Koreksi Kurang Beban – LO sebesar Rp(716.450.985,00) terdiri atas:
- Pengurangan nilai beban LO atas beban gaji 2015 yang dibayar di 2016 dengan nilai sebesar Rp497.566.685,00; dan
 - Nilai kurang bayar insentif 2015dihapus karena masih tercatat pada beban pegawai LO dengan nilai sebesar Rp218.884.300,00.

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
5.6.5. Ekuitas Akhir	2.929.173.906.681,08	2.886.228.985.550,91

Jumlah ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp2.929.173.906.681,08 menjadi nilai ekuitas di neraca.



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 kabupaten/kota yang berada dibagian tenggara Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdiri sejak tanggal 8 April 2003 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu memilikiluas ±5.066,96 km² (506.696 ha) atau sekitar 13,56% dari luas Propinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis terletak antara 2°52' - 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°04' Bujur Timur. Kabupaten ini terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 144 desa, dan 5 kelurahan, dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki perbatasan sebagai berikut:

- sebelah Utara dan Timur : Kabupaten Kotabaru
- sebelah Selatan : Laut Jawa
- sebelah Barat : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut

Adapun Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah :

Tabel 6.1
Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Kusan Hilir	401,54	7,92
2	Sungai Loban	358,41	7,07
3	Satui	876,58	17,30
4	Angsana	151,54	2,99
5	Kusan Hulu	1.609,39	31,76
6	Kuranji	110,24	2,18
7	Batulicin	127,71	2,52
8	Karang Bintang	118,02	2,33
9	Simpang Empat	302,32	5,97
10	Mantewe	1.011,21	19,96
Tanah Bumbu		5.066,96	100,00

6.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan Yang Menjadi Dasar Kegiatan Operasional

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasionalbagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2003, Undang-undang No. 32 Tahun 2004



serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

6.4. Informasi Lainnya

- Terdapat realisasi penyaluran DAK fisik bidang sarana perdagangan yang disalurkan pada Triwulan Satu dimana pada APBNP Tahun Anggaran 2016 telah dihapus sehingga terjadi kelebihan salur dengan jumlah sebesar Rp134.580.000,00;
- Menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 12/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang, dimana urusan yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi meliputi enam urusan yaitu pendidikan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, perhubungan, serta perikanan dan kelautan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan serah terima Personel, Pendanaan, sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BAST Nomor 130/383/PEM/2016 Tanggal 30 September 2016.
39 Tahun 2016

Sebagai kelanjutan pelaksanaan BAST tersebut, berdasarkan SK Gubernur Nomor 188.44/0162/KUM/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang Pengakuan dan Pencatatan Aset atas Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah, aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Aset lain-lain sebagaimana dijelaskan pada Calk 5.3.1.5.4.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Tanah Bumbu selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidak berhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ini kami sajikan semoga bermanfaat bagi *stakeholder* dan mendapatkan Ridho dari Allah S.W.T Amiin.